cc BY ND NC

18/43214
43214

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUBSIDI LPG 3 KG DI KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN

UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

SITI RAHMATUL AZIZAH

NIM. 500894791

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2017

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUBSIDI LPG 3 KG DI KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN

Siti Rahmatul Azizah
azizahsitirahmatul@gmail.com

Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka

Penelitian ini dilatarbelakangi kelangkaan LPG 3 Kg yang sering terjadi di masyarakat dan Harga LPG 3 Kg jauh diatas HET yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah implementasi Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan faktor- faktor apa saja yang menghambat implementasi Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan solusi dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan distribusi LPG 3 Kg bersubsidi di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan melibatkan berbagai aspek yang harus digali lebih mendalam dan komprehensif serta pendekatan penelitian kualitatif dianggap relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena pendekatan penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik. Penelitian menggunakan perspektif teori Van Meter Van Horn yang mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, diantaranya: 1.Standar dan sasaran kebijakan/ ukuran dan tujuan kebijakan, 2.Sumber daya, 3.Karakteristik organisasi pelaksana, 4.Sikap para pelaksana, 5.Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, 6.Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum enam variabel tersebut telah dilaksanakan oleh implementator meskipun belum cukup sempurna. Artinya belum semua variabel yang dipenuhi oleh implementator, kegagalan mencapai hasil karena tidak jelas dan tidak tegas dalam menentukan kelompok sasaran dan alokasi kebutuhan LPG 3Kg, dukungan finansial dan infrastruktur (jalan, SPPBE)yang belum memadai, penyebaran pangkalan LPG 3 Kg tidak proporsional, SOP yang dilakukan oleh Pemda tidak berjalan semestinya, pemahaman aparatur cukup memadai namun menjadi bias karena tidak ada keputusan yang jelas dan tegas, sikap para agen dan pangkalan LPG 3 Kg dipengaruhi oleh intensitas dan kualitas kontrol oleh semua *stakeholders*, selain itu disparitas harga dan angka inflasi yang cukup tinggi, *portability product,* service penjualan yang belum memadai berkontribusi dalam kegagalan implementasi kebijakan subsidi tersebut.Adapun beberapa saran atas permasalahan di atas adalah sebagai berikut: pemda memiliki acuan yang jelas dan tegas (kelompok sasaran dan alokasi kebutuhan LPG 3Kg), meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung, meningkatkan kualitas/ kuantitas pengawasan serta menerapkan sistem *reward and punishment,* perlunya himbauan kepala daerah yang mendukung kebijakan guna membentuk opini publik, menjaga kondusifitas sosial, ekonomi dan politik.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, LPG 3Kg, Subsidi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF LPG 3 KG SUBSIDY POLICY IN SUBDISTRICT TANJUNG SELOR REGENCY OF BULUNGAN

Siti Rahmatul Azizah
azizahsitirahmatul@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

This study is conducted based on the scarcity of LPG 3 Kg within society and its price which is well beyond the ceiling price (*HET*) set by the local government. The purpose of this research are to understand the implementation of the LPG 3 Kg subsidy policy in Subdistrict Tanjung Selor Regency of Bulungan, what factors inhibit the implementation of the LPG 3 Kg Subsidy policy in Subdistrict Tanjung Selor Regency of Bulungan, and the solution to those inhibitions. The method used in this study is qualitative with a descriptive reaserch. In this research, data is collected through observation, interview, and documentation study. The study's location is Subdistrict Tanjung Selor Regency of Bulungan. Selection of informants in the study is purposive and utilizes snowball sampling. The result of the study shows that, generally, the implementation of the LPG 3 Kg subsidy policy in Subdistrict Tanjung Selor has not been well carried out. Failures of the policy implementation are caused by: vagueness and lack of sternness in deciding target group and allocation, financial aid and limited infrastructure (roads, SPPBE), disproportionate spread of LPG 3 Kg station, local government's Standart Operaational Procedure (SOP) is not executed as it should be, bias of aparatur due to lack of a clear and firm decision despite their adequate comprehension, attitude of agents is affected by the intensity and quality control of all stakeholders, price disparity and inflation, product portability, and inadequate sales service all contribute to the failure of the subsidy policy. A number of suggestion for the aforementioned problem is as follows: a clear and firm reference for local government (target group and allocation), improve the quality of supporting infrastructure, improve quality/ quantity of supervision and implementing reward and punishment, appeal for policy support to shape public opinion, and preserve a conducive social, economical, and political state.

Keywords: Implementation, Policy, LPG 3 Kg, Subsidy

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43214

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul ***"Implementasi Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan"*** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Tanjung Selor, Mei 2017

Yang Menyatakan

SITI RAHMATUL AZIZAH
NIM. 500894791

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM	:	Implementasi Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
Penyusun TAPM	:	Siti Rahmatul Azizah
NIM	:	500894791
Program Studi	:	Magister Administrasi Publik
Hari, Tanggal	:	

Menyetujui :

Pembimbing II,	Pembimbing I,
Dr. Ir. Nurhasanah, M. Si	**Dr. Entang Adhy Muhtar, MS**
NIP. 19631111 198803 2 002	NIP. 19580504 198601 1 001

Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik Program Magister Administrasi Publik	Direktur Program Pascasarjana,
Dr. Darmanto, M. Ed	**Dr. Liestyodono Bawono, M. Si**
NIP. 19591027 198603 1 003	NIP. 19581215 198601 1 009

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama	:	Siti Rahmatul Azizah
NIM	:	500894791
Program Studi	:	Magister Administrasi Publik
Judul TAPM	:	Implementasi Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/ Tanggal	:	Sabtu / 22 Juli 2017
W a k t u	:	

dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM :

Ketua Komisi Penguji : Tandatangan

Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Penguji Ahli :

Prof. Dr. A. Aziz Sanapiah, M.P.A
NIP. 19470120 197306 1 001

Pembimbing I :

Dr. H. Entang Adhy Muhtar,M.Si
NIP. 19580504 198601 1 001

Pembimbing II :

Dr. Ir. Nurhasanah,M.Si
NIP. 19631111 198803 2 002

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Illahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul: **Implementasi Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.**

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini diajukan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Strata 2 di Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik dengan bidang minat Administrasi Publik di Universitas Terbuka. TAPM ini dapat diselesaikan atas bantuan dan dukungan dari semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang tehormat:

1. Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka, sebagai Penyelenggara Program Pasca Sarjana
2. DR. Entang Adhy Muhtar, MS, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan ide, saran dan kritiknya.
3. DR. Ir. Nurhasanah, M. Si, selaku Dosen Pembimbing II yang juga banyak memberikan kemudahan dan bimbingan selama penulisan.
4. Seluruh dosen dan staf administrasi pada Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka yang banyak membantu dalam kesuksesan menempuh pendidikan di Universitas Terbuka.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dan OPD beserta seluruh pegawai yang telah banyak membantu demi kelancaran dalam menempuh pendidikan di Universitas Terbuka.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

6. Semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini: Sales Representative (SR) PT. Pertamina (Persero), Tim Pengawasan dan Pengendalian BBM dan LPG 3 Kg, Para Agen LPG 3 Kg, Pangkalan LPG 3Kg, dan terutama Kelompok Sasaran Kebijakan (Rumah Tangga Miskin).
7. Rekan-rekan seperjuangan yang banyak memberikan dukungan moril dan masukan yang sifatnya membangun.
8. Mama tersayang yang tiada henti-hentinya memanjatkan do'a dan pengharapan.
9. Suami dan anak-anak tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan doa restu selama mengikuti pendidikan S2 di Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.

Diiringi dengan doa, semoga jerih payah, pengorbanan dan kebaikannya mendapat balasan dari Allah, SWT. Amin.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap masukan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penulisan TAPM ini dan semoga TAPM ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tanjung Selor, Juli 2017

Penulis,

Siti Rahmatul Azizah

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43214

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Abstract	iii
Lembar Persetujuan	v
Lembar Pengesahan	vi
Kata Pengantar	vii
Riwayat Hidup	x
Daftar Isi	xi
Daftar Bagan	xiv
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teori	11
1. Konsep Kebijakan Publik	11
a. Pengertian Kebijakan Publik	11
b. Tahapan Kebijakan Publik	13
2. Konsep Implementasi Kebijakan	16
B. Program Subsidi LPG 3 Kg	32
1. Pengertian Subsidi	32
2. Dasar Hukum Subsidi LPG 3 Kg	34
3. Tujuan Subsidi LPG 3 Kg	34
4. Kelompok Sasaran Subsidi LPG 3 Kg	35

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43214

C. Penelitian Terdahulu 36
D. Kerangka Berfikir 38
E. Operasionalisasi Konsep 43

BAB III METODE PENELITIAN 46
A. Desain Penelitian 46
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan 47
C. Instrumen Penelitian 48
D. Prosedur Pengumpulan Data 49
E. Metode Analisis Data 52

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 55
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 55
B. Implementasi Kebijakan Subsidi LPG 3 kg 62
C. Permasalahan yang dihadapi dalam Implementasi 66
1. Standard dan Sasaran Kebijakan 66
2. Sumber Daya 79
3. Karakteristik Organisasi Pelaksana 87
4. Komunikasi antar Organisasi Terkait 92
5. Sikap para Pelaksana 95
6.Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik 97

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 103
A. Simpulan 103
B. Saran 106
1. Saran Praktis 106
2. Saran Teoritis 108

DAFTAR PUSTAKA 109

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43214

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minyak bumi merupakan sumber utama energi di dunia dan termasuk Indonesia. Sampai saat ini, Indonesia masih menghadapi persoalan dalam mencapai target pembangunan bidang energi. Ketergantungan terhadap energi fosil terutama minyak bumi dalam pemenuhan konsumsi di dalam negeri masih tinggi yaitu sebesar 96% dari total konsumsi (minyak bumi 48%, gas 18% dan batubara 30%). Konsumsi yang tinggi terhadap energi fosil tersebut sangat tinggi diakibatkan oleh subsidi sehingga harga energi menjadi murah dan masyarakat cenderung boros dalam menggunakan energi. Di sisi lain, Indonesia menghadapi penurunan cadangan energi fosil yang terus terjadi dan belum dapat diimbangi dengan penemuan cadangan baru. Sedangkan keterbatasan infrastruktur energi yang tersedia juga membatasi akses masyarakat terhadap energi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), energi fosil masih menjadi energi dominan yang diproduksi di Indonesia. Dari total 2.824,5 Mboe produksi energi pada tahun 2012, peran energi fosil mencapai 85%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan porsi energi fosil pada periode sebelumnya yakni sebesar 86% dari total produksi energi, sisanya adalah produksi yang berasal energi terbarukan.

Konversi minyak tanah ke LPG 3 kg merupakan program nasional yang telah dilaksanakan secara bertahap dengan target:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43214

1. berkurangnya konsumsi minyak tanah dari 9,9 juta kilo liter menjadi 0,9 juta kilo liter;
2. terdistribusinya paket perdana (tabung gas 3 kg, kompor, dan regulator) sebanyak 57 juta paket perdana;
3. jangka waktu pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG dari tahun 2007 hingga tahun 2015.

Latar belakang diambilnya kebijakan tersebut ditengarai oleh postur APBN yang didominasi subsidi BBM, dengan minyak tanah menempati peringkat pertama disusul premium dan solar. Setiap tahun sejak tahun 2004 hingga 2006, pemerintah menganggarkan subsidi BBM rata-rata sebesar Rp. 70 Triliun, 50% dari angka subsidi tersebut untuk mensubsidi minyak tanah yang notabene biaya produksinya setara dengan bahan bakar pesawat Avtur.

Selain berlatar belakang efisiensi anggaran pemerintah, kebijakan konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional yang bertujuan:

a. mengarahkan upaya-upaya dalam mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negeri;
b. mengurangi ketergantungan penggunaan energi yang berasal dari minyak bumi, salah satunya dengan mengalihkan ke energi lainnya;
c. terwujudnya energi (primer) mix yang optimal pada tahun 2025, yaitu peranan minyak bumi menjadi kurang dari 20% dan peranan gas bumi menjadi lebih dari 30% terhadap konsumsi energi nasional.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43214

Menurut data Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Kementerian ESDM, realisasi konsumsi LPG 3 kg dari Tahun 2007 - 2015 mengalami kenaikan, dari volume 21,476 Mton di Tahun 2007 hingga 5,567,308 Mton di Tahun 2015.

Kenaikan volume LPG 3 kg tersebut, didasari beberapa faktor berikut ini:

1. Paket perdana konversi minyak tanah ke LPG sekitar 1,12 juta paket dengan asumsi pemakaian 3 tabung per bulan pada tahun 2015.
2. Pertumbuhan usaha mikro 2,3%.
3. Pertumbuhan ekonomi 6,6%.
4. Pertumbuhan penduduk 1,49%.
5. Paket konversi untuk nelayan sebanyak 50.000 paket.

Penghematan dari program konversi tersebut (dari tahun 2009 sampai 2015) sebesar 189.8 triliun.

Sementara itu, menurut *Vice President Cooperate Communication* PT. Pertamina (Persero) Wianda Pusponegoro, program konversi minyak tanah ke LPG mampu menghemat subsidi minyak tanah sebesar Rp 197,05 triliun dalam kurun waktu 2007- 2015.

Namun dibalik klaim pemerintah yang mampu menghemat anggaran negara dari konversi minyak tanah ke LPG 3 kg, masih terdapat kelemahan dari sisi profil konsumen atau kelompok sasaran kebijakan tersebut. Menurut Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009, Pasal 18 ayat 1:

"Pendistribusian LPG tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG kepada Pengguna LPG tertentu untuk rumah tangga dan usaha mikro yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri".

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43214

Adapun kriteria kelompok sasaran rumah tangga dan usaha mikro sebagai berikut:

1. Rumah tangga yang mempunyai pengeluaran < 1,5 juta/ bulan.
2. Usaha mikro yakni usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Kompleksitas dan kerumitan dalam memvalidasi konsumen pengguna LPG 3 kg membuat celah permainan bagi para oknum. Sementara itu, menurut Pelaksana tugas Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan, Pemerintah menemukan ada inefisiensi yaitu banyak masyarakat yang menggunakan LPG 3 kg, bukanlah mereka yang tergolong miskin. Angka subsidi LPG yang tahun ini diterapkan sebesar Rp 28 triliun, jika dihitung berdasarkan jumlah masyarakat miskin, seharusnya dapat ditekan menjadi Rp 15-16 triliun.

Anggapan telah terjadi salah sasaran penerima subsidi LPG 3 kg juga ditengarai oleh pengamat energi Sofyano Zakaria yang menurutnya ada ketidakjelasan Peraturan Menteri ESDM No. 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG 3 kg mengakibatkan preferensi pengguna tabung gas 12 kg berpindah ke tabung LPG 3 kg. Sofyano menilai Permen tersebut tidak tegas menyatakan siapa yang berhak menggunakan LPG 3 kg dan hanya dibolehkan untuk kegiatan apa. Apalagi ketika ada petinggi di negeri ini yang mengeluarkan pernyataan terbuka ke publik bahwa orang tidak mampu bisa mengkonsumsi LPG bersubsidi, maka terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43214

peluang orang mampu sekalipun mengkonsumsi LPG 3 kg. Di sisi lain menurutnya, kebutuhan LPG khususnya LPG subsidi tabung 3 kg dari waktu ke waktu terus menunjukkan peningkatan. Kuota LPG 3 kg dan kebutuhan LPG 3 kg sejak diberlakukannya konversi minyak tanah ke LPG 3 kg, tidak mencerminkan konsumsi yang sebenarnya.

Kabupaten Bulungan dengan Ibukota Tanjung Selor, memiliki 10 wilayah kecamatan sebagai berikut: Peso, Peso Hilir, Tanjung Palas, Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur, Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah, Sekatak, dan Bunyu. Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bulungan berjumlah 81, dengan jumlah penduduk sebanyak 130.520 jiwa dan 33.439 kepala keluarga (tahun 2015).

Kebijakan subsidi LPG 3 kg di Kabupaten Bulungan hanya mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No.26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG 3 kg. Aturan yang tertuang dalam Permen tersebut juga memuat beberapa pedoman dan tata cara, sebagai berikut:

1. Pedoman dan tata cara penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu melalui penunjukkan langsung;
2. Pedoman dan tata cara penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu melalui lelang;
3. Pedoman dan tata cara penyelenggaraan sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu;

Kabupaten Bulungan dalam mengacu pada Peraturan Menteri tersebut, melakukan beberapa kewenangan dalam hal menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk wilayah Kabupaten dan Kecamatan, melakukan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43214

pengawasan dan evaluasi terhadap pendistribusian LPG. Dalam mengambil keputusan- keputusan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan melakukannya dalam Rapat Tim. Tim pengawasan dan pengendalian BBM yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan yang terdiri dari beberapa instansi lintas sektoral seperti: Disperindagkop dan UMKM, Distamben, Dishubkominfo, Satpol PP, Bagian Perekonomian, Bagian Hukum, Kepolisian, dan DPRD.

Implementasi kebijakan konversi minyak tanah ke LPG 3 kg di Kabupaten Bulungan berjalan dalam kurun waktu 4 tahun (2011-2014). Target 24.193 paket LPG 3 kg (tabung LPG 3 kg, kompor, dan regulator) terpenuhi dengan 3 (tiga) klasifikasi kelompok sasaran. Adapun kelompok sasaran konsumen LPG 3 kg di Kabupaten Bulungan hasil pencacahan Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia adalah:

1. 23.208 rumah tangga;
2. 319 penduduk musiman;
3. 666 usaha mikro

Di awal tahun program tersebut, banyak masyarakat yang enggan untuk beralih dari minyak tanah ke LPG 3 kg dengan alasan keamanan, takut meledak, susah menggunakannya, masih memilih menggunakan kayu bakar, dan ditambah belum sepenuhnya subsidi minyak tanah di Kabupaten Bulungan dihapus. Namun setelah subsidi minyak tanah dicabut untuk wilayah Kabupaten Bulungan yaitu di akhir tahun 2014 sesuai dengan *phase of switching area* yang ditetapkan pemerintah, permasalahan yang kerap muncul dan menjadi keluhan yang sering diutarakan masyarakat kepada

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43214

Pemerintah Daerah adalah *'supply'* yang tidak sebanding dengan *'demand'* sehingga terjadi kelangkaan LPG 3 kg di masyarakat.

Kinerja dari para agen dalam pendistribusian tidak memenuhi target dari alokasi yang telah ditetapkan menjadi permasalahan dalam pelayanan publik bagi masyarakat karena kebutuhan energi untuk kelompok sasaran tidak terpenuhi. Ditambah lagi kelangkaan ini dijadikan modus bagi para oknum pemburu *rente* untuk menjual LPG 3 kg jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Beberapa hal yang berkontribusi dalam kelangkaan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Penetapan alokasi/ *quota* LPG 3 kg sudah tidak sesuai dengan kebutuhan real yang ada di masyarakat. Bertambahnya jumlah penduduk, peningkatan jumlah usaha mikro dan berkembangnya perekonomian menjadi penyebab bertambahnya kebutuhan LPG 3 kg bagi masyarakat. Penetapan kelompok sasaran penerima subsidi tidak secara tegas, sulit untuk divalidasi keabsahannya, menjadi celah tidak tepat sasaran penerima subsidi LPG 3 kg. Selain itu, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam implementasinya sering tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah diputuskan.
2. Belum tersedianya infrastruktur Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)/ Stasiun Pengangkutan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) di Kabupaten Bulungan dan infrastruktur jalan yang belum memadai, menjadi kendala dalam pendistribusian LPG ke Kabupaten Bulungan. Kondisi ini sangat mempengaruhi kinerja agen LPG 3 kg dalam menyerap alokasi yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

diberikan dari PT. Pertamina (Persero) ke masing- masing agen dan pendistribusian dari agen LPG 3 kg ke masing- masing pangkalan tidak berjalan lancar;

3. Jumlah personil yang terbatas dan luas wilayah yang luas dan sulit terjangkau, menjadi faktor penghambat dalam melakukan pendistirbusian dan pengawasan LPG 3 kg. Selain itu, keterbatasan finansial juga menjadi penghambat dalam kinerja tim dalam melakukan monitoring dan evaluasi;
4. Banyaknya aktor implementasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik dengan latar belakang orientasi organisasi yang berbeda, menjadikan keberhasilan implentasi kebijakan sulit diraih. Sebagai contoh, Pertamina (Persero) yang bermitra dengan agen LPG swasta. Motif perusahaan swasta (agen LPG 3 kg) yang berorientasi profit bertolak belakang dengan motif organisasi pemerintahan yang berorientasi sosial/ pelayanan publik sehingga kerap terjadi perbedaan sudut pandang dalam melihat suatu hal/peristiwa, misal saat terjadi kenaikan harga BBM, para agen LPG 3 kg tidak bersedia mengambil alokasi yang telah diberikan hingga harga penyesuaian LPG 3 kg ditetapkan. Hal ini berdampak pada pelayanan publik, ketersediaan kebutuhan pokok (LPG 3 kg) tidak dapat tercukupi sebagaimana mestinya.
5. Rantai komunikasi antar organisasi yang panjang terkait implementasi kebijakan subsidi, menjadi kendala tersendiri. Informasi yang kurang lengkap, bias, tidak konsisten dan melewati proses yang cukup panjang menjadikan implementasi kebijakan publik mengalami hambatan. Contoh pada proses penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

membutuhkan informasi dari bebagai *stakeholder* pemangku kebijakan dan lembaga pelaksana. Terkadang informasi yang diperoleh tidak akurat, misal standar biaya pendistribusian yang berbeda-beda, moda transportasi yang tidak mempunyai standar yang jelas, interpretasi komunikator/ lembaga pelaksana yang tidak akurat dan konsisten dalam menyampaikan aturan main dalam implementasi kebijakan.

6. Pemahaman, interpretasi dan pengetahuan yang berbeda-beda tentang aturan main kebijakan oleh para implementator kebijakan menjadikan sikap dan perilaku implementator berbeda dalam menyikapi dan bertindak terkait implementasi kebijakan.
7. Disparitas harga LPG 3 kg dengan LPG 12 kg yang signifikan menjadi pemicu berubahnya preferensi konsumen LPG non subsidi menjadi konsumen LPG 3 kg yang bersubsidi. Hal ini menyebabkan implementasi kebijakan LPG 3 kg tidak tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Subsidi LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 3 kg di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada latar belakang, maka permasalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan subsidi LPG 3 kg di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan?

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43214

2. Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan subsidi LPG 3 kg di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk::

1. Menganalisis implementasi kebijakan subsidi LPG 3 kg di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.
2. Menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan subsidi LPG 3 kg di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Kegunaan teoritis, yakni dapat menambah khasanah kajian ilmiah dan wawasan dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya Ilmu Kebijakan Publik.
2. Kegunaan praktis, yakni dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, Lembaga Penyalur, Kepolisian, DPRD, dan juga masyarakat dalam melakukan implementasi kebijakan publik, khususnya kebijakan subsidi LPG 3 kg.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

James Anderson dalam Solihin Abdul Wahab (2012: 8), menyatakan bahwa kebijakan itu ialah suatu *"purposive course of action or inaction undertaken by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern"* (langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang actor atau sejumlah actor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi).

Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan (2003: 19), mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Budi Winarno (2008: 16) menyebutkan secara umum istilah "kebijakan" atau "*policy*" digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik, oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Versi formal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mendefinisikan kebijakan adalah sebagai berikut: "Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam makna seperti ini dapat berupa deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana" (Solihin Abdul Wahab, 2012: 9)

Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat ditarik suatu benang merah bahwasannya kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Bila dikaitkan dengan Kebijakan Subsidi LPG 3 kg adalah suatu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk memberikan alokasi anggaran

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

yang disalurkan melalui perusahaan/ lembaga (PT. Pertamina melalui mitra Agen dan Pangkalan LPG 3 kg) yang memproduksi, mendistribusikan dan menjual barang, untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat kelompok sasaran.

b. Tahapan Kebijakan Publik

Pentahapan pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn:

1) Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik perlu diperhitungkan. Jika sebuah isu telah menjadi masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). *Policy issues* biasanya muncul mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah kebijakan.

Ada beberapa kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury, 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) diantaranya:

a) telah mencapai titik kritis tertentu jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius;
b) telah mencapai tingkat partikularitas tertentu;
c) berdampak dramatis;
d) menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa;
e) menjangkau dampak yang amat luas;
f) mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat;
g) menyangkut suatu persoalan yang *fasionable* (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya)

2) **Formulasi Kebijakan**

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3) **Adopsi/ Legitimasi Kebijakan**

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi-cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Dimana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4) **Penilaian/ Evaluasi Kebijakan**

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008: 146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Adapun implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu sebagai berikut: 1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan, 2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan 3) adanya hasil kegiatan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa:

"Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian".

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1) Teori George C. Edward

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan yang mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran *(target group)*, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

d) Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure (SOP)* dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 203) terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures (SOP)* dan Fragmentasi:

"SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah".

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

2) Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group,* dan sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan:

a) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
b) Derajat perubahan yang diinginkan.
c) Kedudukan pembuat kebijakan.
d) (Siapa) pelaksana program.
e) Sumber daya yang dihasilkan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Sementara, konteks implementasinya adalah:

a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.

b) Karakteristik lembaga dan penguasa.

c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

3) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/ undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

4) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan "*A Model of the Policy Implementation*" (dalam Agustino, 2008: 144). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejewantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ ukuran dan tujuan kebijakan.
2. Sumber daya.
3. Karakteristik organisasi pelaksana.
4. Sikap para pelaksana.
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan dalam 6 (enam) poin sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis),

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2008:146). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998: 138) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal *(frustated)* ketika para pelaksana *(officials)*, tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana *(implementors)*. Arah disposisi para pelaksana *(implementors)* terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang *"crucial"*. Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, dalam Agustino, 2008: 149).

2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa:

"New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program".

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa:

"Sumber daya kebijakan *(policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan."*

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan displin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Menurut Edward III, 2 (buah) karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP/ *Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi.

1. *Standard Operating Procedures* (SOP).

   SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu, yang mungkin mengambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi (Edward III, 1980).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

2. Fragmentasi

Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. *"fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units."* (Edward III, 1980).

Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil (Edward III, 1980).

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

individu *(implementors)*. Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam *(consistency and uniformity)* dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks.

Proses pentransferan berita ke bawah didalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami ganguan *(distortion)* baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interprestasi yang tidak sama *(inconsistent)* terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interprestasi yang penuh dengan pertentangan *(conflicting)*, maka pada suatu saat pelaksana

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten *(accuracy and consistency)* (Van Mater dan Varn Horn,1974).

Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006):

"sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat 'top down' yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pendangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan *(befiltered)* lebih dahulu melalui persepsi dari para pelaksana *(implementors)* dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan.

Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari ***pertama***, pengetahuan *(cognition)*, pemahaman dan pendalaman *(comprehension and understanding)* terhadap kebijakan, ***kedua***, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak *(acceptance, neutrality, and rejection)*, dan ***ketiga***, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal *(frustated)* ketika para pelaksana *(officials)*, tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana *(implementors)* terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana *(implementors)* terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang *"crucial"*. *Implementors* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Mater dan Van Horn, 1974). Pada akhirnya, intesitas disposisi para pelaksana *(implementors)* dapat mempengaruhi pelaksana *(performance)* kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Secara skematis, model implementasi kebijakan publik Van Meter danVan Horn dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

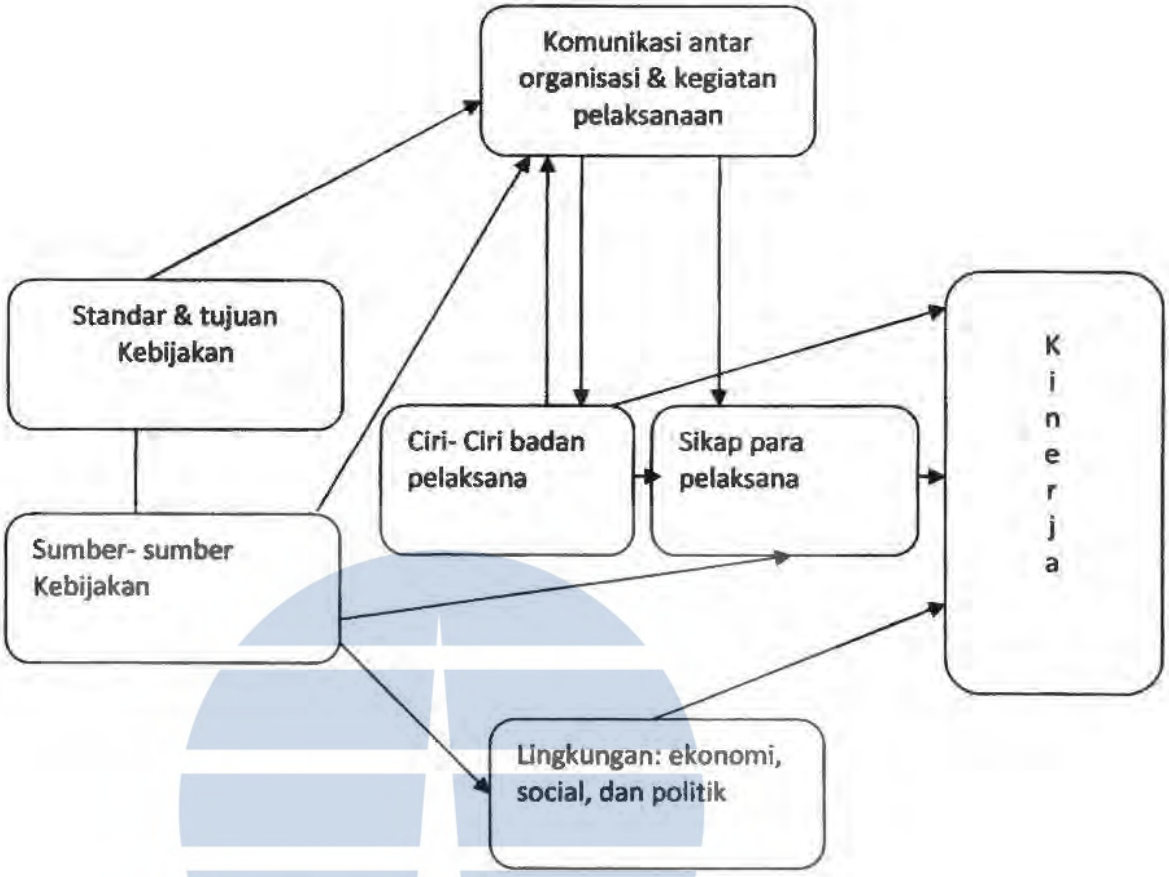

Gambar 2.1. Model Proses Implementasi Kebijakan
Sumber: (Agostino, 2008: 144)

Penelitian ini menggunakan teori dari Donald S. Van Meter dan Van Horn yang menyebutkan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan (standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik). Penggunaan beberapa teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Implementasi Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan secara lebih mendalam.

B. Program Subsidi LPG 3 Kg

1. Pengertian Subsidi

Arti kata 'subsidi' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah). Menurut Milton H. Spencer dan Orley M. Amos, Jr. dalam bukunya *"Contemporary Economics"* edisi ke-8 halaman 464 sebagaimana dikutip oleh Rudi Handoko dan dan Pandu Patriadi menulis bahwa subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah untuk mengurangi harga atau menambah keluaran (*output*).

Selanjutnya, menurut Suparmoko, subsidi (*transfer*) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu subsidi dalam bentuk uang (*cash transfer*) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi innatura (*in kind subsidy*).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Pengertian tentang subsidi ini dapat pula ditemukan dalam tulisan Erwan dalam blognya (Erwan, 2010) yang menjelaskan lebih jauh bahwa subsidi adalah suatu pemberian (kontribusi) dalam bentuk uang atau finansial yang diberikan oleh pemerintah atau suatu badan umum (*public body*). Kontribusi pemerintah tersebut dapat berupa antara lain:

a. penyerahan dana secara langsung seperti hibah, pinjaman, dan penyertaan, pemindahan dana atau jaminan langsung atas hutang;
b. hilangnya pendapatan pemerintah atau pembebasan fiskal (seperti keringanan pajak); penyediaan barang atau jasa diluar prasarana umum atau pembelian barang;
c. pemerintah melakukan pembayaran pada mekanisme pendanaan atau memberikan otorisasi kepada suatu badan swasta untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam hal penyediaan dana;
d. disamping hal tersebut, semua bentuk *income* dan *price support* juga merupakan subsidi apabila bantuan tersebut menimbulkan suatu keuntungan.

Adapun menurut Nota Keuangan dan RAPBN 2014, 'subsidi' merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/ lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Dengan demikian, subsidi merupakan upaya pemerintah melalui penyaluran anggaran kepada produsen barang dan jasa dalam rangka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pelayanan publik sehingga masyarakat dapat memenuhi hajat hidupnya dengan harga beli yang lebih terjangkau atas barang dan jasa publik yang disubsidi tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa subsidi adalah bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada produsen dan konsumen suatu bisnis atau sektor ekonomi atas barang/ jasa tertentu.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwasannya Subsidi LPG 3 kg merupakan upaya pemerintah melalui penyaluran anggaran kepada produsen (PT. Pertamina Persero) yang memproduksi barang dalam hal ini LPG 3 kg, dalam rangka pelayanan publik sehingga masyarakat miskin dapat memenuhi hajat hidupnya dengan harga beli LPG 3 kg yang lebih terjangkau.

2. Dasar Hukum Subsidi LPG 3 kg

Dasar hukum yang menjadi acuan ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan dimaksud adalah:

1). UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

2). Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;

3). Perpres No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg;

4). Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

3. Tujuan Subsidi LPG 3 kg

Tujuan Subsidi LPG 3 Kg tidak bisa dilepaskan dari awal tujuan konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg, yaitu:

1). melakukan diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM;

2). melakukan efisiensi anggaran pemerintah;

3). mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi;

4). menyediakan bahan bakar yang praktis, bersih dan efisien.

4. Kelompok Sasaran Subsidi LPG 3 Kg

Sesuai dengan Perpres No 104/ 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, maka penerima paket perdana LPG 3 Kg adalah:

a. Rumah Tangga

Rumah tangga yang berhak menerima paket LPG 3 Kilogram beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

1. Rumah Tangga
2. Pengguna minyak tanah murni
3. Penduduk legal setempat yang dibuktikan dengan melampirkan fotocopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan dari kelurahan setempat.

b. Usaha Mikro

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Usaha mikro yang berhak menerima paket LPG 3 Kilogram beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

1. Usaha mikro tersebut merupakan pengguna minyak tanah untuk bahan bakar memasak dalam usahanya.
2. Penduduk legal setempat yang dibuktikan dengan melampirkan *fotocopy* KTP dan Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan dari Lurah setempat.
3. Melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat.

C. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG (*Liquified Petroleum Gas*) di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin" oleh Ellisa Vikalista (2012). Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Konversi minyak tanah ke LPG 3 kg di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sudah berjalan cukup baik.

   Keberhasilan terletak pada komunikasi atau sosialisasi yang sudah berjalan jauh sebelum program bergulir di Kota Banjarmasin berupa informasi dari Pulau Jawa yang telah terlebih dahulu melaksanakan program konversi. Kendala terletak pada berita-berita negatif yang masih tersimpan di benak warga berupa peristiwa ledakan tabung gas beberapa waktu lalu di Pulau Jawa

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

serta para konsultan yang ditunjuk langsung dari Pusat dengan hanya sedikit melibatkan orang daerah, sehingga pada akhirnya mereka kurang maksimal ketika harus terjun ke tengah masyarakat karena kurang mengenal medan serta kultur masyarakat sekitar.

Penelitian Ellisa Vikalista menjadi relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti karena tujuan dari penelitian ini sama, yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi sebuah kebijakan subsidi LPG 3 kg. Hanya saja yang menjadi poin pembedanya adalah objek penelitiannya dimana Ellisa Vikalista meneliti implementasi kebijakan pada tahapan konversi minyak tanah ke LPG 3 kg berlangsung, sementara peneliti akan meneliti pada tahapan setelah konversi minyak tanah ke LPG 3 kg (Implementasi Subsidi LPG 3 kg).

2. Penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Permasalahannya di Kabupaten Melawi" oleh Ahiwan (2011). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta permasalahan yang dihadapi dalam implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Melawi.

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Melawi belum berjalan secara optimal. Hal tersebut diindikasikan dengan lemahnya sosialisasi program mulai dari proses pendataan hingga mekanisme pengaduan. Secara umum, koordinasi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dan komunikasi pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dinilai lemah, indikasinya antara lain:

a. Dokumen dari pusat tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) terlambat atau bahkan tidak diterima Kabupaten Melawi;
b. Pendataan Rumah Tangga Miskin tidak melibatkan pihak kabupaten, kecamatan, maupun desa.

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pengucuran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Melawi meliputi: (1) Proses pencacahan atau pendataan Rumah Tangga Miskin; (2) Proses penetapan direktori Rumah Tangga Miskin; (3) Proses penyaluran dana; (4) Proses sosialisasi; dan (5) Proses penanganan pengaduan.

Penelitian ini menjadi relevan untuk dijadikan rujukan/ referensi bagi peneliti disebabkan tujuan dari penelitian ini hampir sama, yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan yang bersifat *top down* dan apa saja permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut.

D. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dengan adanya kebijakan subsidi LPG 3 Kg dengan dasar hukum Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG 3 Kg. Kebijakan tersebut bertujuan untuk melakukan diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM, melakukan efisiensi anggaran pemerintah, mengurangi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi, dan menyediakan bahan bakar yang praktis, bersih dan efisien.

Namun dalam pelaksanaannya banyak terdapat hambatan dari beberapa aspek yang saling berkaitan sehingga berpengaruh pada kinerja implementasi kebijakan subsidi Lpg 3 Kg. Indikasinya dapat dirasakan oleh masyarakat dengan seringnya terjadi kelangkaan LPG 3 Kg dan harga LPG 3 Kg yang jauh di atas Harga Eceren Tertinggi (HET).

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan subsidi LPG 3 Kg di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Dengan alasan tersebut, peneliti memutuskan untuk menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik dengan model Van Meter dan Van Horn. Model tersebut menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Standard dan sasaran kebijakan, adalah ukuran, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sebuah kebijakan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, standard dan sasaran kebijakan akan diteliti lebih lanjut dari aspek: alokasi/ kuota LPG 3 Kg, realisasi pendistribusian LPG 3 Kg, Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg, dan kelompok sasaran penerima manfaat subsidi LPG 3 Kg
2. Sumber daya, adalah kemampuan yang dimiliki untuk melaksanakan kebijakan atau program untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja yang baik. Dalam penelitian ini yang akan diteliti lebih lanjut adalah aspek: Sumber Daya Manusia (implementator kebijakan dalam hal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kompetensi dan jumlah), dukungan financial dalam kebijakan subsidi LPG 3 Kg, ketersediaan infrastuktur sarana dan prasarana guna menunjang pendistribusian LPG 3 Kg;

3. Karakteristik organisasi pelaksana, karakteristik organisasi pelaksana tidak lepas dari struktur birokrasi yang dapat diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma- norma dan pola- pola hubungan yang terjadi berulang-ulang. Aspek yang akan diteliti lebih lanjut dari karakteristik organisasi adalah: Standard Operating Procedure (SOP) pendistribusian LPG 3 Kg, tingkat pengawasan hierarkis terhadap proses pendistribusian LPG 3Kg.
4. Sikap para pelaksana, adalah kecenderungan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan keputusan- keputusan kebijakan. Dalam kaitannya dalam penelitian ini, sikap para pelaksana akan diteliti lebih lanjut dari aspek: persepsi pelaksana terhadap kebijakan (pemahaman atas tujuan, target, dan sasaran kebijakan), arah respon pelaksana apakah menerima, netral, atau menolak, dan intensitas terhadap kebijakan.
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran- ukuran dan tujuan- tujuan dipahami oleh para implementator. Sehingga aspek komunikasi yang efektif sangat diperlukan, dalam penelitian ini, aspek yang akan diteliti lebih lanjut adalah: kejelasan, konsistensi, dan keseragaman atas standard dan tujuan kebijakan subsidi LPG 3 Kg yang dikomunikasikan oleh para implementator.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

6. Lingkungan social, ekonomi dan politik, merupakan lingkungan eksternal yang turut mendorong keberhasilan suatu kebijakan public. Lingkungan social, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, lingkungan social, ekonomi dan politik akan diteliti lebih lanjut dari aspek: perubahan harga BBM subsidi dan perubahan harga barang substitusi (LPG 12 kg) yang dapat memicu preferensi yang bukan kelompok sasaran kebijakan subsidi LPG 3 kg.

Dari evaluasi pelaksanaan kebijakan melalui beberapa variabel tersebut, dapat diketahui bagaimana implementasi kebijakan subsidi LPG 3 kg di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan subsidi LPG 3 Kg dan upaya apa saja untuk mengatasi hambatan tersebut. Berikut Kerangka Pikir Penelitian pada diagram 2.2:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

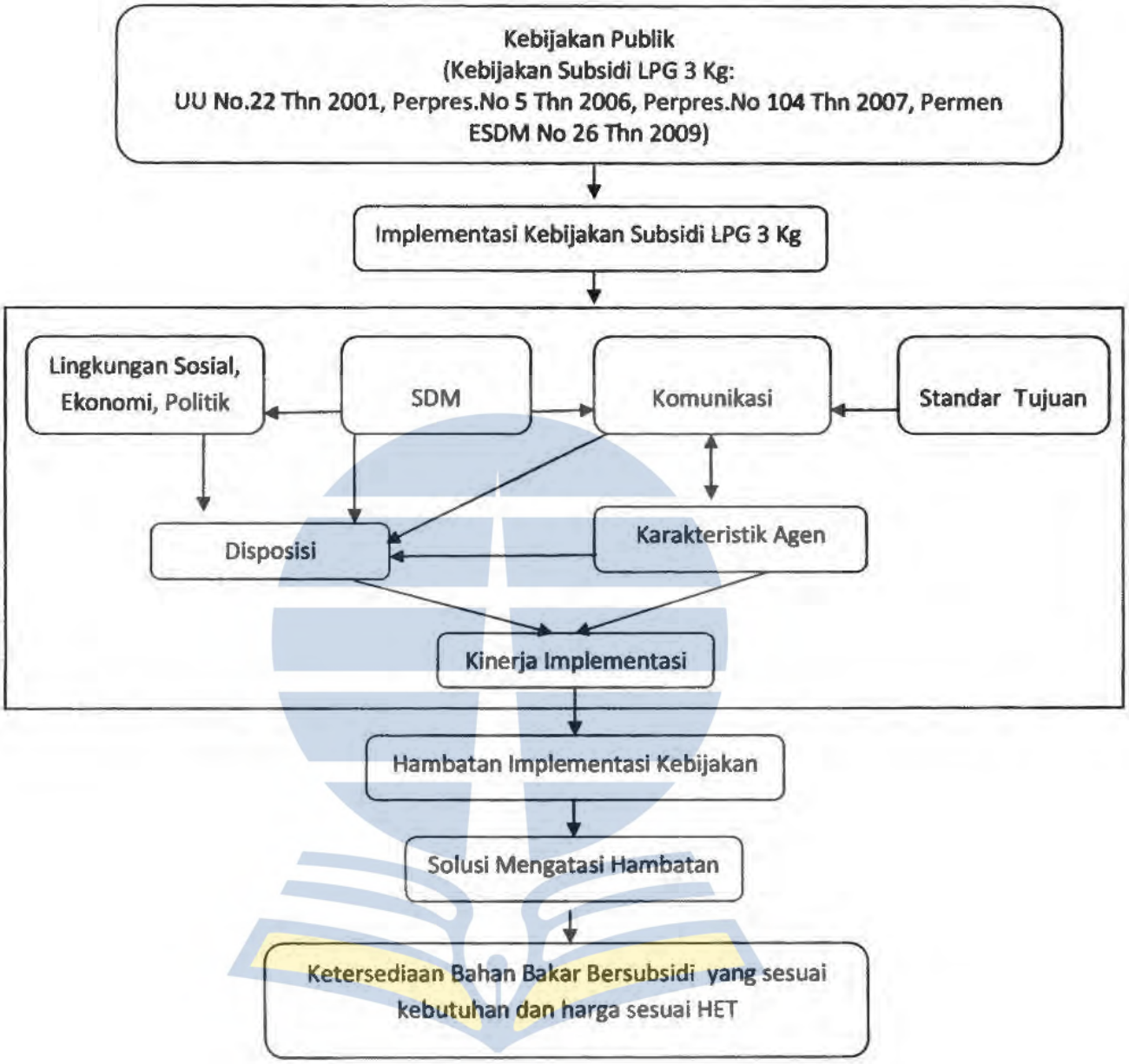

Diagram 2.2. Kerangka Berfikir Penelitian

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

E. Operasionalisasi Konsep

Implementasi Kebijakan Subsidi LPG 3 kg adalah bentuk pelaksanaan kebijakan pelayanan publik di bidang energi bagi masyarakat miskin dan usaha mikro dengan menyediakan bahan bakar yang terjangkau harga belinya, dimana pelaksanaan kebijakan ini mengacu pada permen ESDM no.26 Tahun 2009 dan beberapa hasil keputusan yang dilakkukan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan.

Faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan subsidi LPG 3 kg adalah faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, meliputi:

1. Standard dan sasaran kebijakan, adalah ukuran, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sebuah kebijakan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, standard dan sasaran kebijakan akan diteliti lebih lanjut dari aspek: alokasi/ kuota LPG 3 kg, realisasi pendistribusian LPG 3 kg, Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg, dan kelompok sasaran penerima manfaat subsidi LPG 3 kg
2. Sumber daya, adalah kemampuan yang dimiliki untuk melaksanakan kebijakan atau program untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja yang baik. Dalam penelitian ini yang akan diteliti lebih lanjut adalah aspek: Sumber Daya Manusia (implementator kebijakan dalam hal kompetensi dan jumlah), dukungan financial dalam kebijakan subsidi LPG 3 kg, ketersediaan infrastuktur sarana dan prasarana guna menunjang pendistribusian LPG 3 kg;
3. Karakteristik organisasi pelaksana, karakteristik organisasi pelaksana tidak lepas dari struktur birokrasi yang dapat diartikan sebagai karakteristik-

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

karakteristik, norma- norma dan pola- pola hubungan yang terjadi berulang-ulang. Aspek yang akan diteliti lebih lanjut dari karakteristik organisasi adalah: *Standard Operating Procedure (SOP)* pendistribusian LPG 3 kg, tingkat pengawasan hierarkis terhadap proses pendistribusian LPG 3 kg.

4. Sikap para pelaksana, adalah kecenderungan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan keputusan- keputusan kebijakan. Dalam kaitannya dalam penelitian ini, sikap para pelaksana akan diteliti lebih lanjut dari aspek: persepsi pelaksana terhadap kebijakan (pemahaman atas tujuan, target, dan sasaran kebijakan), arah respon pelaksana apakah menerima, netral, atau menolak, dan intensitas terhadap kebijakan.
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran- ukuran dan tujuan- tujuan dipahami oleh para implementator. Sehingga aspek komunikasi yang efektif sangat diperlukan, dalam penelitian ini, aspek yang akan diteliti lebih lanjut adalah: kejelasan, konsistensi, dan keseragaman atas standard dan tujuan kebijakan subsidi LPG 3 kg yang dikomunikasikan oleh para implementator.
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, merupakan lingkungan eksternal yang turut mendorong keberhasilan suatu kebijakan public. Lingkungan social, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, lingkungan social, ekonomi dan politik akan diteliti lebih lanjut dari aspek: perubahan harga BBM subsidi dan perubahan harga

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

barang substitusi (LPG 12 kg) yang dapat memicu preferensi yang bukan kelompok sasaran kebijakan subsidi LPG 3 kg.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan distribusi LPG 3 kg bersubsidi di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan melibatkan berbagai aspek yang harus digali lebih mendalam dan komprehensif.

Pendekatan penelitian kualitatif dianggap relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena pendekatan kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dengan cara desksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu kontek khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007: 6).

Penetapan lokasi penelitian di Kecamatan Tanjung Selor adalah dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tanjung Selor merupakan Ibu kota dari Kabupaten Bulungan dengan konsekuensi paling banyak jumlah penduduknya;
2. Tanjung Selor merupakan daerah yang ditetapkan sebagai "*Drop Point*" yaitu daerah titik serah LPG 3 kg yang akan didistribusikan ke kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Bulungan;
3. Tanjung Selor memiliki paling banyak jumlah pangkalan LPG 3 kg;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

4. Walaupun Tanjung Selor sebagai Ibu Kota Kabupaten, namun kerap kali mengalami kelangkaan LPG 3 kg di masyarakat.

Sementara itu, fokus penelitian diarahkan pada dua aspek, yaitu:

1. Implementasi kebijakan subsidi LPG 3 kg di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
2. Permasalahan dalam implementasi kebijakan subsidi LPG 3 kg di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive*. Menurut Sugiyono (2010: 292), pada tahap awal penelitian kualitatif dipilih orang yang memiliki *power* dan otoritas pada objek yang diteliti sehingga mampu "membukakan pintu" bagi peneliti dalam melakukan pengumpulan data.

Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah orang- orang yang terlibat dalam proses pendistribusian LPG 3 kg, baik dari pihak pemegang izin niaga LPG 3 kg (PT. Pertamina) dan mitra bisnisnya (Agen dan pangkalan LPG 3 kg), Pemerintah Daerah, Kelompok pengguna, baik dari kelompok sasaran kebijakan dan kelompok non sasaran kebijakan yang menggunakan LPG 3 kg. Berikut informan yang digunakan dalam penelitian:

1. Ahmad Ubaidillah M. (Sales Representatif LPG 3 kg Retail VI Kalimantan Timur);
2. Gerilyawansyah, Kepala Bidang Perdagangan, Disperindagkop & UMKM Kab. Bulungan dan Zaimah, Kasubbag. Sarana Perekonomian Bagian

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Perekonomian (perwakilan Tim Pengawasan dan Pengendalian BBM dan LPG 3 kg Kabupaten Bulungan);

3. PT. Makbul dan PT. Mitra Brilian Mandiri (Agen LPG 3 kg wilayah Kabupaten Bulungan);
4. Sutaningsih dan Edi Purnomo (Pemilik Pangkalan LPG 3 kg di Kecamatan Tanjung Selor);
5. Purwanto, Ida, dan Irma (Masyarakat pengguna/kelompok sasaran LPG 3 kg: Rumah Tangga Miskin);
6. Heri dan Imas (Kelompok sasaran Usaha Mikro);
7. Yayuk dan Yuli (Masyarakat bukan dari kelompok sasaran kebijakan).

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi alat pengumpul data adalah:

1. Pedoman wawancara (*Interview guide*) yang merupakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya untuk ditanyakan kepada subyek penelitian yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait implementasi kebijakan subsidi LPG 3 kg di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.
2. Panduan observasi (*Observation guide*) yang merupakan suatu daftar yang berisi jadwal kegiatan, agenda-agenda kegiatan maupun kondisi lingkungan kerja di lokasi penelitian.
3. Dokumen merupakan catatan-catatan atau dokumen atau peraturan peraturan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan subsidi LPG 3 kg di Kabupaten Bulungan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

D. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan secara alamiah pada sumber data. Metode pengumpulan data dalam penelitian deskriptif di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dalam bentuk percakapan langsung (*face to face*) antara peneliti dan informan, dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Wawancara ditujukan kepada informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi dan orang-orang yang mengetahui lebih dalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada beberapa informan, terkait dengan penelitian yang dilakukan. Sementara informan bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Meskipun demikian, informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang menurutnya privasi.

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara terstruktur. Maksudnya adalah proses wawancara dilakukan secara terencana. Dalam hal ini, peneliti terlebih dahulu menyiapkan *interview*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

guide sebagai panduan dalam mewawancarai responden untuk mendapatkan informasi.

2. Observasi

Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa ada pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Tipe observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung dengan cara pengamatan langsung di daerah tempat informan berada.

Observasi bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Peneliti melaksanakan pengamatan untuk memperoleh data yang diinginkan dan setiap informasi yang ditemukan kemudian dicatat dalam bentuk catatan lapangan. Catatan lapangan digunakan peneliti sebagai bukti konkret untuk menganalisis data.

3. Studi Dokumentasi

Selain menggunakan metode wawancara dan observasi, pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini juga menggunakan metode studi dokumentasi. Metode ini merupakan proses pengabadian pola perilaku subjek dan objek tanpa ada pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti dengan bantuan peralatan mekanik seperti alat tulis, rekaman, kamera dan foto.

4. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data histori atau mengkaji literatur-literatur dan laporan-laporan yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

berkaitan dengan judul penelitian. Metode ini dilakukan melalui cara pengumpulan data dengan membaca jurnal-jurnal, mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan topik penelitian, laporan dari lembaga-lembaga, baik yang bersumber dari instansi yang terkait dengan permasalahan penelitian ataupun dari perpustakaan..

5. Triangulasi

Triangulasi merupakan cara pemeriksaan keabsahan data yang paling umum digunakan. Cara ini dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Patton (dalam Sutopo, 2006: 92) menjelaskan bahwa teknik triangulasi yang dapat digunakan, meliputi: a) triangulasi data; b) triangulasi peneliti; c) triangulasi metodologis; dan d) triangulasi teoritis. Triangulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multi perspektif. Triangulasi dilakukan guna menarik suatu kesimpulan yang mantap sehingga diperlukan berbagai sudut pandang yang berbeda.

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dari sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan untuk menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

E. Metode Analisis Data

Menurut Sugiono (2010: 335) teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi dianalisis dengan cara mengorganisasikan data yang diperoleh ke dalam sebuah kategori, menjabarkannya data ke dalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami.

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:

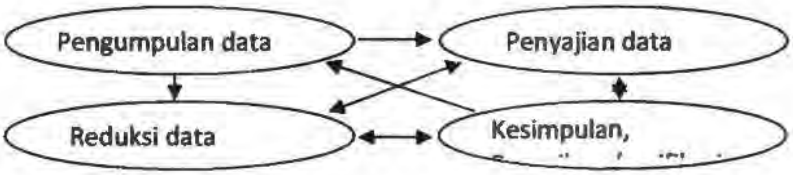

Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif
(Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Komponen-komponen analisis data model interaktif yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

   Data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

   Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk CW (Catatan Wawancara), CL (Catatan Lapangan) dan CD (Catatan Dokumentasi). Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga dapat dianalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode, dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

3. Kesimpulan, Penarikan/ Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

   Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, kemudian dibuat kesimpulan yang didukung

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan sejak awal.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kabupaten Bulungan sebagai salah satu kabupaten di bagian Utara Pulau Kalimantan mempunyai luas 18.010,50 km², terletak antara 116°04'41" sampai dengan 117°57'56" Bujur Timur dan 2°09'19" sampai dengan 3°34'49" Lintang Utara.

Adapun batas-batas Kabupaten Bulungan; sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan, sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Kota Tarakan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Berau (Provinsi Kalimantan Timur) dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malinau.

Kabupaten Bulungan memiliki beberapa pulau yang dialiri puluhan sungai besar dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung dengan tebing terjal dan kemiringan yang tajam.

Kecamatan Tanjung Selor merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bulungan. Luas wilayah Kecamatan Tanjung Selor adalah 1.277,81 km² atau 9,69 persen dari luas kabupaten. Berdasarkan letak geografis Kecamatan Tanjung Selor berbatasan dengan: Barat – Kecamatan Tanjung Palas Barat; Timur – Kecamatan Tanjung Palas Timur; Utara – Kecamatan Tanjung Palas Tengah dan Laut Sulawesi; Selatan – Kabupaten Berau. Adapun peta kondisi Kecamatan Tanjung Selor dapat dilihat pada Gambar 4.1

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43214

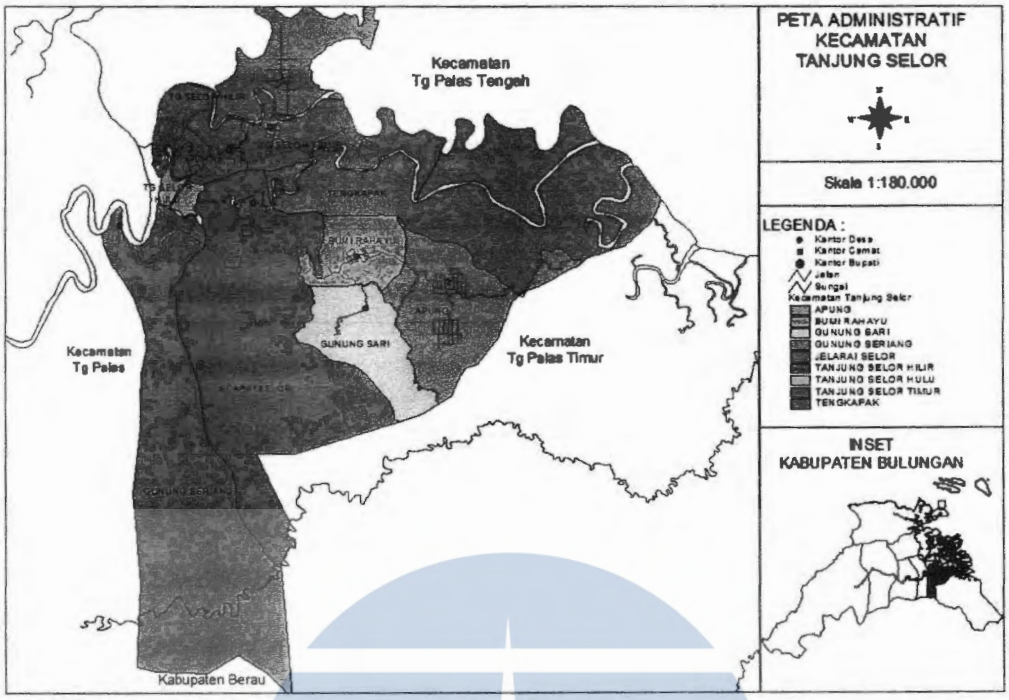

Sumber: BPS Kabupaten Bulungan, Tahun 2016

Gambar 4.1 Peta Administratif Kecamatan Tanjung Selor

Wilayah administratif Pemerintahan Kecamatan Tanjung Selor terbagi kedalam 9 (sembilan) wilayah pemerintahan desa/ kelurahan. Yang terdiri dari Desa Gunung Seriang, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Desa Jelarai Selor, Desa Gunung Sari, Desa Bumi Rahayu, Desa Apung, Desa Tengkapak, Kelurahan Tanjung Selor Timur dan Kelurahan Tanjung Selor Hilir.

Kelurahan Tanjung Selor Hilir merupakan wilayah administratif terluas yang ada di wilayah Kecamatan Tanjung Selor. Luas wilayahnya mencapai 24,44 persen dari wilayah kecamatan secara keseluruhan atau seluas 348,86 km^2. Wilayah administratif terkecil dimiliki oleh Kelurahan Tanjung Selor Timur yang luasnya hanya 22,5 km^2.

Penduduk Kecamatan Tanjung Selor berjumlah 40.977 jiwa. Sebagian besar (52%) penduduknya berada di Kelurahan Tanjung Selor Hilir. Hal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43214

tersebut dikarenakan Kelurahan Tanjung Selor Hilir merupakan pusat pemerintahan dan pusat dari Kecamatan Tanjung Selor. Distribusi penduduk terkecil berada di Desa Gunung Seriang, dengan persentase 1,84 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Hal ini terlihat dari rasio jenis kelamin (*sex ratio*) Kecamatan Tanjung Selor adalah 112, artinya setiap 100 perempuan terdapat sekitar 112 laki-laki.

Kepadatan penduduk diukur dari perbandingan antara jumlah penduduk di suatu wilayah dengan luas wilayah tersebut pada tahun tertentu. Pada tahun 2015, kepadatan penduduk Kecamatan Tanjung Selor adalah 28,71 jiwa/ km2, artinya terdapat sekitar 28 jiwa penduduk disetiap 1 km2 wilayah Kecamatan Tanjung Selor. Daerah yang paling padat terdapat di Kelurahan Tanjung Selor Timur, dengan kepadatan penduduk mencapai 148,31 jiwa/ km2. Artinya terdapat sekitar 148 jiwa penduduk disetiap 1 km2 wilayah Kelurahan Tanjung Selor Timur. Desa Gunung Seriang yang merupakan wilayah terluas kedua di Kecamatan Tanjung Selor, ternyata memiliki kepadatan penduduk yang paling rendah, yaitu 3,32 jiwa/ km2. Artinya, hanya sekitar 3 jiwa penduduk disetiap 1 km2 wilayah Desa Gunung Seriang.

Jika dilihat dari kelompok umur, penduduk Kecamatan Tanjung Selor mayoritas berada pada kelompok umur 30-34 tahun dan minoritas berada pada kelompok umur 60-64 tahun. Berdasarkan piramida penduduk, dapat dilihat penduduk dengan usia produktif (15-64 tahun) masih lebih banyak dibandingkan dengan usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai rasio ketergantungan (*dependency*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

ratio) Kecamatan Tanjung Selor yaitu 38,09. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 38 penduduk usia non produktif.

Kemiskinan memiliki definisi yang beragam di setiap negara. Kemiskinan sering dipandang sebagai ketidakmampuan untuk membayar biaya hidup minimal (Bank Dunia, 1990) walaupun beberapa ahli berpendapat kemiskinan juga merupakan kurangnya akses terhadap jasa-jasa seperti pendidikan, kesehatan, informasi, serta kurangnya akses masyarakat terhadap partisipasi pembangunan dan politik.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

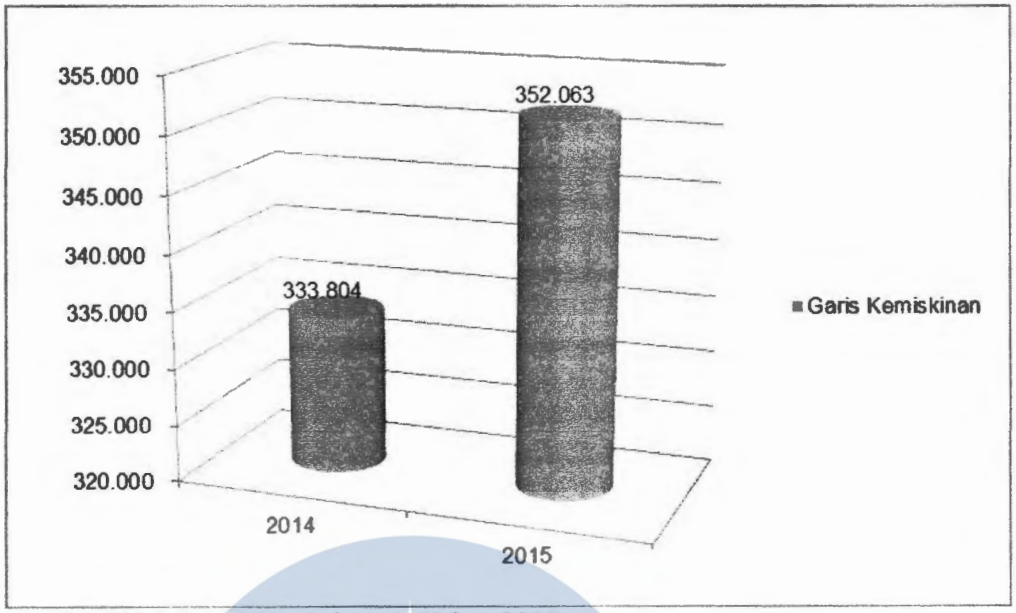

Sumber: BPS Kabupaten Bulungan, Tahun 2016

Gambar 4.2
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Bulungan Tahun 2014-2015

Garis Kemiskinan Kabupaten Bulungan tahun 2015 sebesar Rp. 352.063,- meningkat sebesar Rp. 18.259,- atau 5,46 persen dibandingkan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp. 333.804,-. Dengan kenaikan garis kemiskinan tersebut jumlah dan persentase penduduk miskin tahun 2015 justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014. Tercatat jumlah penduduk miskin tahun 2015 sebesar 10.930 jiwa dan tahun 2014 sebesar 15.110 jiwa. Sedangkan persentase penduduk miskin tahun 2015 tercatat sebesar 8,50 persen dan tahun 2014 sebesar 11,87 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Bulungan karena walaupun ada peningkatan Garis Kemiskinan tetapi jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tabel 4.1
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk
Miskin Kabupaten Bulungan Tahun 2009-2015

Tahun (1)	Jumlah (2)	Persentase (3)
2010	16.600	14,58
2011	14.400	12,14
2012	13.700	11,76
2013	14.240	12,04
2014	15.110r)	11,87r)
2015	10.930	8,50

r) Angka Revisi
Sumber: BPS Kabupaten Bulungan, Tahun 2016

Sedangkan data kemiskinan yang didapat dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang digunakan untuk Program Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.2
Data Rumah Tangga Miskin Sasaran Penerima Manfaat (RTS- PM)
Kabupaten Bulungan Tahun 2016

NO	KECAMATAN	JUMLAH (RTS-PM)	%
1	2	3	4
1	Peso	184	4.74
2	Peso Hilir	403	10.39
3	Tanjung Palas	521	13.43
4	Tg. Palas Barat	243	6.27
5	Tg. Palas Utara	289	7.45
6	Tg. Palas Timur	408	10.52
7	Tanjung Selor	830	21.39
8	Tg. Palas Tengah	390	10.05
9	Bunyu	155	3.99
10	Sekatak	457	11.78
TOTAL		3880	100

Sumber: TNP2K, Tahun 2016

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat paling besar jumlahnya terdapat di Kecamatan Tanjung Selor sebesar 21.39%, kemudian Kecamatan Tanjung Palas sebesar 13.43%, dan disusul Kecamatan Sekatak sebesar 11.78%.

Sedangkan distribusi Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat perdesa/ perkelurahan di Kecamatan Tanjung Selor, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.3.
Data penyebaran Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat
Di Kecamatan Tanjung Selor Tahun 2016

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH (RTS-PM)
1	2	3	4
	Tanjung Selor	1. Tg. Selor Ilir	417
		2. Tg. Selor Timur	104
		3. Tg. Selor Ulu	32
		4. Jelarai Selor	0
		5. Tengkapak	54
		6. Gunung Seriang	18
		7. Bumi Rahayu	49
		8. Gunung Sari	74
		9. Apung	83
		JUMLAH	830

Sumber: TNP2K, Tahun 2016

Pada tabel 4.3 dapat dilihat jumlah RTS- PM di Kelurahan Tanjung Selor Ilir paling besar 417 RTS- PM, diikuti posisi kedua Kelurahan Tanjung Selor Timur 104 RTS- PM, dan posisi ketiga Desa Apung 83 RTS-PM.

Sedangkan data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bulungan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43214

Tabel 4.4
Data UMKM Kabupaten Bulungan
Tahun 2015

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH USAHA MIKRO	JUMLAH USAHA KECIL	JUMLAH USAHA MENENGAH	TOTAL
1	Tanjung Selor	9	1.186	269	23	1.478
2	Tanjung Palas	9	360	27	2	389
3	Tg. Palas Barat	5	133	5	0	138
4	Tg. Palas Utara	6	232	14	2	248
5	Tg. Palas Timur	8	294	28	1	323
6	Tg. Palas Tengah	3	127	2	0	129
7	Sekatak	21	178	57	4	239
8	Peso	5	72	12	0	84
9	Peso Hilir	5	94	3	0	97
10	Bunyu	3	196	12	0	208
TOTAL		74	2.872	396	32	3.333

Sumber: Disperindagkop dan UMKM Kab. Bulungan, Tahun 2015

Pada Tabel 4.4 terlihat bahwa sebaran UMKM paling banyak di Kecamatan Tanjung Selor, hal ini sangatlah wajar dikarenakan Kecamatan Tanjung Selor merupakan pusat Ibu kota Kabupaten Bulungan, pusat pemerintahan bagi Kabupaten Bulungan dan Propinsi Kalimantan Utara yang disyahkan sejak tahun 2012.

B. Implementasi Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg di Kecamatan Tanjung Selor

1. Dasar Hukum Subsidi LPG 3 Kg

Dasar hukum Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg di Kabupaten Bulungan mengacu pada:

1). UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

2). Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;

3). Perpres No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

4). Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG.

Dari hasil wawancara dengan aparatur pemerintah daerah kabupaten Bulungan yang membidangi masalah energi dan LPG menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memang tidak membuat formulasi kebijakan derivatif atau turunan seperti Peraturan Daerah terkait Subsidi LPG 3 Kg. Aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dirasa cukup lengkap namun ada beberapa aturan yang masih perlu disesuaikan dengan kondisi daerah seperti ketentuan kelompok sasaran subsidi LPG 3 Kg dan besaran untuk masing-masing kelompok sasaran tersebut dan ini bisa ditempuh dengan membuat Surat Keputusan Bupati, dan ketentuan lainnya.

Lebih lanjut Kabupaten Bulungan dalam mengacu pada Peraturan Menteri ESDM tersebut, melakukan beberapa kewenangan dalam hal:

1. membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Perndistribusian BBM dan LPG bersubsidi di Kabupaten Bulungan;
2. menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg, untuk wilayah kabupaten dan kecamatan;
3. mengajukan usulan kuota LPG 3 kg setiap tahun kepada Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Propinsi;
4. mengatur jumlah dan letak pangkalan LPG bersama-sama agen LPG;
5. melakukan verifikasi terhadap jumlah LPG 3 kg yang sampai di wilayah Kabupaten Bulungan;
6. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pendistribusian LPG 3 kg.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Dalam mengambil keputusan-keputusan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dapat melakukannya dalam Rapat Tim. Tim Pengawasan dan Pengendalian Pendistribusian BBM dan LPG 3 Bersubsidi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan yang terdiri dari beberapa instansi lintas sektoral seperti: Disperindagkop dan UMKM, Distamben, Dishubkominfo, Satpol PP, Bagian Perekonomian, Bagian Hukum, Kepolisian, dan DPRD.

2. Tujuan Subsidi LPG 3 kg

Tujuan Subsidi LPG 3 kg tidak bisa dilepaskan dari tujuan awal konversi minyak tanah ke LPG 3 kg, yaitu:

1). melakukan diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM;

2). melakukan efisiensi anggaran pemerintah;

3). mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi;

4). menyediakan bahan bakar yang praktis, bersih dan efisien.

3. Kelompok Sasaran Subsidi LPG 3 kg

Sesuai dengan Perpres No 104/ 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, maka penerima paket perdana LPG 3 Kg adalah:

a. Rumah Tangga

Rumah tangga yang berhak menerima paket LPG 3 kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1. Rumah Tangga;
2. Pengguna minyak tanah murni;
3. Penduduk legal setempat yang dibuktikan dengan melampirkan fotocopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan dari kelurahan setempat.

b. Usaha Mikro

Usaha mikro yang berhak menerima paket LPG 3 Kilogram beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

1. Usaha mikro tersebut merupakan pengguna minyak tanah untuk bahan bakar memasak dalam usahanya.
2. Penduduk legal setempat yang dibuktikan dengan melampirkan *fotocopy* KTP dan Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan dari Lurah setempat.
3. Melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat.

Aturan, tujuan dan sasaran di atas, merupakan pedoman bagi pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang telah disepakti bersama. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejewantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel yang saling berkaitan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

C. Permasalahan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan LPG 3 kg di Kecamatan Tanjung Selor

Permasalahan dalam implementasi kebijakan subsidi LPG 3 Kg di Kecamatan Tanjung Selor akan dibahas dalam beberapa sub variabel yang saling berkaitan mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn, diantaranya:

1. Standard dan sasaran kebijakan/ ukuran dan tujuan kebijakan.
2. Sumber daya.
3. Karakteristik organisasi pelaksana.
4. Sikap para pelaksana.
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

1) Standard dan Sasaran Kebijakan/ Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standard dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Dari standar dan sasaran kebijakan Subsidi LPG 3Kg, dapat dibagi dalam aspek: alokasi/ kuota LPG 3 Kg, Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg, Kelompok sasaran penerima manfaat.

Peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 November 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, Pasal 5:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

"Menteri menetapkan perencanaan volume penjualan tahunan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 serta standar dan mutu (spesifikasi) LPG Tabung 3 Kg dengan mempertimbangkan":

a. Kebutuhan penggunaan LPG untuk rumah tangga dan usaha mikro; serta
b. Usulan dari Badan Usaha.

Dari bunyi pasal di atas, maka Menteri ESDM merencanakan alokasi berdasarkan kebutuhan kelompok sasaran kebijakan LPG 3 Kg, Rumah Tangga, Usaha Mikro dan usulan dari Badan Usaha dalam hal ini PT. Pertamina (Persero). Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pendistribusian BBM dan LPG Bersubsidi (Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Bulungan):

"Usulan kuota LPG 3 Kg biasanya diminta oleh propinsi di akhir tahun, misal kuota tahun 2017 sudah diusulkan pada akhir tahun 2016. Daerah mengusulkan berdasarkan kebutuhan rumah tangga dan Usaha Mikro. Penetapan kuota biasanya pada bulan maret tahun berjalan, ditetapkan oleh Menteri ESDM setelah mendapat persetujuan DPR"

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa mekanisme penetapan alokasi memerlukan data dari pemerintah Kabupaten/ Kota yang di *update* setiap tahun, agar perencanaan kebutuhan tepat sasaran, namun juga disesuaikan dengan kondisi keuangan Negara, sehingga diperlukan persetujuan dari DPR yang notabene mempunyai fungsi *budgeting*.

Pada awal Program Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg di wilayah Kabupaten Bulungan berjalan dalam kurun waktu 4 tahun (2011-2014). Target 24.193 paket LPG 3 Kilogram (tabung LPG 3 Kg, kompor, dan regulator) terpenuhi dengan 3 (tiga) klasifikasi kelompok sasaran. Adapun kelompok sasaran konsumen LPG 3 Kg di Kabupaten Bulungan hasil pencacahan Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia adalah:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1. 23.208 rumah tangga;
2. 319 penduduk musiman;
3. 666 usaha mikro

Berikut penyebaran data penerima paket perdana LPG 3 Kg di wilayah Kabupaten Bulungan:

Tabel.4.5
Data Alokasi Tabung Perdana LPG 3 Kg
Di Wilayah Kabupaten Bulungan

QUOTA PAKET PERDANA KABUPATEN BULUNGAN 2011

NO	KECAMATAN	QUOTA (RT+UM)	%
1	TG. SELOR	6296	26.024
2	TG.PALAS	3167	13.091
3	TG.PALAS TENGAH	2062	8.523
4	TG.PALAS UTARA	2557	10.569
5	TG.PALAS TIMUR	2482	10.259
6	TG.PALAS BARAT	1627	6.725
7	PESO HILIR	885	3.658
8	PESO	1033	4.270
9	SEKATAK	1990	8.226
10	BUNYU	2094	8.655
	TOTAL	**24193**	**100**

Sumber: Bagian Perekonomian Setkab. Bulungan, Tahun 2011

Pada tabel 4.5, menunjukkan pada awal program konversi Minyak Tanah ke Gas LPG 3 Kg, Kecamatan Tanjung Selor mendapat persentase paling besar yaitu: 26.024% dari total 24.193. Hal ini sempat membawa pertanyaan besar bagi peneliti, apakah program ini untuk kelompok sasaran Rumah Tangga Miskin dan Usaha Mikro atau Rumah Tangga yang memakai minyak tanah sebagai bahan bakar memasak tanpa melihat miskin atau tidak. Hal ini disebabkan data

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kemiskinan pada awal konversi (tahun 2011) untuk wilayah Kabupaten Bulungan, yaitu 14.400, sedangkan Rumah Tangga penerima paket perdana LPG 3 Kg 23.208. Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Tim, jawaban yang diperoleh adalah penentuan Rumah Tangga penerima hampir seluruh masyarakat yang masih menggunakan minyak tanah dan di Bulungan mayoritas masyarakatnya menggunakan minyak tanah. Pendataan itupun kurang mempertimbangkan lagi miskin atau tidaknya. Selain itu, ia menambahkan bahwa kartu kendali di awal program konversi tidak lagi digunakan dan tidak ada penetapan kelompok sasaran yang berhak menerima sehingga pendistribusiannya terbuka/ tidak tertutup, siapapun mempunyai akses untuk membeli LPG 3 Kg. Walaupun sudah banyak berita di media yang menyampaikan bahwa LPG 3 Kg hanya untuk masyarakat miskin, sangatlah sulit untuk mengharapkan kesadaran masyarakat terlebih disparitas harga yang cukup jauh antara LPG bersubsidi dengan yang tidak disubsidi.

Sementara itu alokasi dan realisasi pendistribusian LPG 3 Kg di wilayah Kabupaten Bulungan tahun 2015 dari alokasi sebesar 624.000 tabung/ tahun, realisasi yang dapat terserap oleh empat agen LPG 3 Kg sebesar 420.240 tabung atau hanya sebesar 67.35%.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43214

Tabel. 4.6
Data Alokasi dan Realisasi Pendistribusian LPG 3 Kg
di Wilayah Kabupaten Bulungan tahun 2015

No	Nama Agen	Alokasi (Tabung)	Realisasi	Persentase Realisasi
1	PT. Makbul	156.000	140.000	89,74
2	PT. Mitra Brilian	156.000	51.840	33,23
3	PT. Badjuber Bersaudara	156.000	147.160	94,33
4	PT. Tri Pribumi sejati	156.000	80.640	51,69
J U M L A H		**624.000**	**420.240**	**67,35**

Sumber: Disperindagkop dan UMKM Kab. Bulungan, Tahun 2015

Pada tabel 4.6, terlihat rendahnya realisasi penyerapan LPG 3 Kg yang hanya berkisar 67.35% secara keseluruhan. Dari hasil wawancara dengan Agen PT. Mitra Brilian yang mempunyai angka realisasi paling rendah, rendahnya realisasi disebabkan belum memadainya sarana mobil *truck* pengangkut LPG 3 Kg. Mereka belum berani menambah alat transportasi pengangkut LPG 3 Kg karena masih menilai Harga Jual Eceran (HET) LPG Kg untuk wilayah Kabupaten Bulungan masih belum menutup biaya transportasi pengambilan LPG 3 Kg yang cukup jauh jaraknya, yakni di Kota Samarinda. Selain jauh, medan yang sulit dan beresiko juga menjadi penghambat kelancaran pendistribusian LPG 3 Kg ke wilayah Kabupaten Bulungan.

Tahun 2016, alokasi dan realisasi LPG 3 Kg untuk Kabupaten Bulungan meningkat baik dari sisi alokasi dan realisasi. Dari 886.800 alokasi pada tahun 2016, realisasi pendistribusiannya sebesar 739.840 tabung atau sebesar 83.43%. Peningkatan alokasi merupakan usulan yang direspon pusat disebabkan adanya penambahan penduduk karena pengembangan daerah otonami baru Kalimantan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43214

Utara yang secara geografis berada di Kabupaten Bulungan, selain itu dengan dibukanya wilayah transmigrasi bagi penduduk lokal dan pendatang dari Jawa di Kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas Tengah menambah daftar pengguna LPG 3 Kg semakin meningkat.

Tabel 4.7
Data Alokasi dan Realisasi Pendistribusian LPG 3 Kg
di Wilayah Kabupaten Bulungan tahun 2016

No	Nama Agen	Alokasi (Tabung)	Realisasi	Persentase Realisasi
1	PT. Makbul	300.000	178.080	59.36
2	PT. Mitra Brilian	300.000	294.200	98.07
3	PT. Badjuber Bersaudara	120.000	145.320	121
4	PT. Tri Pribumi sejati	120.000	122.240	101.87
J U M L A H		**886.800**	**739.840**	**83.43**

Sumber: Disperindagkop dan UMKM Kab. Bulungan, Tahun 2016

Pada tabel 4.7 dapat dilihat kinerja agen dalam realisasi penyerapan, agen PT. Makbul dari persentase penyerapan mengalami penurunan dari pada tahun sebelumnya 2015, namun dari segi jumlah alokasi dan realisasi mengalami peningkatan. Hal ini sempat ditanyakan kepada pihak agen PT. Makbul, dan menurut pihak agen sedikitnya penyerapan LPG 3 Kg dibandingkan agen-agen yang lainnya dikarenakan terbatasnya sarana transportasi yang dimiliki. Pihak agen belum menambah investasi moda transportasi dan hanya menambah unit sewa. Selain itu, jauhnya jarak pengambilan tabung isi ulang di Samarinda berjarak 800 Km dari Kabupaten Bulungan dengan total jarak tempuh 1600 Km (PP) dan waktu tempuh 1 kali trip 4 hari dan jika musim hujan atau jalanan rusak akan memakan waktu 5 hingga 7 hari.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43214

Sedangkan dari sisi Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg, pemerintah mempunyai kewenangan untuk menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan disyahkan oleh Gubernur. Adapun harga patokan LPG 3 Kg ditentukan oleh Menteri ESDM setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Harga patokan LPG 3 Kg mengikuti beberapa variabel harga sebagai berikut, yaitu Harga Indeks Pasar (CP Aramco), kurs USD, Bea Impor, Biaya perkapalan, Biaya Distribusi dan Handling, Margin Badan Usaha. Konstruksi harga patokan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.3.

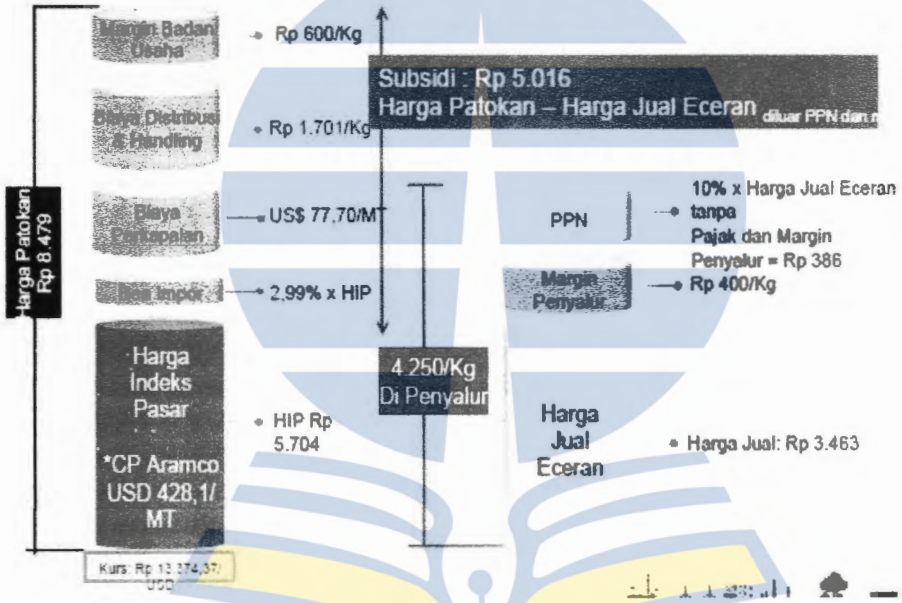

Sumber: Kementerian ESDM, Tahun 2016

Gambar. 4.3 Harga Patokan LPG 3 kg

Pada gambar 4.3, variabel harga patokan terdiri dari: Harga Indeks Pasar (CP Aramco) sebesar USD 428,1/ MT, Bea Impor 2,99% x Harga Indeks Pasar, Biaya Perkapalan USD 77,70/ MT, Biaya Distribusi dan Handling Rp 1.701/ Kg, Margin Badan Usaha Rp 600/ Kg, sehingga Harga Patokan LPG 3 Kg adalah sebesar

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43214

Rp 8.479/ Kg dengan menggunakan base kurs Rp 13.374,37/ USD. Besaran subsidi yang ditetapkan pemerintah adalah Rp 5.016/ Kg, sehingga harga jual eceran di Penyalur/ Agen adalah Rp 4.250/ Kg.

Namun berdasarkan Pasal 24 ayat 4, Permen ESDM No 26 Tahun 2009, tentang penyediaan dan pendistribusian *Liquified Petroleum Gas*, dinyatakan bahwa:

> " Dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG, Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tertentu untuk pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub penyalur LPG Tertentu".

Berdasarkan dengan ketentuan tersebut, Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini selaras dengan penuturan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pendistribusian LPG 3 Kg dari bagian Perekonomian terkait HET LPG 3 Kg (Kepala Bidang Perdagangan, Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Bulungan):

> *" proses menentukan HET LPG 3 Kg dilakukan di Kabupaten/ Kota dan ditetapkan atau disyahkan oleh Gubernur. Proses penentuan HET melibatkan para agen, Tim dari pemda, PT. Pertamina (Persero), dan Hiswana Migas. Rapat tersebut berjalan dalam beberapa tahap yang cukup alot, awalnya pemda dan agen mendapat pilihan apakah LPG akan di drop dari Tarakan sebagai Supply Point atau dari Samarinda. Hal ini disebabkan Infrastuktur Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) yang mulai dibangun tahun 2011 di Kabupaten Bulungan belum terealisasi. Dari tiga kali rapat akhirnya dipilih pengambilan LPG 3 Kg dari Samarinda karena HET-nya lebih rendah dibandingkan dengan HET dari pengambilan di Tarakan karena proses bongkar muat di pelabuhan baik di pelabuhan Tarakan dan pelabuhan Tanjung Selor yang tinggi biayanya. Namun hal ini juga ada plus minusnya, kekurangannya adalah jarak dan waktu tempuh yang lama sehingga kelancaran pendistibusian LPG 3 Kg juga tidak luput dari masalah. Idealnya para agen mengambil tabung isi ulang dari SPPBE yang ada di Bulungan sehingga harga dapat ditekan dan kelancaran pendistribusian juga lebih baik tentunya".*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Dari uraian di atas, dapat dilihat proses penentuan HET LPG 3 Kg dilakukan dalam proses yang tidak singkat, banyak variabel yang menjadikan HET tiap Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Utara berbeda-beda, salah satunya masalah penentuan *Supply Point.*

Pemda Kabupaten Bulungan telah dua kali menetapkan HET LPG 3 Kg, yaitu pada bulan Januari 2015 dan pada bulan Mei 2015, sebagai berikut:

Tabel 4.8
Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg Kabupaten Bulungan

No	Komponen Harga	Januari 2015	Mei 2015
1	Supply Point	Tanjung Selor	Tanjung Selor
2	Harga Tebus Agen	11.588	11.588
3	Margin Agen	1.200	1.200
4	Ongkos Angkut	1.712	8.212
5	Harga Agen ke Pangkalan	14.500	21.000
6	Margin Pangkalan	2.000	2.000
	HET Pangkalan	**16.500**	**23.000**

Sumber: Bagian Perekonomian , Tahun 2015

Pada Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa HET LPG 3 Kg pada bulan Januari 2015 adalah Rp 16.500/ tabung dan pada Mei 2015 menjadi Rp 23.000/ tabung. Hal ini menurut penuturan Kepala Bidang Perdagangan, Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Bulungan penetapan HET LPG pada bulan Januari memang bersifat sementara dan akan di evaluasi kembali, dan setelah tiga bulan dan bertepatan dengan adanya kenaikan harga Solar Subsidi pada bulan Maret 2015

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

mempengaruhi variabel harga ongkos angkut LPG 3 Kg. Namun kenaikan harga ini baru disyahkan oleh Gubernur pada bulan Mei 2015.

Sedangkan perbandingan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg di Lima Kabupaten/ Kota se-Kaltara dapat dilihat pada Tabel 4.9:

Tabel 4.9
Perbandingan HET LPG 3 Kg di Kabupaten/ Kota se-Kaltara

No	Kabupaten/Kota	HET LPG 3 Kg
1	Bulungan	Rp 23.000
2	KTT	Rp 27.000
3	Malinau	Rp 28.000
4	Nunukan	Rp 16.500
5	Tarakan	Rp 16.500
6	Berau	Rp 21.000

Sumber: Disperindagkop dan UMKM Kab. Bulungan, Tahun 2015

Pada Tabel 4.9, HET LPG 3 kg Kabupaten Nunukan dan Tarakan menempati nilai terendah yakni Rp 16.500/ tabung, hal ini disebabkan penentuan *supply point*/ titik serah LPG 3 kg adalah di Kabupaten tersebut yang langsung didrop oleh PT. Pertamina (Persero) dari Balikpapan menggunakan kapal. Lain halnya dengan pendistribusian LPG 3 Kg ke Kabupaten Bulungan, KTT, Malinau dan Berau dimana para agen LPG 3 Kg yang mengambil alokasi LPG 3 Kg ke SPPBE yang berada di Samarinda sehingga jarak yang jauh membutuhkan biaya transportasi yang semakin tinggi dan hal inilah yang mengakibatkan HET LPG 3 Kg menjadi tinggi.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Setelah HET LPG 3 Kg untuk Kabupaten/ Kota ditetapkan, maka Kabupaten/ Kota menentukan HET LPG 3 Kg untuk masing-masing kecamatan. Menurut penuturan Kepala Bidang Perdagangan, Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Bulungan, Tim telah merapatkan HET LPG 3 Kg untuk 10 Kecamatan yang ada di Bulungan, kecuali Bunyu karena Bunyu sudah ada program *City Gas* dan keberadaan LPG 3 Kg sangat jarang di sana.

Tabel 4. 10
HET LPG 3 Kg di Kecamatan se- Kabupaten Bulungan

No	Kecamatan	HET LPG 3 Kg
1	Peso	Rp 35.000
2	Peso hilir	Rp 32.000
3	Tanjung Palas	Rp 28.000
4	Tg. Palas Barat	Rp 30.000
5	Tg. Palas Utara	Rp 33.000
6	Tg. Palas Timur	Rp 35.000
7	Tanjung Selor	Rp 23.000
8	Tg. Palas Tengah	Rp 31.000
9	Sekatak	Rp 35.000

Sumber: Disperindagkop dan UMKM, Tahun 2015

Pada Tabel 4.10, dapat kita lihat bahwa kecamatan-kecamatan terluar seperti Peso, Sekatak, Tanjung Palas Timur mempunyai HET LPG 3 Kg paling tinggi, yakni Rp 35.000/ tabung. Hal ini menjadi sesuatu yang wajar karena *supply point* perhitungan HET LPG 3 Kg adalah kecamatan Tanjung Selor.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Dari hasil pengamatan di wilayah Kecamatan Tanjung Selor, dari beberapa pangkalan resmi yang menjual LPG 3 Kg, rata-rata menjual dengan harga Rp 25.000/ tabung sedangkan harga HET untuk wilayah Tanjung Selor adalah Rp 23.000/ tabung. Keberadaan *stock* LPG 3 Kg di pangkalan itupun cepat sekali habisnya. Menurut pangkalan, *stock* yang baru datang tidak bertahan lama paling lama 1 atau 2 hari pasti sudah diburu pembeli. Padahal dari hasil wawacara dengan Agen LPG 3 Kg, pangkalan sudah diimbau untuk menjual maksimal 2 tabung/ orang dan mengisi *logbook* (buku data pembeli). Mengenai harga HET yang dijual Rp 25.000, pangkalan menuturkan karena kesulitan kembalian atau uang kecil maka dibulatkan saja menjadi Rp 25.000 dan biasanya pembeli jarang yang *complain* yang penting ada LPG-nya. Memang dari pantauan yang dilakukan di wilayah Tanjung Selor, harga di pengecer/ bukan pangkalan resmi berkisar Rp 35.000/ tabung dan bila terjadi kelangkaan bisa menembus Rp 50.000/ tabung. Para pengecer memperoleh pasokan dari Samarinda dan ini menurut pengakuan pengecer sudah sering terjadi.

Ketika hal ini disampaikan kepada Tim Pengawasan dan Pengendalian Pendistribusian BBM dan LPG Bersubsidi, Kabid. Perdagangan Disperindagkop dan UMKM merespon hal tersebut sudah Tim ketahui, namun tidak pernah melihat/ menangkap oknum yang membawa LPG 3 Kg dari luar Bulungan dan dijual dengan harga yang tinggi tersebut. Adapun pihak pengecer sudah berkali-kali diingatkan untuk tidak membeli LPG dari oknum tersebut. Menurutnya jangan sampai pangkalan resmi menjual diatas HET yang telah ditetapkan Pemda, bila itu dilakukan pangkalan tersebut akan mendapat *skorsing* (pengurangan alokasi LPG) dari agen hingga pemutusan sebagai pangkalan. Jadi Tim

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

mengimbau agar masyarakat melaporkan bila terdapat pangkalan yang menjual LPG 3 Kg diatas harga HET. Laporan bisa disampaikan ke Disperindagkop dan UMKM atau Agen LPG 3 Kg terdekat.

Lebih lanjut ketika peneliti mempertanyakan apakah dengan maraknya pengecer memperoleh LPG 3 Kg dari luar Bulungan menandakan alokasi untuk Kabupaten Bulungan masih kurang?, berikut tanggapan dari Tim:

> *"Sebenarnya hampir seluruh daerah di Indonesia menggunakan pendistribusian LPG 3 Kg secara terbuka, dalam arti setiap orang mempunyai akses untuk memperoleh LPG 3 Kg baik miskin atau tidak. Tidak seperti halnya Program Raskin yang sudah ditetapkan SK-nya oleh Bupati/ Walikota sehingga penerima manfaat subsidi sudah ada siapa orangnya dan berapa banyak yang diperoleh, datanya by name by address. Kenapa hal ini tidak bisa diterapkan di LPG? Tentu ada plus minus mengingat LPG ini dikelola oleh Agen yang notabene Badan usaha swasta yang berorientasi profit oriented. Pendistribusian LPG juga harus memperhitungkan tabung kosong yang bakal ditukar dengan tabung isi, ini juga menjadi kendala. Besarnya investasi yang ditanamkan oleh para agen dalam bisnis ini juga mengharuskan perputaran penjualan yang tinggi, bila dibatasi pasti mempengaruhi nilai investasi para agen. Idealnya subsidi bukan pada produk tapi orangnya sehingga LPG 3 Kg bisa dibeli oleh siapapun namun bagi orang yang mendapat subsidi memperoleh harga beli yang tentunya lebih murah. Memang wacana ini pernah dibahas oleh pemerintah pusat namun belum direalisasikan".*

Dari penuturan hal di atas, dapat dikatakan bahwa ada mekanisme yang kurang pas dalam menentukan kelompok sasaran subdisi dan lembaga pelaksana kebijakan dalam hal ini Agen LPG 3 Kg yang bermotif *profit oriented.* Adalah hal biasa bila sebuah organisasi bisnis diharapkan mampu berkomitmen penuh menjaga tujuan kebijakan yang bermotif sosial dengan mengenyampingkan tujuan utama organisasinya. Selain itu, peran pemerintah daerah yang harus tegas mengambil langkah untuk menetapkannya dengan Surat Keputusan Bupati kelompok sasaran penerima manfaat subsidi dan berapa jumlahnya tentulah

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

merupakan suatu usaha yang baik walau hasilnya belum tentu sesuai apa yang diharapkan.

Dari bahasan sub variabel standar dan sasaran kebijakan/ ukuran dan tujuan kebijakan di atas, menunjukkan bahwa standar dalam menentukan kelompok sasaran kebijakan tidak ada kejelasan dan ketegasan, penentuan alokasi kebutuhan juga demikian, tidak menggunakan standar yang semestinya, yaitu rumah tangga miskin dan usaha mikro. Sedangkan dari segi Harga Eceran Tertinggi (HET), melihat perbandingan dengan daerah kecamatan dan kabupaten/ kota yang lain, disparitas harga yang ada akan memicu aksi penyelundupan.

2) Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Meter dan Van Horn, 1974) bahwa:

> *"New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program".*

Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa:

> *"Sumber daya* kebijakan *(policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43214

ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan."

Beberapa aspek yang termasuk dalam sumber daya terkait dengan implementasi kebijakan subsidi LPG 3 Kg adalah: Sumber Daya Manusia (implementator kebijakan dalam hal kompetensi dan jumlah), dukungan finansial dalam kebijakan subsidi LPG 3 Kg, ketersediaan infrastuktur sarana dan prasarana guna menunjang pendistribusian LPG 3 Kg. Aspek sumber daya dipertanyakan untuk beberapa informan, yaitu para Sales Representative PT. Pertamina, Tim Pengawasan dan Pengendalian Pendistribusian BBM dan LPG Bersubsidi, dan Agen LPG 3 Kg.

Menurut SR. PT. Pertamina, jumlah personil untuk memantau pendistribusian LPG 3 Kg ini lebih mengutamakan sistem informasi seperti "Sistem Simolek" yaitu, sistem monitoring Elpiji Tiga Kilogram yang menggunakan teknologi GPS untuk mengawasi penyaluran tabung gas bersubsidi dari Agen ke pangkalan. Sedangkan untuk memverifikasi pangkalan yang tersebar luas akan menggunakan petugas independen yang melakukan uji petik. Perlu diketahui bahwasannya PT. Pertamina (Persero) yang meng-*handle* LPG 3 Kg untuk wilayah Kalimantan berada di Balikpapan sehingga pemantauan langsung untuk wilayah Bulungan biasanya menggunakan sistem dan informasi di media massa, misal ketika di media massa ada informasi kelangkaan LPG selama seminggu, maka Pertamina berinisiatif melakukan Operasi Pasar berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Agen LPG 3 Kg, terkait jumlah, tempat dan persyaratan administrasi lainnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Sedangkan sumber daya personil yang terlibat dalam Tim Pengawasan dan Pengendalian Pendistribusian BBM dan LPG 3 Kg, menurut Kepala Bidang Perdagangan untuk mengawasi di wilayah Tanjung Selor sudah mencukupi namun untuk pengawasan di seluruh wilayah Kabupaten Bulungan masih kurang, terlebih secara geografis Kabupaten Bulungan terpisah-pisah oleh sungai dengan jarak yang cukup berjauhan. Selain itu anggaran untuk monitoring dan evaluasi pendistribusian LPG 3 Kg perkecamatan hanya mampu untuk satu kali monev perkecamatan dalam satu tahun anggaran, menurutnya hal ini tentulah kurang apalagi mengingat momen-momen hari besar perlu mendapat pengawasan yang lebih ekstra.

Dari segi kualitas atau kemampuan personil Tim dalam memahami tujuan kebijakan subsidi LPG 3 Kg rata-rata menurut Kepala Bidang Perdagangan sudah faham dan mengerti karena dalam rapat koordinasi dan kegiatan monitoring berkali-kali disinggung apa tujuan kebijakan subsidi dan siapa kelompok sasarannya. Namun jika ditanya kategori rumah tangga miskin itu seperti apa, menurut kepala bidang perdagangan memang belum ada keseragaman mau mengikuti miskin dari data TNP2K atau BPS dan yang jelas memang LPG 3 Kg ini tidak lagi menggunakan kartu kendali.

Sedangkan jumlah personil yang berada pada Agen LPG 3 Kg, menurut para agen sudah mencukupi rata-rata tiap agen memiliki 15 – 20 orang. Ketika peniliti menanyakan apakah para agen dan karyawan memahami tujuan kebijakan subsidi tersebut, para agen memahami tujuan kebijakan dengan baik.

> *"Kalau diawal program konversi tujuannya untuk mengalihkan masyarakat yang menggunakan minyak tanah ke gas, biar lebih hemat karena minyak tanah itu mahal. Selain itu harga LPG 3 Kg disubsidi agar terjangkau harga*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

belinya bagi masyarakat miskin dan usaha mikro. Di tabung LPG 3 Kg juga sudah ditulis hanya untuk orang miskin".

Penuturan pihak agen mengisyaratkan mereka faham dengan tujuan awal program konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg dan tujuan atas keterjangkauan harga bahan bakar dalam hal ini gas untuk masyarakat miskin dan usaha mikro.

Beranjak kepada ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang pendistribusian LPG 3 Kg, menurut Kasubbag. Sarana Perekonomian yang juga terlibat dalam Tim, keberadaan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) merupakan hal mutlak yang harus ada. Ketika program Konversi berlangsung dari tahun 2011 dan Bulungan diharuskan *dry kerosin*/ bebas minyak tanah subsidi pada tahun 2014, maka diharapkan SPPBE yang sudah mengantongi izin prinsip pada tahun 2011 seyogyanya sudah bisa beroperasi, namun ketika hal ini di pertanyakan kepada pihak PT. Pertamina (*Persero)* yang bertanggung jawab atas realisasi infrastruktur tersebut, menyatakan rekanan yang mendapat proyek tersebut mengalami masalah keuangan dan masih dalam proses *take over* pihak lain. Lebih lanjut ia menuturkan bila ada SPPBE di Bulungan, yang posisinya di seberang sungai masuk di wilayah Kecamatan Tanjung Palas, tentulah para Agen dapat lancar mendistribusikan LPG 3 Kg, tidak jauh-jauh menempuh 1600 Km kurang lebih 4 hari dalam mengambil LPG 3 Kg di SPPBE yang berada di Samarinda, para agen akan fokus dalam pendistibusian ke pangkalan-pangkalan yang berada di kecamatan, kelurahan atau desa. Hal ini lebih efektif dan efesien tentunya dan sudah lama kita menantikan hal ini, bukan hanya Bulungan tapi juga kabupaten lainnya, seperti Berau, Tana Tidung, dan Malinau yang berbatasan daratan dengan Bulungan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43214

Ketika masalah infrastruktur penunjang pendistribusian LPG 3 Kg dipertanyakan kepada pihak Agen, pihak agen membenarkan apa yang telah disampaikan pihak pemda tentang urgennya keberadaan SPPBE di wilayah Bulungan. Berikut gambar lokasi SPBBE yang mangkrak di Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan.

Sumber: Bulungan Post, Tahun 2015

Gambar 4.5
SPPBE di Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan yang Mangkrak

Dari gambar di atas memperlihatkan bahwa Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) yang mulai dibangun tahun 2011 dan direncanakan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

beroperasi tahun 2012 tak kunjung selesai. Masalah permodalan dan manajemen perusahaan yang mengakibatkan proyek ini mangkrak.

Selain itu, pihak agen juga menyampaikan kondisi infrastruktur jalan yang mereka lewati dari Samarinda ke Tanjung Selor yang sering mengalami kerusakan terlebih pada musim hujan, terutama di sekitar Berau Km 17, Km 44, dan beberapa titik yang belum beraspal. Berikut gambar kondisi jalan di Berau yang mengalami longsor dan putus.

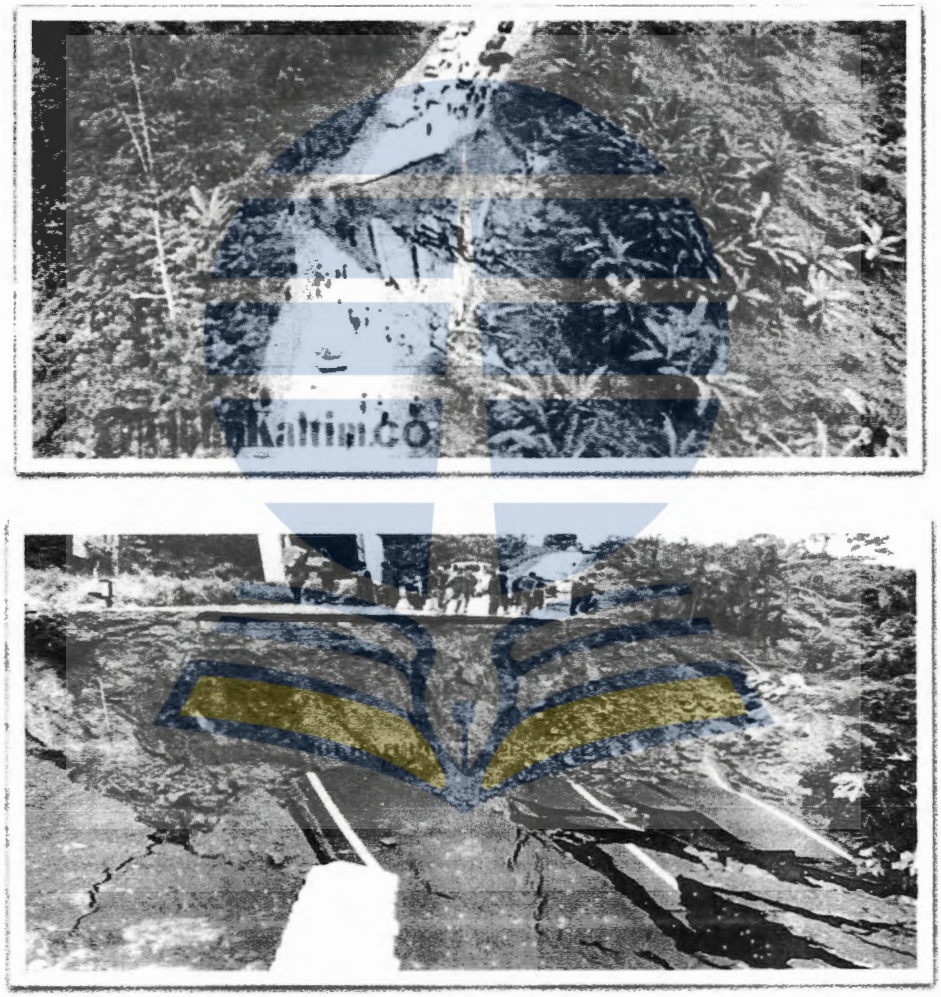

Sumber: http://kaltim.tribunnews.com, Tahun 2015

Gambar 4.4
Jalan Nasional Trans Kalimantan yang menghubungkan Berau dan Bulungan Putus di Km 44 Berau

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43214

Bila hujan datang, sering jalan mengalami longsor bahkan putus dan bila ini terjadi maka mobil pengangkut LPG 3 Kg harus bermalam hingga 6 hingga 7 hari baru bisa normal lagi. Ini menjadi masalah pelik karena jalan itu merupakan satu-satunya jalan yang bisa dilewati. Sehingga para agen berharap pihak Propinsi Kaltara dan Kaltim mau mencari solusi terhadap hal tersebut.

Hal yang tak kalah pentingnya dalam sarana prasarana penunjang pendistribusian LPG 3 Kg adalah jumlah pangkalan yang dimiliki para agen. Pangkalan merupakan titik serah LPG 3 Kg langsung ke konsumen akhir. Agen PT. Makbul memiliki jumlah pangkalan paling banyak, kemudian PT. Mitra Brilian Mandiri, dan diikuti oleh 2 agen pembantuan dari Samarinda (PT. Badjuber Bersaudara dan PT. Tri Pribumi Sejati). Berikut sebaran pangkalan para agen:

Tabel 4.11
Sebaran Pangkalan LPG 3 Kg di Wilayah Kabupaten Bulungan

No	Nama Agen	Sebaran Pangkalan LPG 3 Kg										Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	PT. Makbul	0	1	1	4	4	58	9	2	0	0	**79**
2	PT. Mitra Brilian M.	0	0	0	2	1	23	7	1	1	0	**35**
3	PT. Badjuber B.	0	0	1	1	3	11	0	1	0	0	**17**
4	PT. Tri Pribumi S.	0	0	0	1	1	5	2	0	0	0	**9**
	TOTAL	0	1	2	8	9	97	18	4	1	0	140

Sumber: diolah, Tahun 2016

Ket:
1. Peso
2. Peso Hilir
3. Tg. Palas Barat
4. Tg. Palas Utara
5. Tg. Palas Timur
6. Tg. Selor
7. Tg. Palas
8. Tg. Palas Tengah
9. Sekatak
10. Bunyu

Pada Tabel 4.11, terlihat bahwa sebaran pangkalan perkecamatan paling banyak di Kecamatan Tanjung Selor sebanyak 97 pangkalan, kemudian kecamatan Tanjung Palas sebanyak 18 pangkalan, Tanjung Palas Timur

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

9 pangkalan, Tanjung Palas Utara 8 pangkalan dan seterusnya. Hal ini tentulah wajar jika sebaran pangkalan lebih banyak di daerah yang penduduknya padat dan memang Tanjung selor menurut data TNP2K merupakan kecamatan dengan jumlah rumah tangga miskin paling besar, diikuti kecamatan Tanjung Palas, Sekatak dan Peso Hilir. Namun ketika dipertanyakan kepada Kepala Bidang Perdagangan apakah sebaran ini sudah proporsional dengan jumlah rumah tangga miskin dan usaha mikro terutama pangkalan yang berada di Kecamatan Tanjung Selor? Menurut penuturan Kepala Bidang Perdagangan, Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Bulungan, memang sebaran pangkalan kurang proporsional, seharusnya tidak menumpuk di Kecamatan Tanjung Selor, mempertimbangkan jarak dan kemudahan konsumen untuk membeli. Lalu kira- kira berapa idealnya jumlah pangkalan di Kecamatan Tanjung Selor? Ia menuturkan bahwa dengan mempertimbangkan alokasi untuk agen yang rata-rata 100, 200, hingga 300 perbulan maka idealnya jumlah pangkalan di Kecamatan Tanjung Selor 36 hingga 72 pangkalan. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa Pemda sudah mengarahkan para agen untuk membuka pangkalan di kecamatan-kecamatan terutama yang minim bahkan belum ada pangkalan dan juga daerah-daerah transmigrasi, atau yang terisolir, namun sejauh ini belum ada penambahan untuk pangkalan diluar Kecamatan Tanjung Selor.

Ketika hal ini disampaikan ke Agen PT. Mitra Brilian Mandiri, salah satu yang membuat sulitnya pangkalan di luar Tanjung Selor adalah syarat bagi pangkalan untuk memiliki tabung yang banyak kisaran 100 hingga 200 tabung selain itu pemohon untuk menjadi pangkalan sebaiknya lebih dari 1 atau 2

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pangkalan sehingga dapat menghemat biaya pendistribusian ke pangkalan-pangkalan tersebut karena di drop sekaligus.

Dari pembahasan sub variabel sumber daya menunjukkan bahwa pemahaman sumber daya manusia atau pelaksana kebijakan sudah memadai terhadap tujuan dan sasaran kebijakan namun dari sisi kelompok sasaran yang tidak dipertegas dengan suatu keputusan yang disepakati oleh setiap orang, terlebih pelaksana kebijakan, maka standar dan sasaran akan menjadi bias. Kemudian dari aspek finansial atau dukungan anggaran bagi pengawasan jika masih bisa diintegrasikan dengan kegiatan monev lainnya dan melibatkan tim dari kecamatan bisa mengefisienkan anggaran dan menambah jadwal pengawasan yang dirasa perlu lebih dari sekali dalam setahun. Sedangkan dari aspek infrastruktur pendukung pendistribusian seperti SPBBE dan jalan, perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak karena hal tersebut sangat berdampak signifikan terhadap kelancaran pendistribusian LPG 3 Kg, begitu pula dengan keberadaan pangkalan LPG 3 Kg yang penyebarannya harus proporsional dengan jumlah konsumen dan luas wilayah/ jarak.

3) Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana, karakteristik organisasi pelaksana tidak lepas dari struktur birokrasi yang dapat diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang. Aspek yang akan diteliti lebih lanjut dari karakteristik organisasi adalah: *Standard Operating Procedure* (SOP) pendistribusian LPG 3 Kg dan tingkat pengawasan hierarkis terhadap proses pendistribusian LPG 3Kg.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Berdasarkan hasil wawancara dengan Agen PT. Makbul dan PT. Mitra Brilian Mandiri dan dokumen tentang alur proses pendistribusian LPG 3 Kg, maka terdapat beberapa tahapan yang dilalui para agen:

1. penetapan alokasi LPG 3 Kg untuk masing-masing Agen oleh PT. Pertamina (Persero) untuk 3 bulan kedepan atau tiap triwulan ada penetapan alokasi dari PT. Pertamina (Persero) ke Agen LPG 3 Kg..
2. Agen melakukan penebusan di Bank untuk mendapatkan no.SO (*Sales Order*).
3. Aplikasi penebusan Bank kemudian di bawa ke Pertamina untuk mendapatkan LO (*Loading Order*) sebagai Surat perintah pengisian dari Pertamina ke SPPBE, tetapi jikalau jarak tidak memungkinkan untuk datang ke kantor pencetakan LO pertamina, Aplikasi dapat di Fax ke Pertamina untuk mendapatkan no. DO (*Delivery Order*) yang nantinya akan tertera di *website* Pertamina yang ada di SPPBE.
4. Armada agen datang dengan jumlah tabung (*refill*) sesuai dengan SO dan DO yang telah dipesan.
5. dilakukan pengecekan jumlah tabung dan *Safety Car* armada Agen oleh petugas LK3 di gerbang pertama masuk SPPBE (jika sesuai dengan jumlah SO dan DO/ LO yang tertera pada surat jalan dan memenuhi persyaratan *Safety Car* maka armada Agen diperbolehkan masuk ke area SPPBE).
6. Sopir armada Agen menyerahkan surat jalan/ LO pada petugas DO SPPBE untuk mendapatkan SPPP (Surat Pengantar Penyerahan Produk) dimana SPPP berfungsi sebagai syarat memasuki area *Filling Hall*.
7. Kemudian SPPP diserahkan kepada petugas Gate *Keeper* untuk diperiksa kemudian dipanggil untuk memasuki kawasan *Filling Hall*.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

8. Setelah memasuki area *Filling Hall* Sopir armada Agen memberikan lembaran SPPP kepada petugas *Filling Hall* sebagai bukti armada Agen tersebut dapat melakukan pengisian (*Refill*) Bulk LPG sesuai dengan banyaknya *Quantity* yang tertera di SPPP.
9. Setelah selesai dilakukan pengisian Bulk LPG di area *Filling Hall*, sopir Agen mengambil lembaran SPPP yang sudah ditandatangani petugas *Filling Hall* dan dibawa kembali ke petugas *Gate Keeper* untuk diperiksa kembali.
10. Setelah diperiksa oleh petugas *Gate Keeper*, maka armada Agen diperbolehkan untuk keluar dari area *Filling Hall* dan mengambil SPP (Surat Pengantar Pengiriman) di petugas DO SPPBE, dimana Fungsi daripada SPP adalah sebagai bukti bahwa pengambilan Bulk LPG di SPPBE telah melakukan prosedur yang benar dan sah, dan juga sebagai bukti dasar untuk dilakukannya penagihan *Transport Fee* dari Agen ke Pertamina.
11. Armada Agen diperbolehkan keluar dari area SPPBE dengan memperlihatkan bukti SPP dan dilakukan pemeriksaan ulang jumlah tabung sesuai atau tidaknya dengan jumlah yang tertera di SPP oleh petugas LK3.

Dari beberapa langkah di atas, merupakan rangkaian yang terjadi diantara organisasi PT. Pertamina (Persero) dan mitra kerjanya, yakni SPPBE dan Agen LPG 3 Kg. Ketika peneliti menanyakan apakah tahapan di atas selalu konsisten dilakukan dan menjadi prosedur baku dalam kegiatan, para agen menyatakan bahwa hal tersebut harus dilalui sebagai tahapan yang wajib bagi para agen bila ingin menebus LPG dan hal ini juga dibenarkan oleh *Sales Representatif* PT. Pertamina (Persero). Bila ada pelanggaran oleh pihak agen atau pihak SPPBE PT. Pertamina (Persero) akan mengenakan sanksi, seperti: pengurangan alokasi,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

penghentian alokasi (*skorsing*), pemberian surat peringatan, hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) dan untuk agen di Bulungan sudah pernah dua agen yang melakukan pelanggaran dalam kasus menjual LPG 3 Kg ke pangkalan LPG resmi di luar batas wilayah pemasaran yang telah ditetapkan, tidak lengkap administrasi, dan menjual LPG diatas HET yang telah ditetapkan.

Selanjutnya setelah LPG diperoleh dari SPPBE akan dibawa ke wilayah operasional masing- masing Agen, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Agen membawa LPG 3 Kg dari SPPBE ke gudang agen dan diverifikasi oleh Tim dari Disperindagkop berapa jumlah LPG yang dibawa, berapa yang rusak, kosong, dan dituangkan dalam berita acara.
2. Setelah diverifikasi oleh tim dari Disperindagkop, maka Agen akan mendistribusikan LPG ke pangkalan-pangkalan dan menjualnya dengan harga tebus untuk di wilayah Kecamatan Tanjung Selor Rp 21.000/ tabung.
3. Pangkalan akan menukarkan tabung yang kosong dengan tabung isi dan membayar dengan sistem cash.
4. Pangkalan menjual sesuai HET yang telah ditetapkan pemerintah daerah, yakni untuk Kecamatan Tanjung Selor Rp 23.000/ tabung.
5. Setiap pangkalan dalam menjalankan usahanya wajib juga melengkapi dan memasang papan nama pangkalan, serta mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan memasangnya ditempat yang mudah diketahui masyarakat.

Dari beberapa tahapan di atas, peneliti mempentanyakan kepada pihak pemda apakah verifikasi selalu dilakukan sesuai dengan prosedur? Pihak pemda dalam hal ini diwakili oleh Kepala Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Bulungan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

menuturkan bahwa memang verifikasi sangat jarang dilakukan dan pihak agen banyak yang merapel berita acara dalam satu waktu sekaligus. Seharusnya pihak agen mengabari apabila mereka telah sampai di wilayah Bulungan sehingga Pemda bisa mempersiapkan personil. Ketika hal ini dikonfrimasi ke pihak agen, pihak agen berpendapat bahwa kesulitan jika harus menghubungi diluar jam kantor, semisal mereka sampai ke gudang malam hari. Ketika peneliti mempertanyakan apakah pihak Pemda tidak bertindak tegas atas hal tersebut? Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop menyatakan bahwa pihaknya telah menegur agen yang tidak tertib dalam hal verifikasi namun karena aturan ini tidak tertulis secara tegas dan hanya berupa kesepakatan rapat, maka Pemda tidak dapat berbuat banyak.

Berdasarkan informasi di atas, dapat menunjukkan bahwasannya *Standard Operating Prosedure* (SOP) di lingkungan organisasi bisnis, PT. Pertamina (Persero) dan mitra bisnisnya cukup jelas ketentuan dan sanksi yang diberikan. Pelaksanaan ketentuan dapat dikatakan konsisten penerapannya, jikapun ada pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan. Hal lain yang menjadikan PT. Pertamina (Persero) berlaku ketat dan tegas terhadap aturan adalah kegiatan pendistribusian LPG 3 Kg ini dipantau dan selalu diperiksa oleh pihak BPK sehingga mereka harus melakukan akuntabilitas dan profesionalitas kerja yang baik.

Sedangkan dari prosedur yang harus dilakukan oleh pihak Pemda tidak berjalan sesuai SOP yang semestinya, hal ini dikarenakan dasar hukum untuk melakukan SOP kurang kuat semestinya diperkuat dengan surat keputusan kepala daerah/ kepala dinas yang disertai dengan sanksi yang tegas. Tanpa aturan yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

tegas ada kecenderungan para personil tim bersikap permisif pada pelanggaran yang dilakukan para agen.

4) Komunikasi antar Organisasi Terkait dan Kegiatan Pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu *(implementors)*. Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam *(consistency and uniformity)* dari berbagai sumber informasi. Dalam penelitian ini, aspek yang akan diteliti lebih lanjut adalah: kejelasan, konsistensi, dan keseragaman atas standar dan tujuan.

Dalam pembahasan sub variabel komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksana ada kaitannya dengan pembahasan sub variabel sebelumnya, yakni variabel standar dan tujuan kebijakan yang mengindikasikan bahwa standar dan tujuan kebijakan subsidi mengalami penyimpangan dan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya, yakni pada penentuan kelompok sasaran penerima. Menurut Permen ESDM No. 26 Tahun 2009, Pasal 18 ayat 1:

> *"Pendistribusian LPG tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG kepada Pengguna LPG tertentu untuk rumah tangga dan usaha mikro yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri".*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Kriteria kelompok sasaran rumah tangga dan usaha mikro adalah sebagai berikut:

1. Rumah tangga yang yang mempunyai pengeluaran < 1,5 juta/ bulan.
2. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Kompleksitas dan kerumitan dalam memvalidasi konsumen pengguna LPG 3 Kg serta keterfokusan pada upaya mengkonversi penggunaan minyak tanah ke gas mengaburkan kriteria miskin dan usaha mikro. Hal ini juga pernah dikemukakan oleh Pelaksana tugas Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan, ia menuturkan bahwa pemerintah menemukan adanya inefisiensi yaitu banyak masyarakat yang menggunakan LPG 3 Kilogram, bukanlah mereka yang tergolong miskin. Angka subsidi LPG yang tahun ini diterapkan Rp 28 triliun, jika dihitung berdasarkan jumlah masyarakat miskin, seharusnya dapat ditekan menjadi Rp 15-16 triliun.

Anggapan telah terjadinya salah sasaran penerima subsidi LPG 3 Kg juga ditengarai oleh pengamat energi Sofyano Zakaria, menurutnya ketidakjelasan Peraturan Menteri ESDM No. 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG 3 Kg mengakibatkan berpindahnya preferensi pengguna tabung gas 12 Kg ke tabung LPG 3 Kg. Sofyano menilai Permen tersebut tidak tegas menyatakan siapa yang berhak menggunakan LPG 3 Kg dan hanya boleh untuk kegiatan apa.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa ketidakjelasan standar dan tujuan bukan hanya terjadi di lingkup lokal Kabupaten Bulungan, namun hampir bersifat nasional. Namun dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan ada berbagai usaha yang dilakukan untuk meluruskan salah arah dan ketidakjelasan selama ini dalam penentuan kelompok sasaran, diantaranya:

1. Dalam berbagai kesempatan seperti rapat dan pertemuan Tim koordinasi pendistribusian LPG 3 Kg, selalu diingatkan bahwa LPG 3 Kg hanya untuk rumah tangga miskin dan usaha mikro. Hal ini untuk menyamakan persepsi semua pihak pelaksana kebijakan.
2. Berbagai himbauan di media massa bahwa sasaran kebijakan subsidi LPG 3 Kg hanya untuk rumah tangga miskin dan usaha mikro. Hal ini bertujuan agar pesan yang ingin disampaikan bisa diketahui dan difahami oleh seluruh masyarakat luas, baik yang menjadi pelaksana kebijakan, kelompok sasaran kebijakan atau yang tidak menjadi sasaran kebijakan.
3. Penambahan tulisan "Hanya untuk masyarakat miskin" pada tabung LPG 3 Kg.

Dari berbagai upaya di atas, masih terdapat kekurangan sehingga komunikasi yang terjadi melalui berbagai media tidak efektif, hal ini disebabkan perkembangan ilmu komunikasi saat ini menyatakan bahwa komunikasi disebut efektif manakala pesan yang disampaikan komunikator bukan saja bisa diterima pembaca dengan jelas, melainkan juga mempengaruhi dan dilaksanakan komunikan (Simon, 2001)

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

sebenarnya akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat-pejabat tinggi (atasan) untuk mendorong pelaksana (pejabat-pejabat bawahan) bertindak dalam suatu cara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan. Hal ini disebabkan pejabat dalam struktur organisasi mempunyai kekuasaan personil, memiliki kontrol atas alokasi anggaran, kewenangan untuk menanggapi pencapaian kebijakan yang memuaskan atau tidak memuaskan, dan mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku bawahan.

Sehingga kelemahan dari upaya pembentukkan opini pelaksana maupun opini publik yang dilakukan di Kabupaten Bulungan salah satunya terletak pada tidak adanya keputusan tertulis setingkat Bupati atau Kepala Dinas/ Instansi terkait yang jelas dan tegas mengatur standar dan tujuan kebijakan subsidi. Kemudian himbauan kepala daerah yang spesifik untuk melarang kelompok tertentu untuk tidak melakukan hal yang bertentangan dengan ketentuan kebijakan juga perlu dilakukan, apalagi bila disinyalir kelompok tersebut merupakan kelompok pengguna yang cukup besar jumlahnya, misal himbauan melarang PNS, restoran dan hotel untuk menggunakan LPG 3 Kg.

5) Sikap para Pelaksana

Sikap dan arah disposisi para pelaksana *(implementors)* terhadap standar dan tujuan kebijakan merupakan hal yang *"crucial"*. *Implementors* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Meter dan Van Horn, 1974). Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kebijakan (Kaufman dalam Van Meter dan Van Horn, 1974). Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana *(implementors)* dapat mempengaruhi pelaksana *(performance)* kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

Dalam kaitannya dalam penelitian ini, sikap para pelaksana akan diteliti lebih lanjut dari aspek: persepsi pelaksana terhadap kebijakan (pemahaman atas tujuan, target, dan sasaran kebijakan), arah respon pelaksana apakah menerima, netral, atau menolak, dan intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman atas tujuan, target, dan sasaran kebijakan oleh para pelaksana kebijakan sudah sempat disinggung dalam pembahasan sebelumnya. Pemahaman para pelaksana dari pihak birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan sudah cukup baik namun karena tidak ada aturan tertulis atau keputusan tertulis mengenai standar dan sasaran kebijakan yang jelas dan tegas, maka persepsi, sikap dan perilaku para pelaksana seakan bertentangan dengan kebijakan yang ada. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh prof. Budi Winarno, kelompok-kelompok manusia menemui kesulitan untuk melaksanakan tindakan-tindakan secara efektif karena mereka tidak mempunyai kepercayaan-kepercayaan yang mendasari tindakan-tindakan tersebut. Sebagai contoh kasus yang telah disinggung sebelumnya, dimana proses verifikasi kedatangan tabung dari SPPBE harus dihadiri oleh personil dari pemda sering tidak terlaksana. Salah satu alasannya tidak ada aturan tertulis yang jelas dan tegas yang juga mengatur sanksi atas pelanggaran hal tersebut.

Sedangkan dari sikap para pelaksana, agen LPG 3 Kg, mereka akan mempunyai sikap dan ketaatan atas kebijakan juga dipengaruhi oleh sumberdaya-

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

sumberdaya yang ada seperti: intensitas dan kualitas kontrol baik dari PT. Pertamina (Persero), Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Dalam pembahasan sebelumnya, sempat disinggung bahwa intensitas dan kualitas kontrol yang dilakukan oleh semua *stakeholder* masih lemah sehingga berpengaruh pada ketaatan para agen, namun disatu sisi, sanksi yang tegas dari PT. Pertamina (Persero) terhadap dua agen yang ada di Bulungan sempat menjadi *shock therapy* bagi agen lainnya, seperti yang disampaikan oleh salah satu agen LPG 3 Kg:

> *"jangan sampai kena penalty dari pertamina, kalau sampai kena, akan susah kedepannya, nama perusahaan jadi tercemar, jadi sorotan bagi agen-agen lain dan pemda juga dan yang jelas mengganggu pemasukan bagi agen karena ada pengurangan alokasi atau penghentian alokasi atau bahkan pemutusan hubungan usaha. Padahal yang melakukan itu oknum tanpa sepengetahuan pimpinan".*

Dari informasi di atas menunjukkan bahwa aturan yang tegas dan dilaksanakan secara konsisten mampu mengarahkan sikap dan perilaku pelaksana sesuai dengan aturan kebijakan. Selain itu, adanya aturan yang jelas dan tegas dan dilaksanakan secara konsisten mampu mendorong pembentukan opini, persepsi, sikap dan perilaku para pelaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang dibuat.

6) Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, merupakan lingkungan eksternal yang turut mendorong keberhasilan suatu kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik akan diteliti lebih lanjut dari aspek: perubahan harga BBM subsidi, perubahan harga barang substitusi (LPG 12 kg)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

yang dapat memicu preferensi yang bukan kelompok sasaran kebijakan subsidi LPG 3 Kg, kepatuhan masyarakat dan dukungan politik.

Dari beberapa hasil wawancara dengan kelompok pengguna LPG 3 Kg yang bukan dari kelompok sasaran kebijakan, dapat diketahui beberapa hal yang menjadi pendorong mereka menggunakan LPG 3 Kg:

1. Mereka menggunakan LPG 3 Kg karena diawal program konversi minyak tanah ke LPG mendapatkan paket gratis tabung isi, kompor dan regulator. Mereka merasa tidak ada yang salah bila menggunakan LPG 3 Kg untuk seterusnya.
2. Setelah program konversi terlaksana, harga minyak tanah melambung karena sudah ditarik subsidinya, sehingga mau tidak mau mereka mencari harga bahan bakar yang murah, yaitu LPG 3 Kg.
3. Kenaikan harga gas tabung 12 Kg yang makin lama cenderung naik sehingga disparitas harga antara LPG 3 Kg dengan LPG 12 Kg semakin jauh.

Berikut tabel perbandingan harga LPG 3 kg dengan LPG 12 kg di Kecamatan Tanjung Selor yang mempunyai disparitas harga yang cukup signifikan.

Tabel 4.12
Perbandingan Harga LPG 3 Kg dengan LPG 12 Kg
Di Wilayah Kecamatan Tanjung Selor

NO	Jenis LPG	Harga Standard (Rp)	Harga/ Kg (Rp)	Selisih Harga/ Kg (Rp)
1.	LPG 3 Kg	23.000	7.666	8.167
2.	LPG 12 Kg	190.000	15.833	

Sumber: Olahan peneliti, Tahun 2016

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Pada Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa harga LPG 3 Kg adalah Rp 23.000/ tabung maka harga perkilogramnya adalah Rp 7.666. Sedangkan harga LPG 12 Kg adalah Rp 190.000/ tabung sehingga harga perkilogramnya adalah Rp 15.833. Dengan demikian dapat diketahui perbedaan antara LPG 3 Kg dengan LPG 12 Kg perkilogramnya sangat signifikan, yaitu Rp 8.167. Kemudian untuk memudahkan ilustrasi perbandingan daya beli konsumen terhadap produk LPG 3 kg dengan LPG 12 kg, berikut ilustrasinya dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.13
Perbandingan Daya Beli Nominal Tertentu terhadap
LPG 3 Kg dan LPG 12 Kg
Di Wilayah Kecamatan Tanjung Selor

Nominal Yang Dimiliki Konsumen (Rp)	Jenis LPG	Harga LPG/ Tabung (Rp)	Harga LPG/ Kg (Rp)	LPG yang dapat dibeli
190.000		23.000	7.666	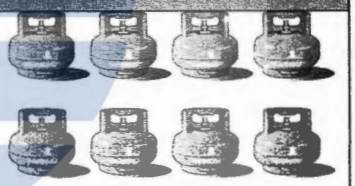
190.000		190.000	15.833	

Sumber: Olahan peneliti, Tahun 2016

Pada Tabel 4.13 untuk memudahkan ilustrasi, menggunakan nominal tertentu yang dimiliki konsumen dapat diketahui bahwa dengan uang sebesar Rp 190.000 yang dimiliki konsumen, maka ia hanya mampu membeli satu tabung isi LPG 12 Kg, sedangkan bila uang tersebut digunakan untuk membeli LPG 3 Kg, akan memperoleh delapan tabung isi LPG 3 Kg. Perbedaan harga

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

yang signifikan tersebut tentulah menjadi salah satu faktor pendorong berpindahnya preferensi kelompok yang bukan sasaran kebijakan subsidi LPG 3 Kg untuk menggunakan LPG 3 Kg dibandingkan menggunakan LPG 12 Kg. Hal ini juga sejalan dengan teori perilaku konsumen yang berkembang akhir-akhir ini yang didasarkan pada kebutuhan ekonomi, yakni: menjelaskan bahwa seseorang konsumen akan menetapkan kuantitas komoditas yang dikonsumsi dengan cara memaksimumkan kepuasan (utilitas). Pada saat menentukan kuantitas tersebut, konsumen dihadapkan pada kendala pendapatan dan harga komoditas. Selain itu, menurut David Friedman (2006) menjelaskan bahwa konsumen adalah orang yang rasional yang mempertimbangkan keterbatasan anggaran, harga barang, dan selera. Sehingga perilaku konsumen akan dipengaruhi oleh pendapatan, harga barang tersebut dan juga harga barang substitusi. Pada saat pendapatan menurun, maka preferensi konsumen akan mengarah pada harga barang yang lebih murah, begitu juga pada saat harga barang dalam hal ini LPG 3 Kg lebih murah dari pada LPG 12 Kg (barang substitusi) maka preferensi konsumen lebih kepada LPG 3 Kg.

4. Inflasi/ kenaikan harga kebutuhan pokok secara umum memicu mereka untuk mencari alternatif pilihan kebutuhan dengan harga murah.
5. Kemudahan untuk membawa tabung LPG 3 Kg dari pada LPG 12 Kg karena berat tabung full LPG 3 Kg adalah 8 Kg, masih mudah dibawa oleh para ibu dibandingkan dengan LPG 12 Kg dengan bobot full 27 Kg.
6. Jarangnya ditemukan *service*/ pelayanan antar dan pasang LPG 12 Kg ke rumah pelanggan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Dari informasi di atas menunjukkan bahwa yang mendorong kelompok bukan sasaran kebijakan menggunakan LPG 3 Kg adalah ketidakjelasan aturan, disparitas harga LPG subsidi dengan non subsidi, tingkat inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, *portability product* (kemudahan untuk memindahkan barang), serta *service* penjualan LPG 12 Kg yang tidak memuaskan.

Lingkungan sosial yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan subsidi LPG 3 Kg dapat dilihat salah satunya dari tingkat kesadaran masyarkat untuk mematuhi aturan yang ada. Dari hasil pembahasan sub variabel sebelumnya (Komunikasi antar organisasi terkait, sikap dan arah disposisi pelaksana) menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat relatif rendah dalam mematuhi aturan kebijakan yang ada dikarenakan beberapa hal, yaitu:

1. Aspek komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan tidak berjalan secara efektif. Hal ini dapat terlihat dari tidak adanya kejelasan atas standar dan tujuan yang merupakan pesan/ informasi yang sangat penting untuk disampaikan kepada seluruh *stakeholder* sehingga berpengaruh negatif pada konsistensi dan keseragaman informasi yang akan disampaikan kepada semua pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat. Informasi yang bias akan berpengaruh pada pemahaman, sikap, dan perilaku seseorang yang juga menentukan tingkat ketaatan pada suatu aturan.
2. Sikap dan arah disposisi implementator yang tidak mendukung kebijakan. Bila sikap dan arah disposisi implementator yang tidak sejalan dengan kebijakan, masyarakat akan cenderung menjadi tidak taat kepada aturan,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

karena pemerintah yang sejatinya membuat suatu kebijakan dan mengimplementasikannya malah tidak mendukung kebijakan itu sendiri.

3. Penegakan hukum (*law enforcement*) yang lemah sehingga tidak ada efek jera bagi pihak yang melanggar aturan.

Sedangkan lingkungan politik yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan subsidi LPG 3 Kg dapat dilihat dari kemauan politik (*political will*) dari pemerintah yang belum serius untuk merevisi kebijakan yang sudah tidak sesuai dengan realitas yang ada di masyarakat, antara lain:

1. penetapan kelompok sasaran kebijakan LPG 3 Kg terutama masyarakat miskin yang belum terintegrasi pengelolaanya dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan/ program subsidi lainnya;
2. Minimnya pengaruh/ tekanan dari DPRD, LSM, dan lembaga lainnya dalam mengawasi implementasi kebijakan subsidi LPG 3 Kg dan sumbang saran untuk perubahan Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg yang lebih baik;
3. Dukungan kepala daerah dalam bentuk himbauan-himbauan yang diperlukan sesuai kondisi yang terjadi di masyarakat.

Dari ketiga poin di atas, poin 1 dan 2 lebih menjadi bahan pembahasan dalam skala nasional karena kebijakan tersebut bersifat *Top-Down* sedangkan poin 3 lebih menjadi kewenangan daerah disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di masyarakatnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan subsidi LPG 3 kg di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan belum berjalan secara optimal. Belum adanya ketegasan dalam standard alokasi dan kelompok sasaran kebijakan menjadikan aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan kebijakan menjadi tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dari penerima subsidi yang tidak tepat sasaran dan harga LPG 3 kg yang kerap di atas Harga Eceren Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
2. Permasalahan yang dihadapi dalam Implementasi kebijakan subsidi LPG 3 kg di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut:
   a. **Standard dan Sasaran Kebijakan/ Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

      Dalam menentukan kelompok sasaran kebijakan tidak ada kejelasan dan ketegasan, penentuan alokasi kebutuhan juga demikian, tidak menggunakan standard yang semestinya, yaitu rumah tangga miskin dan usaha mikro. Sedangkan dari segi Harga Eceran Tertinggi (HET) dilakukan dengan melihat perbandingan dengan daerah Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang lain. Disparitas harga yang ada memicu aksi penyelundupan.

   b. **Sumber Daya**

      Pemahaman sumber daya manusia atau pelaksana kebijakan sudah memadai terhadap tujuan dan sasaran kebijakan, namun dari sisi kelompok

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43214

sasaran tidak dipertegas dengan suatu keputusan yang disepakati oleh setiap orang, terlebih pelaksana kebijakan, sehingga standard dan sasaran menjadi bias. Kemudian dari aspek finansial atau dukungan anggaran bagi pengawasan masih belum memadai baik dari segi kuantitas dan kualitas.

Aspek infrastruktur pendukung pendistribusian seperti SPBBE dan infrastruktur jalan, perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak karena hal tersebut sangat berdampak signifikan terhadap kelancaran pendistribusian LPG 3 kg, begitu pula dengan keberadaan pangkalan LPG 3 kg yang penyebarannya belum proporsional dengan jumlah konsumen dan luas wilayah/ jarak.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Standard Operating Prosedure (SOP) di lingkungan organisasi bisnis, PT. Pertamina (Persero) dan mitra bisnisnya cukup jelas ketentuan dan sanksi yang diberikan. Pelaksanaan ketentuan dapat dikatakan konsisten penerapannya. Hal lain yang menjadikan PT. Pertamina (Persero) berlaku ketat dan tegas terhadap aturan adalah kegiatan pendistribusian LPG 3 kg ini dipantau dan selalu diperiksa oleh pihak BPK sehingga mereka harus melakukan akuntabilitas dan profesionalitas kerja yang baik.

Sedangkan dari prosedur yang harus dilakukan oleh pihak Pemda, tidak berjalan sesuai SOP yang semestinya. Hal ini dikarenakan dasar hukum untuk melakukan SOP kurang kuat, hanya sebatas kesepakatan rapat.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

d. Komunikasi antar Organisasi Terkait dan Kegiatan Pelaksanaan

Aspek komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan secara umum tidak berjalan secara efektif, tidak adanya kejelasan atas standar dan tujuan yang merupakan pesan/ informasi yang sangat penting untuk disampaikan kepada seluruh *stakeholder*. Ketidakjelasan tersebut berpengaruh negatif pada konsistensi dan keseragaman informasi yang akan dan telah disampaikan kepada pihak- pihak yang berkepentingan.

e. Sikap para Pelaksana

Pemahaman para pelaksana dari pihak birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Bulungan sudah cukup baik, namun karena tidak ada aturan tertulis atau keputusan tertulis mengenai standard dan sasaran kebijakan yang jelas dan tegas, maka persepsi, sikap dan perilaku para pelaksana seakan tidak sejalan dengan kebijakan yang ada.

Para pelaksana agen LPG 3 kg mempunyai sikap dan ketaatan atas kebijakan yang dipengaruhi oleh sumber daya yang ada seperti: intensitas dan kualitas kontrol baik dari PT. Pertamina (Persero), Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa intensitas dan kualitas kontrol yang dilakukan semua *stakeholders* masih lemah sehingga berpengaruh pada ketaatan para agen, pangkalan dan masyarakat.

f. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Beberapa hal yang mendorong kelompok bukan sasaran kebijakan menggunakan LPG 3 kg dari aspek lingkungan ekonomi adalah ketidakjelasan aturan, disparitas harga LPG subsidi dengan non subsidi, tingkat inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, *portability product*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

(kemudahan untuk memindahkan barang), *service* penjualan LPG 12 kg yang tidak memuaskan. Aspek lingkungan sosial dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada karena kurangnya sosialisasi dan informasi yang jelas, seragam dan benar terkait kebijakan subsidi LPG 3 kg, sikap dan arah disposisi implementator yang tidak mendukung kebijakan, penegakkan hukum (*law enforcement)* yang lemah. Ditinjau dari spek politik, pemerintah belum serius merevisi kebijakan yang ada agar sesuai dengan realitas yang ada di masyarakat serta minimnya pengaruh dan tekanan dari kelompok- kelompok berpengaruh seperti DPR, DPRD, LSM dan kelompok masyarakat lainnya.

B. SARAN

1. Saran Praktis

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan seyogyanya memiliki acuan yang jelas dan tegas dalam menentukan kelompok sasaran kebijakan dan penentuan alokasi kebutuhan LPG 3 kg. Penentuan kelompok sasaran dari kebutuhan LPG 3 kg/penentuan kuota LPG 3 kg mengikuti standar yang jelas, didukung data yang valid dan telah diverifikasi instansi berwenang. Acuan tersebut lebih lanjut dapat dikemas dalam bentuk: Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, atau Keputusan Kepala Dinas/ Instansi terkait. Aturan yang jelas dan tegas tersebut disinyalir mampu mengarahkan sikap dan perilaku para pelaksana kebijakan sejalan dengan standard, tujuan dan sasaran kebijakan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43214

b. Lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan dalam implementasi kebijakan subsidi LPG 3 kg di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, memperhatikan berbagai hal sebagai berikut:

1). Meningkatkan kelancaran arus distribusi LPG 3 kg ke wilayah Kabupaten Bulungan dengan mendorong pihak PT. Pertamina untuk merealisasikan SPPBE LPG 3 kg yang selama ini mangkrak, berkoordinasi dengan instansi terkait untuk dapat meningkatkan kualitas infrastruktur jalan yang ada di Kalimantan khususnya daerah perbatasan Berau dan Bulungan yang kerap kali rusak dan menghambat arus distribusi LPG 3 kg. selain itu, pemda bersama-sama dengan pihak agen dan PT. Pertamina (Persero) mengatur ulang sebaran pangkalan LPG 3 kg yang ada agar proporsional dengan jumlah konsumen dan luas wilayah/ jarak.

2). Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan pendistribusian LPG 3 kg dengan beberapa cara, antara lain menggunakan *standard operating procedure* dalam setiap tahapan kegiatan pendistribusian LPG 3 kg, mengintegrasikan kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan Tim, misal melakukan pengawasan dan pencarian informasi mengenai penerapan HET LPG 3 kg di pangkalan-pangkalan dari kegiatan formal maupun informal, penerapan *reward* dan *punishment* secara tegas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan pendistribusian LPG 3 kg.

3). Kepala Daerah perlu mengeluarkan himbauan yang spesifik untuk melarang kelompok tertentu agar tidak melakukan hal yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

bertentangan dengan ketentuan kebijakan, misal menghimbau agar PNS, restoran dan hotel dilarang menggunakan LPG 3 kg. Hal ini menjadi urgen karena disinyalir kelompok tersebut merupakan kelompok pengguna yang cukup besar jumlahnya dan hal ini dianggap mampu untuk membentuk opini publik yang solid.

4). Untuk mengatasi migrasi kelompok yang bukan sasaran kebijakan karena lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, maka pemerintah pusat dan daerah harus mampu menekan tingkat inflasi, menjaga harga migas stabil dengan proses bisnis yang efektif dan efesien, memberi perlakuan agar disparitas harga LPG 3 kg (subsidi) dan LPG non subsidi tidak signifikan, mengeluarkan variasi produk LPG dalam kapasitas yang beragam sehingga masyarakat mempunyai pilihan, serta mengembangkan potensi energi altenatif yang tersedia seperti: briket batu bara, briket biomassa, dan jaringan gas alam sehingga diversifikasi bahan bakar dapat menjadi solusi mengatasi kelangkaan bahan bakar.

5). Memberi masukan pada pemerintah pusat untuk mengkaji ulang kebijakan subsidi LPG 3 kg yang dirasa semakin lama semakin banyak kelemahan dan kekurangannya. Diharapkan dengan kebijakan yang baru, menjadi dasar yang lebih baik dalam tahapan selanjutnya.

2. Saran Teoritis

a. Diharapkan ada penelitian pada objek penelitian yang sama dengan menggunakan metodologi penelitian dan teknik pengumpulan data yang berbeda.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

b. Diharapkan bagi yang hendak melakukan penelitian tentang Subsidi LPG 3 kg, dapat melakukan kajian dari permasalahan, sudut pandang, dan teori yang berbeda atau menggunakan variabel penelitian yang berbeda, sehingga dapat memperluas khasanah pengetahuan bagi si peneliti dan pembaca.

c. Sumber referensi yang terkait secara langsung dengan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini masih sangat kurang. Oleh karena itu, diharapkan bagi yang hendak melakukan penelitian menggunakan objek dan variabel penelitian yang sama agar lebih memperbanyak lagi sumber-sumber dan referensi yang akurat terkait dengan permasalahan yang diangkat.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku:

Agustino, Leo. 2008. *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

BPS & Bappeda Kabupaten Bulungan. 2016. *Data Pembangunan Kabupaten Bulungan*: BPS Kabupaten Bulungan.

BPS. 2016. *Statistik Daerah Kecamatan Tanjung Selor*: BPS Kabupaten Bulungan

Dunn, W. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.*

Edward III, George C.1980. *Implementing Public Policy.*Washington DC: Congresional Quarterly Press.

Friedman, T. 2006 (revised edition). *The World is Flat: The Globalized World in The Twenty First Century*. Penguin Books, London

Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014.*Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edition 3*. USA : Sage Publications.

Moleong, L.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Muhammad, A. *2007. Komunikasi Organisasi*. Jakarta. Bumi Aksara.

Nugroho, R. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Purwanto, Erwan A. dan Dyah R.S. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, cetakan ke-2*. Yoyakarta: Gava Media.

Rusli, B. 2013. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*: Bandung: Hakim Publishing

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, cetakan ke-10*. Bandung: Alfabeta.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Suwitri, S. & Hartuti P. Kismartini. 2014. *Analisis Kebijakan Publik.* Banten: UT

Subarsono, A.G.2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep. Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sulaeman, A.1998. *Public Policy, Kebijakan Pemerintah.* Bandung: Kerjasama UNPAD- IIP.

Sutopo, H.B. 2006, *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Surakarta: UNS Press.

Simon, R. 2001. *Gagasan- Gagasan Politik Gramsci.* Cetakan III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Insist.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung: AIPI Bandung.

Tangkilisan, H. N.2003. *Implementasi Kebijakan Publik. Transformasi Pikiran George Edwards.* Yogyakarta: Andi Offset

Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. 1974. *The Policy Implementation Process* : A Conceptual framework." Administration And Society. February

Wahab, S.A. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.* Jakarta: Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra.1994. *Evaluasi Kebijakan Publik.* Jakarta : PT Raja Grafindo.

Winarno, B. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses, cetakan ke-1.* Yogyakarta: Media Presindo.

B. Jurnal- Jurnal:

Vikalista, E.(2012). Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG (Liquified Petroleum Gas) di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintah Lokal, Volume I Edisi 2, Juli- Desember 2012*

Ahiwan (2011). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Permasalahannya di Kabupaten Melawi. TAPM MAP. UT.

Dungtji, M. 2013. Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

C. Rujukan Elektronik:

Munawar, D.(2013). Perkembangan Belanja Subsisdi. Diambil 10 Oktober 2016, dari situs World Wide Web: http://www.bppk.depkeu.go.id/berita-cimahi

Wiratmaja, IGN. (2016). Direktur Jenderal Minyak & Gas Bumi. Kebijakan LPG 3 Kg. Diambil 27 Oktober 2016. https://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_indonesia_lpgwkshop_wirat.pdf

Konversi Mitan Gas. Diambil 4 Oktober 2016, dari situs Kementrian ESDM Republik Indonesia: http://www.migas.esdm.co.id

Soda, E.(2015). Perlunya Pengaturan Tegas Terkait LPG 3 Kg. Diambil 2 Oktober 2016: http://www.tambang.co.id/perlunya-pengaturan-tegas-terkait-lpg-3-kg-2686/

http://www.energitoday.com/2016/09/berikut-ini-paparan-plt-menteri-esdm-soal-rapbn-2017-sektor-migas/

http://www.energitoday.com/2016/02/sejak-2007-pertamina-hemat-subsidi-minyak-tanah-rp-19705-t/

http://www.energitoday.com/2014/06/program-konversi-minyak-ke-gas-tak-jelas-arahnya/

D. Perundang- Undangan

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;

Perpres No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg;

Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

NO	DIMENSI/ SUB VARIABEL	INFORMAN						
		1	2	3	4	5	6	7
A. Ukuran, Tujuan dan Sasaran Kebijakan								
1	Apa tujuan kebijakan Perpres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg dan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG 3 kg yang anda fahami?	√	√	√	√	√	√	
2	Siapa saja yang menjadi kelompok sasaran dari kebijakan Subsidi LPG 3 Kg?	√	√	√	√			
3	Apakah Kuota LPG 3 Kg untuk Kabupaten Bulungan telah mencukupi kebutuhan kelompok sasaran dari kebijakan tersebut?	√	√	√	√			
4	Apakah penetapan penerima Subsidi LPG 3 Kg telah sesuai dengan ketentuan yang ada (tepat sasaran)?	√	√	√	√			
5	Bagaimana Realisasi Subsidi LPG 3 Kg di Kabupaten Bulungan dan Kecamatan Tanjung Selor 2 (Dua) Tahun terakhir (2015- 2016)?	√	√	√				

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

NO	DIMENSI/ SUB VARIABEL	INFORMAN						
		1	2	3	4	5	6	7
B. Sumber Daya								
1	Apakah personil/ tim yang terlibat dalam Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg sudah mencukupi, baik dari jumlah dan kualitasnya?	√	√					
2	Apakah dukungan financial sudah memadai terkait kegiatan monev. LPG?	√	√					
3	Bagaimana dengan kondisi infrastruktur pendukung (sarana/ prasarana) yang menunjang kegiatan pendistribusian LPG 3 Kg?	√	√	√				

NO	DIMENSI/ SUB VARIABEL	INFORMAN						
		1	2	3	4	5	6	7
C. Karakteristik Organisasi Pelaksana								
1	Apakah Standard Operating Procedure (SOP) mutlak dilakukan dalam mekanisme pendistribusian LPG 3 Kg?	√	√	√	√			
2	Apakah SOP tersebut konsisten dilakukan? Jika tidak apa alasannya?	√	√	√	√			
3	Bagaimana pengawasan yang dilakukan terkait keputusan- keputusan yang diambil dalam organisasi pelaksana?	√	√					

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

NO	DIMENSI/ SUB VARIABEL	INFORMAN						
		1	2	3	4	5	6	7
D. Sikap para Pelaksana								
1	Apakah Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg saat ini (distribusi terbuka) masih relevan?	√	√					
2	Apa saja yang sebaiknya dibenahi dalam Kebijakan Subsidi tersebut?	√	√					
3	Adakah tindakan atau kebijakan yang diambil untuk mengatasi hal- hal yang diluar perkiraan/ perhitungan dan mengapa hal itu dilakukan?	√	√	√				
4	Secara pribadi adakah kebijakan subsidi yang tidak sesuai dengan pemahaman anda? Dan bagaimana anda meyikapinya?	√	√	√	√			

NO	DIMENSI/ SUB VARIABEL	INFORMAN						
		1	2	3	4	5	6	7
E. Komunikasi Antar Organisasi								
1	Apakah kebijakan subsidi 3 LPG Kg selama ini sudah disosialisasikan dengan baik? Apakah sudah semua elemen yang terlibat mengetahui standard, tujuan, sasaran dari kebijakan tersebut?	√	√					

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

2	Apakah informasi terkait standard, tujuan, sasaran kebijakan Subsidi LPG 3 Kg yang diterima/ difahami dan diberikan: a. Dideseminasi informasi lebih lanjut; b. selalu konsisten; c. jelas; d. Seragam	√	√	√				

NO	DIMENSI/ SUB VARIABEL	INFORMAN						
		1	2	3	4	5	6	7
F. Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik								
1	Apakah perubahan harga BBM mengakibatkan perubahan harga LPG 3 Kg? Bagaimana penjelasannya?	√	√	√				
2	Apakah perubahan harga barang substitusi dalam hal ini harga LPG 12 Kg mendorong perubahan preferensi pemakai tabung 12 Kg ke tabung 3 Kg?	√	√	√	√	√	√	√
3	Apakah ada faktor lain yang menyebabkan Saudara memilih LPG 3 Kg sebagai bahan bakar?							√

Keterangan:
1. Sales Representative (SR) PT. Pertamina (Persero)
2. Tim pengawasan dan pengendalian BBM & LPG 3 Kg
3. Agen LPG 3 Kg
4. Pangkalan LPG 3 Kg
5. Kelompok Sasaran Kebijakan (Rumah Tangga Miskin)
6. Kelompok Sasaran Kebijakan (Usaha Mikro)
7. Pengguna LPG 3 Kg yang bukan kelompok sasaran kebijakan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

LAMPIRAN 2.

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati kegiatan pendistribusian LPG 3 Kg di Agen dan Pangkalan LPG 3 Kg di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, meliputi:

A. Tujuan :

Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi fisik maupun non fisik pelaksanaan pendistribusian LPG 3 Kg di Agen dan Pangkalan LPG 3 Kg di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

B. Aspek yang diamati :

1. Lokasi agen, pangkalan LPG 3 Kg dan SPBBE
2. Lingkungan fisik agen, pangkalan LPG 3 Kg dan SPBBE secara umum
3. Gudang agen dan pangkalan LPG 3 Kg
5. Moda transportasi agen
7. Proses pendistribusian LPG 3 Kg dari agen ke pangkalan
8. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan pendistribusian LPG 3 Kg dari agen ke pangkalan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

LAMPIRAN 3.

TRANSKRIP WAWANCARA

INFORMAN 1: Sales Representative PT. Pertamina (Persero)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
A. Ukuran, Tujuan dan Sasaran Kebijakan		
1	Apa tujuan kebijakan Perpres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg dan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG 3 kg?	• *Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kilogram.* *Pasal 7 ayat (1)* *Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, Menteri menetapkan harga patokan dan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro.* • *Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG* *Pasal 24 ayat (4)* *Dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan marjin yang wajar serta Sarana dan Fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG, Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga ecerah tertinggi (HET) LPG Tertentu untuk Pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub penyalur LPG Tertentu.* *Pasal 32* *Direktur Jenderal melakukan koordinasi dengan Departemen Dalam Negeri atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang meliputi :* *a. Ditaatinya Harga*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

		Eceran Tertinggi (HET) LPG Tertentu di Wilayah Distribusi LPG Tertentu Dari perturan diatas sudah jelas bahwa, pemda provinsi dan kabupaten dapat melakukan penyesuaian HET di masing2 kabupaten sesuai dengan kondisi masyarakat dan daerah serta margin yang wajar.
2	**Siapa saja yang menjadi kelompok sasaran dari kebijakan Subsidi LPG 3 Kg?**	***Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG*** ***Pasal 18 Pendistribusian LPG Tertentu*** ***(1) Pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG kepada Pengguna LPG Tertentu yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.***
3	**Apakah Kuota LPG 3 Kg untuk Kabupaten Bulungan telah mencukupi kebutuhan kelompok sasaran dari kebijakan tersebut?**	***Kuota ditentukan oleh pemerintah pusat dan pemda, secara umum supply lpg ke bulungan sudah sesuai dengan aturan dalam hal jumlah dan pelaksanaannya.*** ***Dibutuhkan kesediaan pemda untuk melakukan penataan Warga yang boleh dan tidak boleh membeli lpg3kg dan beralih menggunakan lpg non subsidi bright gas.***
4	**Apakah penetapan penerima Subsidi LPG 3 Kg telah sesuai dengan ketentuan yang ada (tepat sasaran)?**	***Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG.*** ***Pasal 32*** ***Direktur Jenderal melakukan***

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

		koordinasi dengan Departemen Dalam Negeri atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang meliputi : *Ditaatinya Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tertentu di Wilayah Distribusi LPG Tertentu.* *Pemerintah daerah dibawah departemen dalam negeri melakukan pembinaan dan pengawasan.* *Secara umum pertamina melhat dari daa logbook dan simolek didapatkan daftar Warga yang memebeli masih sesuai aturan yang berlaku. Akan lebih baik jika pemda memiliki alat control tersendiri untuk memonitor penjualan lpg di masyarakat melalui instansi terkit pemda seperti kelurahn , kecamatan.*
5	Bagaimana Realisasi Subsidi LPG 3 Kg di Kabupaten Bulungan dan Kecamatan Tanjung Selor 2 (Dua) Tahun terakhir (2015- 2016)?	*Terjadi peningkatan yang sangat drastic permintaan lpg 3 kg dikarenakan belum ada surat edaran resmi dari pemda ke masyarakat untuk menggunakan produk lpg nons ubsidi bright gas bgi Warga mampu.*
B. Sumber Daya		
1	Apakah personil/ tim yang terlibat dalam Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg sudah mencukupi, baik dari jumlah dan kualitasnya?	*Pertamina menggunakan " Sistem Simolek" dalam sistem monitoring LPG 3 Kg. Sistem ini menggunakan teknologi GPS untuk mengawasi pendistribusian LPG 3 Kg dari agen ke pangkalan dan melakukan uji petik dengan petugas independen. Selain itu pantauan dengan media massa untuk melihat fenomena atau laporan yang terkait dengan pendistribusian LPG 3 Kg selalu dilakukan sebab kami menghandle wilayah Kalimantan dan berpusat di Balikpapan sehingga koordinasi dengan pihak pemda sangat diperlukan terlebih bila terjadi kelangkaan LPG 3 Kg di daerah maka akan dicarikan solusi yang tepat, misal*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

		melakukan operasi pasar. Dalam melakukan operasi pasar tersebut, pertamina melakukan koordinasi dengan pihak pemda dan agen LPG 3 kg terkait jumlah, tempat dan persyaratan administrasi lainnya.
2	Apakah dukungan financial sudah memadai terkait kegiatan monev. LPG?	*Pihak pemda lebih tepat untuk menjawab hal ini.*
3	Bagaimana dengan kondisi infrastruktur pendukung (sarana/ prasarana) yang menunjang kegiatan pendistribusian LPG 3 Kg? bagaimana dengan kelanjutan SPPBE?	*Pendistribusian LPG 3 Kg ke wilayah Bulungan terkadang terkendala kondisi jalan di beberapa titik di daerah berau yang sering mengalami longsor bahkan putus ketika musim hujan tiba. Sedangkan realisasi SPPBE di daerah Tanjung Palas kabupaten Bulungan terkendala masalah keuangan/ permodalan dan saat ini masih dalam proses take over pihak lain.*
C. Karakteristik Organisasi Pelaksana		
1	Apakah Standard Operating Procedure (SOP) mutlak dilakukan dalam mekanisme pendistribusian LPG 3 Kg?	*Ya harus melalui mekanisme sesuai dengan SOP, tiap agen telah kami berikan secara tertulis SOP tersebut.*
2	Apakah SOP tersebut konsisten dilakukan? Jika tidak apa alasannya?	*Tentu saja, bila tidak ada sanksi yang akan diberikan. Seperti dua agen yang ada di Bulungan dimana mereka tidak memenuhi persyaratan administrasi, menjual diatas HET dan melanggar batas wilayah pemasaran yag telah ditetapkan, dalam hal ini keluar dari kabupaten bulungan.*
3	Bagaimana pengawasan yang dilakukan terkait keputusan-keputusan yang diambil dalam organisasi pelaksana?	*Kita selalu berkoordinasi dengan pihak pemda terkait hal pengawasan terhadap pelaksanaan pendistribusian.*
D. Sikap para Pelaksana		
1	Apakah Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg	*Lebih tepat ditujukan ke pemda/ pemerintah*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

	saat ini (distribusi terbuka) masih relevan?	
2	Apa saja yang sebaiknya dibenahi dalam Kebijakan Subsidi tersebut?	*Lebih tepat ditujukan ke pemda/ pemerintah*
3	Adakah tindakan atau kebijakan yang diambil untuk mengatasi hal- hal yang diluar perkiraan/ perhitungan dan mengapa hal itu dilakukan?	*Lebih tepat ditujukan ke pemda/ pemerintah*
4	Secara pribadi adakah kebijakan subsidi yang tidak sesuai dengan pemahaman anda? Dan bagaimana anda meyikapinya?	*Lebih tepat ditujukan ke pemda/ pemerintah*
E. Komunikasi Antar Organisasi		
1	Apakah kebijakan subsidi 3 LPG Kg selama ini sudah disosialisasikan dengan baik? Apakah sudah semua elemen yang terlibat mengetahui standard, tujuan, sasaran dari kebijakan tersebut?	*Pihak pertamina dan pemda sudah melakukan sosialisasi di awal program konversi, apa tujuan dan kelompok sasaran kebijakan ini. Pengawasan tentulah menjadi hal yang mutlak dilakukan agar pendistribusian tepat sasaran.*
2	Apakah informasi terkait standard, tujuan, sasaran kebijakan Subsidi LPG 3 Kg yang diterima/ difahami dan diberikan: a. Dideseminasi informasi lebih lanjut;	*Pihak pemda lebih tepat untuk menjawab hal ini.*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

	b. selalu konsisten; c. jelas; d. Seragam	
E. Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik		
1	Apakah perubahan harga BBM mengakibatkan perubahan harga LPG 3 Kg? Bagaimana penjelasannya?	*Dari skema HET, ongkos angkut atau transport fee menjadi bagian pembentuk HET tersebut, untuk wilayah Bulungan dan kaltara memang karena jarak yang jauh dari SPPBE yang ada di Samarinda maka sensitivitas HET terhadap Harga BBM sangat signifikan*
2	Apakah perubahan harga barang substitusi dalam hal ini harga LPG 12 Kg mendorong perubahan preferensi pemakai tabung 12 Kg ke tabung 3 Kg?	*Pastilah ada pengaruhnya, namun berapa besar pengaruh tersebut harus diteliti lebih lanjut.*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

TRANSKRIP WAWANCARA

INFORMAN 2: Tim Pengawasan dan Pengendalian BBM & LPG 3 Kg

(a. Kabid. Perdagangan, Disperindagkop & UMKM Kabupaten Bulungan

(b. Kasubbag. Sarana Perekonomian, Bagian Perekonomian)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
A. Ukuran, Tujuan dan Sasaran Kebijakan		
1	Apa tujuan kebijakan Perpres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg dan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG 3 kg?	*Perpres 104 Tahun 2007 bertujuan untuk pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg sebagai upaya penghematan subsidi minyak tanah yang cukup besar saat itu. Sedangkan Permen ESDM 26 Tahun 2009 hanya melanjutkan saja ketentuan subsidi LPG 3 Kg, penyediaan, pendistribusian dan harga patokan LPG 3 Kg.(a)*
2	Bagaimana mekanisme penetapan HET LPG 3 Kg di Kabupaten Bulungan?	*proses menentukan HET LPG 3 Kg dilakukan di Kabupaten/ Kota dan ditetapkan atau disyahkan oleh Gubernur. Proses penentuan HET melibatkan para agen, Tim dari pemda, PT. Pertamina (Persero), dan Hiswana Migas. Rapat tersebut berjalan dalam beberapa tahap yang cukup alot, awalnya pemda dan agen mendapat pilihan apakah LPG akan di drop dari Tarakan sebagai Supply Point atau dari Samarinda. Hal ini disebabkan Infrastuktur Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) yang mulai dibangun tahun 2011 di Kabupaten Bulungan belum terealisasi. Dari tiga kali rapat akhirnya dipilih pengambilan LPG 3 Kg dari Samarinda karena HET-nya lebih rendah dibandingkan dengan HET dari pengambilan di Tarakan karena proses bongkar muat di pelabuhan baik di pelabuhan Tarakan dan pelabuhan Tanjung Selor yang tinggi biayanya. Namun hal ini juga ada plus minusnya,*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

		kekurangannya adalah jarak dan waktu tempuh yang lama sehingga kelancaran pendistibusian LPG 3 Kg juga tidak luput dari masalah. Indealnya para agen mengambil tabung isi ulang dari SPPBE yang ada di Bulungan sehingga harga dapat ditekan dan kelancaran pendistribusian juga lebih baik tentunya. (a)
3	Siapa saja yang menjadi kelompok sasaran dari kebijakan Subsidi LPG 3 Kg?	*Yang menjadi kelompok sasaran kebijakan subsidi LPG 3 Kg adalah Rumah tangga miskin dan Usaha mikro. Walaupun dalam perjalanannya hal ini melenceng dari yang telah ditetapkan. Hal ini juga terjadi kerancuan diawal program yang mana hampir semua rumah tangga yang menggunakan minyak tanah mendapatkan paket perdana program konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg tanpa memperhatikan mereka mampu atau tidak.(a)*
4	Apakah Kuota LPG 3 Kg untuk Kabupaten Bulungan telah mencukupi kebutuhan kelompok sasaran dari kebijakan tersebut?	*Sebenarnya hampir seluruh daerah di Indonesia menggunakan pendistribusian LPG 3 Kg secara terbuka, dalam arti setiap orang mempunyai akses untuk memperoleh LPG 3 Kg baik miskin atau tidak. Tidak seperti halnya program raskin yang sudah ditetapkan SK-nya oleh Bupati/ Walikota sehingga penerima manfaat subsidi sudah ada siapa orangnya dan berapa banyak yang diperoleh, datanya by name by address. Kenapa hal ini tidak bisa diterapkan di LPG? Tentu ada plus minus mengingat LPG ini dikelola oleh Agen yang notabene Badan usaha swasta yang berorientasi profit oriented. Pendistribusian LPG juga harus memperhitungkan tabung kosong yang bakal ditukar dengan tabung isi, ini juga menjadi kendala. Besarnya investasi yang ditanamkan oleh para agen dalam bisnis ini juga mengharuskan perputaran penjualan yang tinggi, bila dibatasi pasti mempengaruhi nilai investasi para*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

		agen. Idealnya subsidi bukan pada produk tapi orangnya sehingga LPG 3 Kg bisa dibeli oleh siapapun namun bagi orang yang mendapat subsidi memperoleh harga beli yang tentunya lebih murah. Memang wacana ini pernah dibahas oleh pemerintah pusat namun belum direalisasikan.(a)
5	**Bagaimana mekanisme pengusulan kuota LPG 3 Kg ?**	*Usulan kuota LPG 3 Kg biasanya diminta oleh propinsi di akhir tahun, misal kuota tahun 2017 sudah diusulkan pada akhir tahun 2016. Daerah mengusulkan berdasarkan kebutuhan rumah tangga dan Usaha Mikro. Penetapan kuota biasanya pada bulan maret tahun berjalan, ditetapkan oleh Menteri ESDM setelah mendapat persetujuan DPR.(a)*
6	Apakah penetapan penerima Subsidi LPG 3 Kg telah sesuai dengan ketentuan yang ada (tepat sasaran)?	*Melihat kondisipendistribusiannya yang cenderung terbuka seperti yang saya utarakan tadi, maka peluang untuk pelaksanaan subsidi yang tidak tepat sasaran semakin besar, ditambah kondisi geografis Kabupaten Bulungan yang luas sangat sulit untuk mengontrol dan mengawasi pendistribusian LPG 3 Kg agar tepat sasaran.(a)*
7	Bagaimana Realisasi Subsidi LPG 3 Kg di Kabupaten Bulungan dan Kecamatan Tanjung Selor 2 (Dua) Tahun terakhir (2015- 2016)?	*Realisasi LPG 3 g tahun 2015 untuk wilayah bulungan tidak begitu bagus, sekitar 67% sedangkan realisasi tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 83%. Bila ditanya realisasi untuk wilayah Kecamatan Tanjung Selorkita belum menghitung secara rinci namun bila dilihat dari jumlah sebaran pangkalan LPG 3 Kg yang hampir 70% berada di Kecamatan Tanjung Selor maka kemungkinan besar realisasi pendistribusian LPG 3 Kg tertinggi di Kecamatan Tanjung Selor.(a)*
B. Sumber Daya		
1	Apakah personil/ tim yang terlibat	*Dilihat dari jumlah personil bila pengawasan hanya untuk wilayah*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

	dalam Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg sudah mencukupi, baik dari jumlah dan kualitasnya?	*Kecamatan Tanjung Selor sudah mencukupi, namun untuk pengawasan seluruh wilayah Kabupaten Bulungan masih kurang, terlebih kondisi geografis yang terpisah- pisah oleh sungai. Sedangkan dari segi kualitas atau kemampuan personil memahami tujuan kebijakan secara umum mereka faham karena sering disampaikan dalam forum pertemuan dan rapat Tim terkait siapa yang menjadi kelompok sasaran dan tujuan program ini namun karena belum ada keseragaman dalam menetapkan kelompok sasaran misal rumah tangga miskin versi BPS atau TNP2K hal ini rancu terlebih pendistribusian LPG 3 Kg tidak menggunakan kartu kendali.(a)*
2	Apakah dukungan financial sudah memadai terkait kegiatan monev. LPG?	*Dari sisi anggaran monev.LPG 3 Kg untuk wilayah Kabupaten Bulungan hanya mampu untuk 1 kali monev dalam 1 tahun dan ini tentulah kurang mengingat perlunya monev.terlebih dalam menghadapi hari besar/ raya.(a)*
3	Bagaimana dengan kondisi infrastruktur pendukung (sarana/ prasarana) yang menunjang kegiatan pendistribusian LPG 3 Kg?	*Keberadaan sarana penunjang dalam hal ini SPPBE dan ifrastruktur jalan merupakan hal yang signifikan untuk melancarkan pendistribusian LPG 3 Kg. Tahun 2011 awal dilakukannya konversi mitan ke LPG 3 Kg untuk wilayah Bulungan sudah diikuti dengan rencana pembangunan SPPBE sebagai station pengisian dan pengangkutan bulk elpiji 3 Kg, namun hingga tahun ini 2016 belum terealisasi, padahal bangunan fisik sudah ada namun dari informasi yang diperloh dari pihak pertamina , perusahaan yang memperoleh proyek tersebut terkendala permodalan dan tidak dapat melanjutkan proyek tersebut. Dalam hal tersebut pihak pertaminalah yang lebih mengetahui perkembangan masalah tersebut karena penunjukkan pihak yang memperoleh proyek tersebut domain pertamina sebagai pemegang sah izin niaga LPG 3 Kg secara nasional, sedangkan pihak*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

		pemda hanya memberi rekomendasi awal/ izin prinsip dalam proses administrasi awal pendirian SPBBE. Jika saja SPPBE itu sudah beroperasi tentulah agen dapat lancar mendistribusikan LPG 3 Kg di wilayah Bulungan dan kaltara lainnya karena tidak perlu menempuh jarak 1600 km dari SPBBE yang berada di samarinda yang membutuhkan kurang lebih 4 hari perjalanan pulang pergi sehingga agen akan focus dalam pendistribusian ke pangkalan- pangkalan yang ada di kecamatan, kelurahan, dan desa.(b)
4	Bagaimana dengan jumlah dan sebaran pangkalan LPG 3 Kg?	*Memang kami akui sebaran pangkalan tidak proporsional dan dan belum tersebar di selulurh kecamatan. Penumpukkan memang banyak terjadi di Kecamatan Tanjung Selor namun itu wajar karena dari data penduduk miskin yang paling banyak memamng di Tanjung Selor namun jumlahnya terlalu besar, idealnya kalau alokasi untuk agen rata- rata 100 hingga 300/ bulan maka di Tanjung Selor cukup 36 hingga 72 pangkalan. Pemda sudah mengarahkan agar agen membuka pangkalan di daerah pedalaman, transmigrasi namun sejauh ini belum ada penambahan pangkalan di daerah tersebut.(a)*
C. Karakteristik Organisasi Pelaksana		
1	Apakah Standard Operating Procedure (SOP) mutlak dilakukan dalam mekanisme pendistribusian LPG 3 Kg?	*SOP dari pihak pemda hanya dalam memverifikasi kedatangan alokasi LPG 3 Kg dari masing- masing agen . Kami akui verifikasi sangat jarang dilakukan dan pihak agen banyak yang merapel berita acara dalam satu waktu sekaligus. Seharusnya pihak agen mengabari apabila mereka telah sampai di wilayah Bulungan sehingga pemda bisa mempersiapkan personil.(a)*
2	Apakah SOP tersebut konsisten dilakukan? Jika tidak apa alasannya?	*Ya aturan tersebut jadi tidak konsisten dijalankan oleh pemda karena pihak agen tidak berkoordinasi dengan baik, padahal pemda sudah menegur agen*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

		agar tertib dalam memperoleh verifikasi kedatangan alokasi LPG 3 Kg untuk wilayah Bulungan, namun karena aturan ini tidak tertulis secara tegas dan hanya berupa kesepakatan rapat, maka pemda tidak dapat berbuat banyak.(a)
3	**Bagaimana pengawasan yang dilakukan terkait keputusan-keputusan yang diambil dalam organisasi pelaksana?**	*Pengawasan dilakukan secara kolektif melibatkan tim, baik disperindagkop, satpol PP, dan pihak kecamatan.(a)*
D. Sikap para Pelaksana		
1	Apakah Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg saat ini (distribusi terbuka) masih relevan?	*Seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebenarnya distribusi terbuka tersebut banyak celah untuk terjadi penyelewengan karena siapapun punya akses untuk mendapatkan LPG 3 kg, jadi harus dibenahi lagi kebijakan subsidi ini, kita tunggu dari pusat apa solusi terbaik mengingat inikan program pusat. Wacana untuk dijadikan terintegrasi dengan subsidi program lainnya juga sudah kita dengar beberap tahun terakhir ini namun belum ada realisasinya.(a)*
2	Apa saja yang sebaiknya dibenahi dalam Kebijakan Subsidi tersebut?	*Pertama penetapan alokasi kebutuhan dan kelompok sasarannya dan mekanisme penyalurannya yang mudah untuk terpantau dan minim penyelewengan.(a)*
3	Adakah tindakan atau kebijakan yang diambil untuk mengatasi hal- hal yang diluar perkiraan/ perhitungan dan mengapa hal itu dilakukan?	*Ada, misal permintaan untuk operasi pasar ke Pertamina bila dalam beberapa hari atau seminggu stock LPG kosong dan pernah pula kita adakan penyesuain HET waktu terjadi kenaikan harga BBM. Waktu itu solar harganya naik padahal agen LPG menggunakan solar untuk moda transportasi ke SPPBE yang berada di Samarinda jadi mereka pihak agen meminta Pemda melakukan penyesuaian HET LPG agar mereka tidak merugi dan itu kita penuhi.(a)*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

4	Secara pribadi adakah kebijakan subsidi yang tidak sesuai dengan pemahaman anda? Dan bagaimana anda meyikapinya?	*Ya sebenarnya awal kebijakan tersebut baik namun dalam implementasi memang banyak terjadi penyimpangan dan itu menjadi hal yang seharusnya dievaluasi dan diambil langkah untuk megatasinya.(a)*
E. Komunikasi Antar Organisasi		
1	Apakah kebijakan subsidi 3 LPG Kg selama ini sudah disosialisasikan dengan baik? Apakah sudah semua elemen yang terlibat mengetahui standard, tujuan, sasaran dari kebijakan tersebut?	*Awal program konversi mitan ke LPG 3 kg kita dan pihak Pertamina telah melakukan sosialisasi di masyarakat tentang kebijakan tersebut, dalam tim pemda juga sudah sering disampaikan tujuan dan sasaran kebijakan tersebut, dikoran dan media massa juga meliput kegiatan sidak kita ke pangkalan-pangkalan, namun ketaatan dan kepatuhan masyarakat memang belum terwujud sehingga yang tidak berhak memperoleh subsidi LPG 3 Kg tetap menggunakannya.(a)*
2	Apakah informasi terkait standard, tujuan, sasaran kebijakan Subsidi LPG 3 Kg yang diterima/ difahami dan diberikan: a. Dideseminasi informasi lebih lanjut; b. selalu konsisten; c. jelas; d. Seragam	*Ya, aturan kebijakan tentulah seragam tapi tiap orang terkadang mempunyai sikap yang berbeda- beda, bisa patuh bisa tidak apalagi kita belum mempunyai perda yang bisa memberikan sanksi.(a)*
E. Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik		
1	Apakah perubahan harga BBM mengakibatkan perubahan harga LPG 3 Kg? Bagaimana penjelasannya?	*Menentukkan HET itu terdiri dari beberapa komponen harga, seperti Harga tebus agen, margin agen, ongkos angkut, Harga tebus pangkalan, dan margin pangkalan. Jadi ongkos angkut dipengaruhi oleh*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

		biaya transportasi salah satunya BBM disamping spare part dan lain- lainnya sehingga perubahan harga BBM tentulah mempengaruhi HET dan menjadi sangat signifikan bila jarak pengambilan LPG dan pendistribusian LPG dari SPPBE ke Agen dan pangkalan jauh jaraknya. Untuk bulungan sendiri yang seperti saya utarakan sebelumnya sempat melakukan adjustment HET karena kenaikan harga BBM.(a)
2	Apakah perubahan harga barang substitusi dalam hal ini harga LPG 12 Kg mendorong perubahan preferensi pemakai tabung 12 Kg ke tabung 3 Kg?	*Pengaruh itu pastilah ada apalagi masyarakat akan cenderung mencari harga yang lebih murah pastinya, namun hal ini tetap tidak bisa diabaikan mengingat LPG 3 Kg ini merupakan barang subsidi yang hanya orang miskin dan pelaku usaha mikro yang punya hak menggunakannya.(a)*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

TRANSKRIP WAWANCARA

INFORMAN 3: Agen LPG 3 Kg

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
A. Ukuran, Tujuan dan Sasaran Kebijakan		
1	Apa tujuan kebijakan Perpres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg dan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG 3 kg?	*Yang kami tahu tujuan awal subsidi LPG 3 kg ini merupakan usaha penghematan subsidi BBM yaitu minyak tanah ke LPG 3 Kg untuk orang miskin dan usaha mikro. Masalah HET untuk wilayah Bulungan yang menentukan pemda setempat dengan SK Gubernur.*
2	Siapa saja yang menjadi kelompok sasaran dari kebijakan Subsidi LPG 3 Kg?	*Kalau diawal program konversi tujuannya untuk mengalihkan masyarakat yang menggunakan minyak tanah ke gas, biar lebih hemat karena minyak tanah itu mahal. Selain itu harga LPG 3 Kg disubsidi agar terjangkau harga belinya bagi masyarakat miskin dan usaha mikro. Di tabung LPG 3 Kg juga sudah ditulis hanya untuk orang miskin*
3	Apakah Kuota LPG 3 Kg untuk Kabupaten Bulungan telah mencukupi kebutuhan kelompok sasaran dari kebijakan tersebut?	*Yang tahu persis kebutuhan LPG 3 Kg mungkin pihak pemda ya, namun dari permintaan pangkalan yang selalu kekurangan stock mungkin perlu dihitung ulang berapa kebutuhan realnya..*
4	Apakah penetapan penerima Subsidi LPG 3 Kg telah sesuai dengan ketentuan yang ada (tepat sasaran)?	*Kalau dari laporan masyarakat ada saja yang melapor bahwa orang mampu juga membeli LPG 3 kg, mungkin karena perbedaan harga yang cukup jauh antara LPG 3 Kg dengam yang LPG 12 Kg maupun 14 Kg dari Malaysia.*
5	Bagaimana Realisasi Subsidi LPG 3	*Realisasi mengalami peningkatan apalagi setelah diatur HET disesuaikan*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

	Kg di Kabupaten Bulungan dan Kecamatan Tanjung Selor 2 (Dua) Tahun terakhir (2015- 2016)?	*dengan kondisi geografis daerah, barulah agen merasa sedikit bernafas lega, karena selama ini biaya transportasi menjadi hitung- hitungan yang sulit untuk ditekan karena jarak dan kondisi geografis yang kurang mendukung.*
B. Sumber Daya		
3	Bagaimana dengan kondisi infrastruktur pendukung (sarana/ prasarana) yang menunjang kegiatan pendistribusian LPG 3 Kg? bagaimana dengan kelanjutan SPPBE, jumlah dan sebaran pangkalan LPG 3 Kg?	*Nah itu yang sering menjadi kendala kami dilapangan, di beberapa titik di perbatasan Berau km 17 dan 44 sering longsor bahkan putus saat hujan deras. Bila ini terjadi, truck kami harus bermalam dan ini baru baru bisa normal lagi 6 hingga 7 hari. Kami berharap pihak pemda dapat mencari solusi masalah tersebut. Sedangkan terkait dengan keberadaan SPPBE Tanjung Palas hingga saat ini belum terealisasi, padahal kami sangat menantikannya biar tidak terlalu jauh ambil LPG ke Samarinda. Terkait jumlah dan sebaran pangkalan memang masih terus diusahakan untuk merata di kecamatan dan kelurahan dan desa, namun kadang terkendala syarat yang belum dapat dipenuhi pangkalan, terutama pangkalan yang berada jauh dariTanjung Selor, minimal mereka mampu menyediakan tabung 100 hingga 200 tabung dan itu kadang memberatkan bagi mereka.*
C. Karakteristik Organisasi Pelaksana		
1	Apakah Standard Operating Procedure (SOP) mutlak dilakukan dalam mekanisme pendistribusian LPG 3 Kg?	*SOP dari Pertamina ada tahapannya untuk penebusan LO (Loading Order) dan itu harus dipenuhi, nanti kita kasih copyan tahapannya.*
2	Apakah SOP tersebut konsisten dilakukan? Jika tidak apa alasannya?	*Ya harus sesuai tahapan bila tidak ada saknsi dari Pertamina, mulai sanksi peringatan, pengurangan alokasi, penghentian alokasi, hingga PHU.* Jangan sampai kena penalty dari pertamina, kalau sampai kena, akan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

		susah kedepannya, nama perusahaan jadi tercemar, jadi sorotan bagi agen-agen lain dan pemda juga dan yang jelas mengganggu pemasukkan bagi agen karena ada pengurangan alokasi atau penghentian alokasi atau bahkan pemutusan hubungan usaha. Padahal yang melakukan itu oknum tanpa sepengetahuan pimpinan
3	Bagaimana dengan verifikasi oleh pemda terhadap kedatangan alokasi ke wilayah Bulungan? Pihak pemda mengklaim jarang dihubungi tepat waktu dan verifikasi sering dirapel.	*Ya, terkadang kesulitan kami bila sampai di Bulungan pada sore atau malam hari, maka kami tidak enak hati bila menghubungi diluar jam kantor, sedangkan kami dituntut untuk segera mendistribusikan LPG 3 Kg ke pangkalan- pangkalan yang cepat sekali stocknya habis.*
D. Sikap para Pelaksana		
3	Adakah tindakan atau kebijakan yang diambil untuk mengatasi hal- hal yang diluar perkiraan/ perhitungan dan mengapa hal itu dilakukan?	*Ada misal, harga BBM solar naik dan HET belum dilakukan penyesuaian maka kami kadang kala tidak melakukan LO karena akan rugi. Solar itukan untuk biaya transportasi dari Samarinda ke Tanjung Selor, dengan jarak yang jauh tersebut bila ada kenaikan BBM pastilah menambah cost yang cukup besar pula dan akhirnya perlu penyesuain HET.*
4	Secara pribadi adakah kebijakan subsidi yang tidak sesuai dengan pemahaman anda? Dan bagaimana anda meyikapinya?	*Sejauh ini mungkin masalah siapa yang berhak dan tidak berhak atas subsidi tersebut yang masih perlu dipertegas.*
E. Komunikasi Antar Organisasi		
2	Apakah informasi terkait standard, tujuan, sasaran kebijakan Subsidi LPG 3 Kg yang diterima/ difahami dan diberikan: a. Dideseminasi informasi lebih	*Ya, kami sudah sampaikan ke karyawan kalau LPG 3 Kg ini haknya orang miskin dan usaha mikro begitu pula kepada pangkalan mitra kami juga kami sampaikan bila menjadi pangkalan harus taat pada ketentuan yang berlaku, diantaranya menjual LPG 3 Kg sesuai HET yang ditetapkan oleh pemda , memasang papan nama*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

	lanjut; b. selalu konsisten; c. jelas; Seragam	*pangkalan dan harga HET yang dicantumkan di papan nama pangkalan agar masyarakat tahau berapa harga HET yang sesungguhnya.*
F. Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik		
1	Apakah perubahan harga BBM mengakibatkan perubahan harga LPG 3 Kg? Bagaimana penjelasannya?	*Ya tentu saja karena biaya transportasi dari SPPBE yang berada di Samarinda menjadi bagian dari perhitungan HET dan besarnya cukup signifikan karena jarak yang jauh itu. Misalkan SPPBE berada di Tanjung Palas tentulah tidak begitu signifikan bobot komposisinya dalam perhitungan HET tapi bila kenaikan BBM itu besar maka walaupun jarak pengambilan SPPBE dekat juga dapat mempengaruhi HET. Kami berharap BBM ini tidak naiklah atau paling gak stabil jadi kita tidak perlu meminta pemda untuk menyesuaikan HET karena itu juga perlu waktu bagi pemda untuk rapat dengan tim dan tentu saja menghambat kelancaran pendistribusian LPG 3 kg.*
2	Apakah perubahan harga barang substitusi dalam hal ini harga LPG 12 Kg mendorong perubahan preferensi pemakai tabung 12 Kg ke tabung 3 Kg?	*Saya belum tau pasti, namun dari infor masi teman agen LPG 12 Kg, kenaikan harga LPG 12 Kg menjadi penurunan penjualan LPG 12 Kg, kemungkinan besar pengguna LPG 12 Kg pindah ke LPG 3 Kg atau bahan bakar kayu,bisa jadi seperti itu.*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

TRANSKRIP WAWANCARA

INFORMAN 4: Pangkalan LPG 3 Kg

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
A. Ukuran, Tujuan dan Sasaran Kebijakan		
1	Apa tujuan program subsidi LPG 3 Kg yang Ibu/ Bapak fahami?	*Menurut saya program tersebut untuk menyediakan LPG yang murah harganya, terjangkaulah harganya untuk orang miskin.*
2	Siapa saja yang menjadi kelompok sasaran dari kebijakan Subsidi LPG 3 Kg?	*Orang miskin dan penjual makanan skala kecil itu yang saya tau dan yang disampaikan oleh agen ke kami sewaktu kami mengajukan permohonan menjadi pangkalan ke agen.*
3	Apakah Kuota LPG 3 Kg untuk Kabupaten Bulungan telah mencukupi kebutuhan kelompok sasaran dari kebijakan tersebut?	*Oh kalau itu kita kurang tau pasti tapi dari peminat LPG 3 Kg ini selalu kurang, cepat habis, bila kami dapat supply 50 hingga 100 tabung paling lama 2 hari langsung habis dan harus munggu 4- 5 hari baru dapat jatah dari agen.*
4	Apakah penetapan penerima Subsidi LPG 3 Kg telah sesuai dengan ketentuan yang ada (tepat sasaran)?	*Tepat sasaran tentu saja sangat sulit, karena yang beli bebas siapa saja, kami juga sungkan untuk menanyakan status miskin atau tidak dan memang tidak ada dari pemda seperti kartu khusus pembelian oleh warga miskin. Jadi yang beli terkadang orang mampu, kami hanya disruh mengisi logbook pembelian LPG 3 Kg oleh konsumen dan dibatasi maksimal 2 tau 3 saja tiap orang.*
C. Karakteristik Organisasi Pelaksana		
1	Apakah Standard Operating Procedure (SOP) mutlak dilakukan dalam mekanisme pendistribusian LPG 3 Kg atau ketentuan khusus yang harus	*Ya tentu ada, oleh agen kami disuruh mengisi logbook penjual LPG, yang berisi data pembeli sesuai ktp nama, alamat, penggunaan LPG 3 Kg untuk apa? (rumah tangga/ warung) dan membatasi pembelian maksimal 2 tabung perorang.*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

	dilakukan pangkalan dalam menjual LPG 3 Kg?	
2	Apakah SOP tersebut konsisten dilakukan? Jika tidak apa alasannya?	*Ya, kami takut kalau tidak menjual seperti arahan agen, maka kami akan kena skorsing, bisa tidak dapat supply LPG dari agen.*
D. Sikap para Pelaksana		
4	Secara pribadi adakah kebijakan subsidi yang tidak sesuai dengan pemahaman anda? Dan bagaimana anda meyikapinya?	*Ya, kadang saya merasa pencatatan logbook penjualan LPG 3 Kg terlalu ribet dan jadi menyusahkan kami, karena kalau mau menanyakan orang yang membeli kadang mereka ketus jadi kamipun menjadi sungkan.*
F. Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik		
2	Apakah perubahan harga barang substitusi dalam hal ini harga LPG 12 Kg mendorong perubahan pemakai tabung 12 Kg ke tabung 3 Kg?	*Kalau di warung kami ini, LPG 3 Kg cepat sekali lakunya, kalau tabung 12 kg tidak begitu sehingga kami stock sedikit saja.*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

TRANSKRIP WAWANCARA

INFORMAN 5: Rumah Tangga Miskin

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
A. Ukuran, Tujuan dan Sasaran Kebijakan		
1	Apa tujuan program subsidi LPG 3 Kg yang Ibu/ Bapak fahami?	*Tujuannya mungkin untuk memberi harga LPG murah tapi dibanding harga di pulau jawa kok sangat berbeda ya?*
2	Siapa saja yang menjadi kelompok sasaran atau yang berhak dapat menggunakan LPG 3 Kg menurut Ibu/ Bapak?	*Kalau bicara subsidi pastilah terkait orang miskin tapi kenyataannya banyak yang mampu juga beli LPG tabung melon itu hingga berebut kita membelinya dan sering habis.*
3	Rata- rata berapa kebutuhan LPG 3 Kg dalam satu bulan yang Ibu/ Bapak butuhkan dan apakah selalu tercukupi?	*Ya gak tentu juga, bisa jadi sebulan 3 atau bahkan 5 tabung dan itupun gak selalu mudah dapatinnya, kadang kosong di pangkalan, trus cari di pengecer dapat sih tapi harganya itu jadi mahal bahkan pernah tembus 50ribu pertabung padahal HETnya sekitar 23 atau 25ribu kalo gak salah.*
F. Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik		
1	Apakah perubahan harga barang substitusi dalam hal ini harga LPG 12 Kg mendorong perubahan pemakai tabung 12 Kg ke tabung 3 Kg?	*Saya kurang tahu persis kalau masalah itu, yang jelas memang harga tabung 12 Kg mahal sampai 200ribu pertabung.*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

TRANSKRIP WAWANCARA

INFORMAN 6: Usaha Mikro

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
A. Ukuran, Tujuan dan Sasaran Kebijakan		
1	Apa tujuan program subsidi LPG 3 Kg yang Ibu/ Bapak fahami?	*Menurut yang saya tahu, tujuan subsidi biar harga murah tidak malah seperti LPG 12 Kg dan minyak tanah.*
2	Siapa saja yang menjadi kelompok sasaran atau yang berhak dapat menggunakan LPG 3 Kg menurut Ibu/ Bapak?	*Yang mempunyai hak warga miskin karena di tabungnya ada tulisan hanya untuk masyarakat miskin.*
3	Rata- rata berapa kebutuhan LPG 3 Kg dalam satu bulan yang Ibu/ Bapak butuhkan dan apakah selalu tercukupi?	*Kalau saya karena untuk jualan soto dalam sebulan bisa 10 sampai 12 tabung tapi untuk dapatkan di pangkalan resmi dengan harga HET 23ribu pertabung sangat jarang, biasanya saya dapat harga di pangklan resmi 25ribu di pengecer bahkan bisa sampai 35 atau bahkan 50ribu pertabung bila lagi langka.*
F. Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik		
1	Apakah perubahan harga barang substitusi dalam hal ini harga LPG 12 Kg mendorong perubahan pemakai tabung 12 Kg ke tabung 3 Kg?	*Bisa iya bisa tidak tapi kalau dilihat yang beli LPG 3 Kg juga orang mampu bahkan bermobil pas waktu beli, bahkan di lingkungan sini setahu saya banyak yang dari kalangan mampu menggunakan LPG 3 Kg, ya....mungkin karena selisih harganya yang jauh itu kali ya..*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

TRANSKRIP WAWANCARA

INFORMAN 7: Pengguna LPG 3 Kg yang bukan kelompok sasaran kebijakan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
F. Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik		
1	Apakah perubahan harga barang substitusi dalam hal ini harga LPG 12 Kg mendorong perubahan preferensi pemakai tabung 12 Kg ke tabung 3 Kg?	*Ya tentu saja itu berpengaruh, harga LPG 12 Kg makin naik tiap tahun ditambah lagi kebutuhan pokok lainnya juga ikut- ikutan naik jadi wajar saja bila kami mencari kebutuhan pokok termasuk LPG dengan harga yang murah.*
2	Apakah ada faktor lain yang menyebabkan Saudara memilih LPG 3 Kg sebagai bahan bakar?	*Sebenarnya kami menggunakan inipun awalnya karena kami dapat jatah paket awal waktu program konversi tahun berapa persisnya saya lupa, dapat pembagian jadi lanjutlah sampai sekarang kami pakai. Awalnya kami pengguna minyak tanah namun setelah minyak tanah mahal kami beralih ke gas LPG 3 Kg. Selain itu menggunakan LPG lebih bersih dan praktis dari pada minyak tanah, walaupun diawal- awal program banyak yang takut menggunakannya tapi coba dilihat sekarang orang-orang pada berebut membeli gas melon, salah satunya karena murah itu tadi dan praktis membawanya, gak berat.*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Sutaningsih, pemilik pangkalan LPG 3 Kg sedang menunjukkan tabung gas melon/ 3 Kg yang telah kosong selama 3 hari di warungnya Jl. Rambutan, Tanjung Selor.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu agen LPG 3 Kg (PT. Mitra Brilian Mandiri) tanggal 23 Januari 2017.

Salah satu kantor agen LPG 3 Kg yang berada di Jl. Akbar, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Moda transportasi LPG 3 Kg yang digunakan agen mendistribusikan LPG 3 Kg ke pangkalan.

Moda Transportasi LPG 3 Kg yang dimiliki salah satu agen untuk mengambil alokasi LPG 3 Kg dari SPPBE Samarinda ke agen di wilayah Kabupaten Bulungan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Tarakan

Jalan: Jenderal Sudirman No. 7, Kota Tarakan 77111

Telepon :(0551)3802846, Faksimile (0551)3802847

e-mail: ut-tarakan@ut.ac.id

Nomor : 684/UN31.67/KM/2017 Tarakan, 20 Mei 2017

Lampiran : --

Perihal : ***Surat Pengantar Permintaan Data Penelitian Mahasiswa UPBJJ-UT Tarakan***

Kepada
Yth.

Dalam rangka penyelenggaraan Penelitian Tugas Akhir Program Mahasiswa (TAPM)/Tesis, Mahasiswa UPBJJ-UT Tarakan dengan judul "**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUBSIDI LPG DIKECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN**," dengan data sebagai berikut :

Nama : SITI RAHMATUL AZIZAH
NIM : 500894791
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Kiranya dapat diberikan data yang dibutuhkan untuk keperluan dimaksud. Atas perhatian dan bantuannya diucapakan terima kasih.

Kepala UPBJJ-UT Tarakan

Dr. Sofjan Aripin, M.Si.
NIP. 196606191992031002

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 248/K-III/500/2016

TENTANG
TIM KOORDINASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN BBM DI KABUPATEN BULUNGAN TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian terhadap pendistribusian BBM di Kabupaten Bulungan perlu dibentuk Tim Koordinasi;

b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tersebut dalam Keputusan ini sesuai dengan tugas dan fungsinya dipandang mampu untuk melaksanakan tugas-tugas Tim dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pendistribusian BBM di Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 5);

5. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 20);

6. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Jenis Premium dan Solar Bersubsidi di Tingkat Kios BBM Bersubsidi dari Kabupaten Bulungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pendistribusian BBM di Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2016 dengan susunan Tim sebagai berikut :

1. Pembina : 1. Bupati Bulungan
   2. Wakil Bupati Bulungan
   3. Ketua DPRD Kabupatan Bulungan
   4. Dandim 0903 Bulungan
   5. Kapolres Bulungan
   6. Dan Brigif 24 Bulungan Cakti
   7. Kasub.Den POM Bulungan
2. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan
3. Koordinator : Asisten Bid.Perekonomian, Kesejahteraan & Pembangunan Setda. Kabupaten Bulungan
4. Ketua : Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Bulungan.
5. Sekretaris 1 : Kepala Bagian Perekonomian Setda.Kabupaten Bulungan.
6. Sekretaris 2 : Kepala Bidang Bina Perdagangan Dinas Perindagkop dan UMKM Kab. Bulungan
7. Anggota : 1. DPRD Kabupaten Bulungan
   a. Ketua Komisi I
   2. Kodim 0903 Bulungan
   a. Pasilog Kodim 0903/Tsr
   b. Batilog Kodim 0903/Tsr
   3. Polres Bulungan
   a. Kaurbin Ops. Reskrim
   b. Kanit 3 Sat. Intelkom
   4. Brigif 024 Bulungan Cakti
   a. Kasi Intel Brigif 24/BC.
   b. Basintel Brigif 24 / BC.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

b. Balidpom Subdenpom VI/1-6 Blg.
6. Dinas Pertambangan & Energi Kab.Bulungan
a. Kepala Dinas
b. Kepala Bidang Migas
c. Kepala Seksi Minyak & gas Sektor Hilir
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Bulungan
a. Kepala Dinas
b. Kasi LLALSDP
8. Kantor Satpol PP dan Linmas Kab. Bulungan
a. Staf Pelaksana
b. Staf Pelaksana
9. Bagian Perekonomian Setkab. Bulungan
a. Kasubag Sarana
b. Kasubag Pengembangan Perekonomian Daerah
10. Bagian Hukum Setkab. Bulungan
a. Staf Pelaksana Bagian Hukum
b. Staf Pelaksana Bagian Hukum
11. Camat se-Kabupaten Bulungan

8. Sekretariat & Data Formating:
1. Zainal Abidin, ST
NIP. 19830324 201001 1 011
2. Erick lorens Samoa, ST
NIP. 19840220 201101 1 004
3. Hary Kurniawan AR, ST
NIP. 19810703 201001 1 007
4. Jaleha Yusuf, A. Md
NIP. 19720322 200003 2 003
5. Hj. Suriana, SE
NIP. 19790509 200701 2 011
6. Hj. Emy Wulandari, SE
NIP. 19770606 200902 2 001
7. Lilis Setiawati, A.Md
NIP.19800927 201101 2 001

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pendistribusian BBM berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

situasional sesuai kondisi terutama pada saat terjadi gangguan distribusi;

3. meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pendistribusian BBM ke konsumen akhir dari penyalur resmi yang ada seperti :
   a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU);
   b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Bunker (SPBB);
   c. Agen Premium Minyak dan Solar (APMS);
   d. Agen Minyak Tanah (AMT);
   e. Pangkalan Minyak Tanah;
   f. Penyalur Khusus BBM Bersubsidi.
4. sesuai Tupoksi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang tergabung dalam Tim, agar melakukan pengawasan dan penertiban langsung terhadap penyalahgunaan pendistribusian BBM Bersubsidi sesuai Peraturan Perundang-undangan;
5. membahas, menyelesaikan serta mengambil langkah-langkah pemecahan masalah yang berkaitan dengan pendistribusian BBM; dan
6. melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian pendistribusian BBM kepada Bupati Bulungan dan BPH Migas di Jakarta.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan bertanggung jawab kepada Bupati Bulungan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2016 Kode Rekening 1.20.1.20.03.31.02.5.2.1.01.01.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal, 22 Maret 2016

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

SULISTIA WIDARTI, SH
Pembina / IVa
Nip.196509301998032001

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 263/K-IV/500/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 121/K-II/518/2015 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM PADA TINGKAT PANGKALAN DI KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pemenuhan kebutuhan Elpiji Tabung 3 Kilogram berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Elpiji Tabung 3 Kilogram maka perlu penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Elpiji Tabung 3 Kilogrampada tingat Pangkalan di kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Bulungan;

b. bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan dan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Elpiji Tabung 3 Kilogram dan Pengusulan Quota Elpiji Tabung 3 Kilogram Kecamatan se-Kabupaten Bulungan pada tanggal 15 Desember 2015 telah disepakati usulan Harga Eceran Tertinggi Elpiji Tabung 3 Kilogram untuk masing-masing kecamatan di Kabupaten Bulungan;

c. bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan dan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Elpiji Tabung 3 Kilogram instansi teknis terkait pada tanggal 3 Februari 2016 telah disepakati Harga Eceran Tertinggi Elpiji Tabung 3 Kilogram untuk masing-masing Ibukota Kecamatan se-Kabupaten Bulungan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bulungan Nomor 121/K-II/518/2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram pada Tingkat Pangkalan Di Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan.

Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;

8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011/Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas (LPG);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 5);

10. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 20).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.367/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.46/2015 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan Provinsi Kalimantan Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Bulungan Nomor 121/K-II/518/2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Pada Tingkat Pangkalan di Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Bulungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Harga Eceran Tertinggi Elpiji Tabung 3 Kilogram sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sudah Termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dan Hanya diperuntukkan bagi keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;

KETIGA : Penjualan pada tingkat Pangkalan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan/ atau melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Elpiji Tabung 3 Kilogram sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi administrative berupa pencabutan izin serta sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Sosialisasi dan Pengawasan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) Elpiji Tabung 3 Kilogram pada tingkat Pangkalan akan dilakukan oleh Tim Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pendistribusian BBM Bersubsidi dan Non Subsidi di Kabupaten Bulungan;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor,
Pada tanggal, 1 April 2016

BUPATI BULUNGAN

ttd

SUDJATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

SEKRETARIAT DAERAH

SULISTIA WIDARTI, SH
Pembina / IVa
Nip.196509301998032001

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR : 263/K-IV/500/2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 121/K-II/518/2015 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM PADA TINGKAT PANGKALAN DI KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN

Daftar Harga Eceran Tertinggi (HET) Elpiji Tabung 3 Kilogram pada Tingkat Pangkalan di Kecamatan dengan titik serah di Kota Tanjung Selor.

NO	KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	HARGA AGEN KE PANGKALAN	ONGKOS ANGKUT	MARGIN PANGKALAN	HET PANGKALAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tanjung Selor	Tanjung Selor	Rp. 21.000,-	-	Rp. 2.000,-	Rp. 23.000,-
2.	Tanjung Palas	Tanjung Palas	Rp. 21.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 28.000,-
3.	Tanjung Palas Tengah	Salimbatu	Rp. 21.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 31.000,-
4.	Tanjung Palas Utara	Karang Agung	Rp. 21.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 33.000,-
5.	Sekatak	Sekatak Buji	Rp. 21.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 35.000,-
6.	Tanjung Palas Timur	Tanah Kuning	Rp. 21.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 35.000,-
7.	Tanjung Palas Barat	Long Beluah	Rp. 21.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 30.000,-
8.	Peso Hilir	Long Tungu	Rp. 21.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 32.000,-
9.	Peso	Long Bia	Rp. 21.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 35.000,-
10.	Bunyu	Bunyu	-	-	-	City Gas

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

SULISTIA WIDARTI, SH
Pembina / IVa
Nip.196509301998032001

BUPATI BULUNGAN

ttd

SUDJATI

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jelarai Telp (0552) 21008 - 233316 Fax. (0552) 21009
TANJUNG SELOR

Tanjung Selor, 15 Mei 2015

Nomor : 542/98/Ek.Sarekda/V/2015
Lampiran : 1(Satu) lbr
Perihal : *Usulan HET LPG 3 Kg Kab. Bulungan*

Kepada,

Yth. Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Di –
Tanjung Selor

Menindaklanjuti Surat Direktorat Pemasaran Domestic Gas Region Manager VI nomor : 825/F16450/2015-S3 tanggal 12 Mei 2015 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Subsidi Ongkos Angkut LPG 3 Kg dan menindaklanjuti hasil rapat Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 6 April 2015 untuk menetapkan besaran usulan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg di Kabupaten Bulungan (terlampir), maka berdasarkan hasil kesepakatan Rapat tersebut, disampaikan usulan HET LPG 3 Kg Kabupaten Bulungan sebagai berikut:

No	Komponen Harga	HET (Rp.)	Ket.
1	Supply Point	-	Tanjung Selor
2	Harga Tebus Agen	11.588,-	
3	Margin Agen	1.200,-	
4	Ongkos Angkut	8.212,-	
5	Harga Agen Ke Pangkalan	21.000,-	
6	Margin Pangkalan	2.000,-	
7	Harga Jual Pangkalan	23.000,-	HET(Pangkalan)

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. Syafril
Pembina Utama Muda/ IVa
NIP. 19620410 199103 1 007

Tembusan ditujukan Kepda Yth.
1. Bupati Bulungan (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kab. Bulungan di - Tanjung Selor;
3. GM. Marketing Operation Region VI di - Balikpapan;
4. Arsip.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 121/K-II/518/2015
TENTANG
PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM PADA TINGKAT PANGKALAN DI KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pemenuhan kebutuhan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG, maka perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg pada tingkat Pangkalan di Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Bulungan;

b. bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan dan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bulungan tanggal 20 Pebruari 2015 telah disepakati Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Pada Tingkat Pangkalan Di Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Udang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

diubah dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentan Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011/Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas (LPJ);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 188.44/K-46/2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan Provinsi Kalimantan Utara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Pada Tingkat Pangkalan di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bulungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

KEDUA : Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dan hanya diperuntukkan bagi keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;

KETIGA : Penjualan pada tingkat Pangkalan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan/atau melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan izin serta sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEMPAT : Sosialisasi dan pengawasan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram pada tingkat Pangkalan dikoordinir oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Bulungan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor,
pada tanggal 20 Februari 2015

BUPATI BULUNGAN,

ttd

BUDIMAN ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

SULISTIA WIDARTI, SH
Pembina / IVa
Nip.196509301998032001

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubenur Propinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor
2. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
3. Ketua Bappeda Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
5. Kepala Kepolisian Resort Bulungan di Tanjung Selor.
6. Kepala Satpol PP Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
7. SR Retail III PT. Pertamina (Persero) Tarakan di Tarakan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR : **121/K-II/518/2015**
TENTANG : **PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM PADA TINGKAT PANGKALAN DI KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN**

Daftar Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Pada Tingkat Pangkalan di Kecamatan.

No	KECAMATAN	TITIK SERAH	HARGA AGEN KE PANGKALAN	ONGKOS ANGKUT	MARGIN PANGKALAN	HET PANGKALAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tanjung Selor	Tanjung Selor	Rp. 14.500	Rp. -	Rp. 2.000	Rp. 16.500
2.	Tanjung Palas	Tanjung Selor	Rp. 14.500	Rp. 1.500	Rp. 2.000	Rp. 17.500
3.	Tanjung Palas Tengah	Tanjung Selor	Rp. 14.500	Rp. 1.000	Rp. 2.000	Rp. 18.000
4.	Tanjung Palas Utara	Tanjung Selor	Rp. 14.500	Rp. 3.000	Rp. 2.000	Rp. 19.500
5.	Tanjung Palas Barat	Tanjung Selor	Rp. 14.500	Rp. 3.000	Rp. 2.000	Rp. 19.500
6.	Tanjung Palas Timur	Tanjung Selor	Rp. 14.500	Rp. 3.000	Rp. 2.000	Rp. 19.500
7.	Sekatak	Tanjung Selor	Rp. 14.500	Rp. 3.250	Rp. 2.000	Rp. 19.750
8.	Peso Hilir	Tanjung Selor	Rp. 14.500	Rp. 8.000	Rp. 2.000	Rp. 24.500
9.	Peso	Tanjung Selor	Rp. 14.500	Rp. 9.000	Rp. 2.000	Rp. 25.500
10.	Bunyu	Tarakan	Rp. 14.000	Rp. 5.500	Rp. 2.000	Rp. 21.500

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

SULISTIA WIDARTI, SH
Pembina / IVa
Nip.196509301998032001

BUPATI BULUNGAN,

ttd

BUDIMAN ARIFIN

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR: 188.44/K.46/2015

TENTANG

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM DI TINGKAT PANGKALAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Keputusan hasil rapat tanggal 21 Januari 2015 di Tarakan perihal Pembahasan Supply Point dan Penyesuaian HET LPG Tabung 3 Kg, disepakati penetapan HET LPG Tabung 3 Kg dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa dalam rangka pemerataan pemenuhan kebutuhan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG, maka perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan Provinsi Kalimantan Utara;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG);
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011/Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8193/12/MEM.M/2014 tanggal 17 Desember 2014 hal Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 541/07/SJ tanggal 5 Januari 2015 hal Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram;

3. Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor :188.45/1147/XII/2014 Tanggal 31 Desember tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liguiefird Petroleum Gas Tabung 3 KG Bersubsidi di Kabupaten Nunukan;

4. Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor:510/HK-II/42/2015 tanggal 2 Februari 2015 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Refill Elpiji Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro Sebagai Pengganti Pengguna Minyak Tanah di Kota Tarakan;

5. Surat Bupati Bulungan Nomor 542/004/Ek.Sarekda/I/2015 tanggal 8 Januari 2015 Perihal HET LPG 3 KG;

6. Surat Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Malinau Nomor 540/11/DPE/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 Perihal Perhitungan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquifield Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram Kabupaten Malinau;

7. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan ESDM Kabupaten Tana Tidung Nomor:541.3/02/Distamben-KTT/I/2015 Perihal Penyampaian usulan LPG 3 Kg;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan Provinsi Kalimantan Utara yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Harga Eceran Tertinggi Liquiefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dan hanya diperuntukan bagi keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro serta tidak dibenarkan dipergunakan untuk penggunaan diluar Ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Agen Penyalur Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram hanya diperkenankan menjual di tingkat Pangkalan yang telah memiliki Legalitas usaha dan tidak diperkenankan menjual diluar wilayahnya.

KEEMPAT : Apabila Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram yang disalurkan oleh Agen Penyalur melebihi dari Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini, maka Agen/Penyalur dapat dikenakan sanksi Administretif berupa Pencabutan Izin sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

KELIMA : Sosialisasi dan Pengawasan terhadap Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram pada Tingkat Pangkalan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan membentuk tim koordinasi.

KEENAM : Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan akan dievaluasi bilamana Harga Eceran Tertinggi tidak sesuai dengan kondisi riil dan fakta dilapangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Februari 2015

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM;
6. Direktur Utama PT. Pertamina (Persero);
7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM;
8. Kepala BPH Migas;
9. Kepala Kepolisian Daerah Kaltim;
10. Panglima Kodam VI/Mulawarman;
11. Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim
12. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
13. Bupati/Walikota se Provinsi Kalimantan Utara;
14. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;
15. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara ;
16. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara;
17. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara;
18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara;
19. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara;
20. GM PT. Pertamina (Persero) MOR VI Balikpapan;
21. SR Retail III PT. Pertamina (Persero) Tarakan;
22. DPC Hiswana Migas Kalimantan Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGQANISDASI

SUHARTO, SH
Pembina Tingkat I, IV/b
Nip. 19561022 197903 1 002

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR: 188.44/K.46/2015
TENTANG
PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM DI TINGKAT PANGKALAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG)
Tabung 3 Kilogramdi Tingkat Pangkalan Provinsi Kalimantan Utara

No	Kabupaten/Kota	Supply Point	Harga Tebus Agen	Margin Agen	Ongkos Angkut	Harga Agen Kepangkalan	Margin Pangkalan	HET Pangkalan
1	Kab. Bulungan	TanjungSelor (Bulungan)	Rp. 11.588,-	Rp. 1.200,-	Rp. 1.712,-	Rp. 14.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 16.500,-
2	Kab. Nunukan	Nunukan	Rp. 11.588,-	Rp. 1.200,-	Rp. 1.712,-	Rp. 14.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 16.500,-
3	Kab. Malinau	TanjungSelor (Bulungan)	Rp. 11.588,-	Rp. 1.200,-	Rp. 5.212,-	Rp. 18.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 20.000,-
4	Kab. TanaTidung	TanjungSelor (Bulungan)	Rp. 11.588,-	Rp. 1.200,-	Rp. 5.212,-	Rp. 18.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 20.000,-
5	Kota Tarakan	Tarakan	Rp. 11.588,-	Rp. 1.200,-	Rp. 1.212,-	Rp. 14.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 16.000,-

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGQANISDASI

SUHARTO, SH
Pembina Tingkat I, IV/b
Nip. 19561022 197903 1 002

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

LAPORAN BULANAN AGEN LPG 3KG (BERSUBSIDI)

NAMA AGEN : PT. MAKBUL
SOLD TO PARTY : 722376
WILAYAH PENYALURAN : Kab. Bulungan
PERIODE LAPORAN : BULAN MEI 2016

A. Laporan Stok Tabung Penyalur / Agen LPG 3KG

STOK TABUNG AGEN	TABUNG ISI	TABUNG KOSONG	TOTAL
Stok Awal Bulan	1.160	6.840	8.000
Total Penerimaan	17.920		
Total Penyaluran	17.960		
Stok Akhir Bulan	1.120	6.880	8.000

B. LAPORAN PENYALURAN KE PANGKALAN (Dapat berupa print Out dari SIMOL3K dan dilampirkan terpisah)

C. REKAPITULASI LAPORAN BULANAN SUB PENYALUR / PANGKALAN LPG 3KG

NO.	NAMA SUB PENYALUR / PANGKALAN	NO. REGISTRASI	STOK AWAL TABUNG ISI (Tabung)	JUMLAH PENERIMAAN DARI AGEN (Tabung)	JUMLAH PENYALURAN KE KONSUMEN (Tabung)	STOK TABUNG ISI AKHIR BULAN (Tabung)
1	ABDULLAH. A	677212722376040	0	160	160	0
2	AHMAD HIDAYAT	677211722376064	0	89	89	0
3	ALIANSYAH	677212722376006	0	151	151	0
4	ALIMUDDIN	677212722376063	0	200	200	0
5	BADAH NIAGANG	677212722376048	0	150	150	0
6	BASRI	677211722376059	0	331	331	0
7	BASRI LANTI	677212722376031	0	187	187	0
8	DARWIS	677212722376075	0	105	105	0
9	DING WAN	677212722376067	0	380	380	0
10	DJONLIE RAMLIE	677212722376045	0	111	111	0
11	ESTRA APUI	677212722376046	0	156	156	0
12	ESTU KUSUMA	677212722376079	0	200	200	0
13	FAHMI	677212722376016	0	707	707	0
14	FARIDAH LAWAI	677212722376001	0	124	124	0
15	FUGUH SETYO. P	677212722376062	0	334	334	0
16	H. ALIMUDDIN	677212722376052	0	194	194	0
17	H. IRFAN	677212722376068	0	467	467	0
18	H. JAWANI MUSA	677212722376081	0	226	226	0
19	HADI MUSLIMIN	677212722376027	0	147	147	0
20	HARDILAN	677212722376056	0	156	156	0
21	HARIJANTO	677212722376076	0	318	318	0
22	HASANUDDIN	677212722376034	0	165	165	0
23	HASANUDDIN	677212722376082	0	95	95	0
24	HERI SAPTOROHARJO	677212722376029	0	120	120	0
25	IBRAHIM	677212722376070	0	467	467	0
26	JAMAL. JN	677212722376036	0	339	339	0
27	JOKO SUPRAPTO	677212722376022	0	170	170	0
28	KARSIH	677212722376011	0	140	140	0
29	KOPERASI BRIGIF	677212722376083	0	104	104	0
30	KOPERASI RAJA ALAM	677212722376084	0	0	0	0
31	LASAPPE / SENANG	677212722376043	0	66	66	0
32	M. LUKMAN HAKIM. H	677212722376012	0	525	525	0
33	M. NASIR HAYUN	677212722376030	0	87	87	0
34	M. PUYING	677212722376015	0	200	200	0
35	M. RAFIK	677212722376058	0	210	210	0

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

36	M. YASIN SANLIAS	677212722376017	0	73	73	0
37	MARDIAN / USMAN	677212722376019	0	144	144	0
38	MASHURI	677212722376057	0	305	305	0
39	MASRAN P	677212722376051	0	210	210	0
40	MEGAWATI MASKUN	677212722376002	0	556	556	0
41	MUHAMMAD A. B.	677212722376078	0	10	10	0
42	MUHAMMAD AMIN	677212722376047	0	378	378	0
43	MUHAMMAD SUAIB	677212722376037	0	439	439	0
44	MUHAMMAD TANG	677212722376026	0	250	250	0
45	MUHLIS	677212722376014	0	336	336	0
46	MULYADI	677212722376049	0	600	600	0
47	MUZAKKIR S.Ag	677212722376061	0	200	200	0
48	NAPING	677212722376042	0	437	437	0
49	NGADIYONO	677212722376053	0	92	92	0
50	NURDIN	677212722376077	0	81	81	0
51	NURJANAH	677212722376065	0	300	300	0
52	NURSITAH	677212722376073	0	301	301	0
53	NURWAHIDA	677212722376021	0	90	90	0
54	OUTLET	677212722376801	0	0	0	0
55	PARDA ARITONANG	677212722376085	0	12	12	0
56	PASIATI	677212722376018	0	156	156	0
57	PULINOP JAUI	677212722376086	0	118	118	0
58	RUDI KIRA	677212722376039	0	0	0	0
59	RUSDI	677212722376024	0	423	423	0
60	S. MOMENG	677212722376028	0	0	0	0
61	SABRI	677212722376010	0	79	79	0
62	SALLE	677212722376074	0	142	142	0
63	SAPARDIANSYAH	677212722376080	0	194	194	0
64	SAREH	677212722376041	0	1083	1083	0
65	SUGENG WAHONO	677212722376033	0	342	342	0
66	SUGIANTO	677212722376009	0	332	332	0
67	SUKWANTO. S	677212722376060	0	120	120	0
68	SUPARDI	677212722376013	0	198	198	0
69	SUPARMAN	677212722376004	0	154	154	0
70	SUWARNO	677212722376008	0	280	280	0
71	SYARIFUDDIN	677212722376069	0	189	189	0
72	TINI AYEM	677212722376050	0	97	97	0
73	TUMI IRAWATI	677212722376020	0	202	202	0
74	WAHDANIAH	677212722376054	0	200	200	0
75	WARIS SUSANTO	677212722376023	0	214	214	0
76	WIYANA LIMA. B	677212722376025	0	335	335	0
77	YOHANES	677212722376044	0	84	84	0
78	ZAENAL ABIDIN	677212722376055	0	400	400	0
79	ZAHRA / AISYAH	677212722376003	0	103	103	0
80	ZULKIFLI	677212722376071	0	120	120	0
TOTAL			0	17.960	17.960	0

Demikian Laporan ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenar – benarnya. Kami bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila terdapat kesalahan dalam penyaluran LPG 3 KG bersubsidi.

Tanjung Selor, 03 Juni 2016

PT. MAKBUL

FADILAH

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

PT. MAKBUL

REALISASI PENYALURAN GAS LPG 3KG

BULAN : MEI 2016

Sub Penyalur	Kelurahan	Kecamatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
ABDULLAH. A	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40	160
AHMAD HIDAYAT	LONG BELUAH	TG. PALAS BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89
ALIANSYAH	TENGKAPAK	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	25	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	151
ALIMUDDIN	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0	200
BADAH NIAGANG	GUNUNG PUTIH	TANJUNG PALAS	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	150
BASRI	TANJUNG BUKA	TG. PALAS TENGAH	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	130	0	0	0	331
BASRI LANTI	GUNUNG SARI	TANJUNG SELOR	0	44	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	187
DARWIS	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	27	0	105
DING WAN	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	0	0	70	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	70	0	60	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	0	0	380
DJONLIE RAMLIE	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	30	111
ESTRA APUI	TG. SELOR TIMUR	TANJUNG SELOR	0	0	9	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	52	0	156
ESTU KUSUMA	TG, PALAS TENGAH	TANJUNG PALAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50	200
FAHMI	TANJUNG SELOR HULU	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	0	110	0	0	0	73	0	0	0	109	0	0	0	58	0	127	0	0	60	0	0	0	100	0	0	0	70	707
FARIDAH LAWAI	TERAS BARU	TANJUNG PALAS	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	124
FUGUH SETYO. P	TG. SELOR TIMUR	TANJUNG SELOR	0	77	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	334
H. ALIMUDDIN	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	194
H. IRFAN	JELARAI SELOR	TANJUNG SELOR	0	72	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0	85	0	0	0	0	0	0	97	0	0	0	80	0	467
H. JAWANI MUSA	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	0	32	0	0	0	0	0	40	0	0	30	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	40	0	0	0	0	226
HADI MUSLIMIN	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	35	0	0	0	147
HARDILAN	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0	156
HARIJANTO	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	103	0	0	0	0	65	318
HASANUDDIN	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40	165
HASANUDDIN	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0	95
HERI SAPTOROHARJO	TENGKAPAK	TANJUNG SELOR	0	0	0	30	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	120
IBRAHIM	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	69	0	25	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	64	0	0	0	50	0	0	51	0	0	0	56	0	0	52	0	467
JAMAL. JN	TG. PALAS HILIR	TANJUNG PALAS	0	0	0	42	0	0	0	0	0	20	0	40	0	0	0	50	0	0	40	0	0	0	50	0	0	0	0	47	0	50	0	339
JOKO SUPRAPTO	JELARAI SELOR	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170
KARSIH	TG. SELOR TIMUR	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	140
KOPERASI BRIGIF	GUNUNG SARI	TANJUNG SELOR	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	104
KOP. RAJA ALAM	JELARAI SELOR	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

LASAPPE / SENANG	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	12	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	12	0	0	0	0	0	10	5	0	0	0	5	0	0	0	12	0	0	0	66
M. LUKMAN HAKIM. H	KARANG ANYAR	TANJUNG PALAS	0	0	0	100	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	105	0	0	80	0	0	0	70	0	525
M. NASIR HAYUN	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	16	0	0	5	0	0	0	16	0	0	0	0	18	0	0	0	87
M. PUYING	KARANG AGUNG	TG. PALAS UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	200
M. RAFIK	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	50	0	0	0	210
M. YASIN SANLIAS	TANJUNG SELOR HULU	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	15	0	0	0	0	73
MARDIAN / USMAN	GUNUNG SERIANG	TANJUNG SELOR	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	144
MASHURI	WONO MULYO	TG. PALAS TIMUR	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	72	0	305
MASRAN P	TG. PALAS HILIR	TANJUNG PALAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	70	0	210
MEGAWATI MASKUN	PIMPING	TG. PALAS UTARA	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	157	0	0	0	0	0	0	181	0	0	0	0	0	556
MUHAMMAD A. B.	TANJUNG SELOR HULU	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
MUHAMMAD AMIN	JELARAI SELOR	TANJUNG SELOR	0	62	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	60	0	0	70	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	65	0	378
MUHAMMAD SUAIB	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	90	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	100	439
MUHAMMAD TANG	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	250
MUHLIS	TG. PALAS UTARA	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	336
MULYADI	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	35	20	50	0	75	0	0	0	10	0	35	100	0	0	0	50	0	0	0	0	0	95	30	0	0	0	100	0	0	0	600
MUZAKKIR S.Ag	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	200
NAPING	KARANG AGUNG	TG. PALAS UTARA	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	437
NGADIYONO	TANJUNG SELOR HULU	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	92
NURDIN	TANJUNG SELOR HULU	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	81
NURJANAH	TANAH KUNING	TG. PALAS TIMUR	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0	300
NURSITAH	TG. PALAS TENGAH	TANJUNG PALAS	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	301
NURWAHIDA	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	90
OUTLET	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARDA ARITONANG	GUNUNG SARI	TANJUNG SELOR	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
PASIATI	TANJUNG SELOR HULU	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	36	0	0	0	0	156
PULINOP JAUI	LONG PESO	PESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	118
RUDI KIRA	LONG BANG	PESO HILIR/ILIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUSDI	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	30	0	30	30	30	0	0	30	0	0	30	30	0	0	30	30	0	31	0	0	0	30	0	0	31	0	31	0	30	0	423
S. MOMENG	LONG BIA	PESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SABRI	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	17	0	79
SALLE	TANJUNG BUKA	TG. PALAS TENGAH	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142
SAPARDIANSYAH	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0	194
SAREH	GUNUNG PUTIH	TANJUNG PALAS	0	0	0	216	0	0	0	0	0	216	0	0	0	0	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	0	0	219	0	0	0	0	1083
SUGENG WAHONO	APUNG	TANJUNG SELOR	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	61	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	342
SUGIANTO	WONO MULYO	TG. PALAS TIMUR	0	0	0	50	0	31	0	0	0	0	0	0	101	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	332
SUKWANTO. S	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	120
SUPARDI	BUMI RAHAYU	TANJUNG SELOR	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	198

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

SUPARMAN	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	39	0	154
SUWARNO	KELUBIR	TG. PALAS UTARA	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	280
SYARIFUDDIN	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	50	0	189
TINI AYEM	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0	97
TUMI IRAWATI	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	202
WAHDANIAH	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	200
WARIS SUSANTO	TG. SELOR TIMUR	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50	0	0	0	14	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	214
WIYANA LIMA. B	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	65	335
YOHANES	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	0	21	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	0	0	0	84
ZAENAL ABIDIN	MANGKUPADI	TG. PALAS TIMUR	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	400
ZAHRA / AISYAH	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	27	0	103
ZULKIFLI	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	120
JUMLAH			**0**	**555**	**590**	**1022**	**480**	**716**	**0**	**0**	**190**	**919**	**0**	**1005**	**800**	**429**	**0**	**1380**	**775**	**93**	**1293**	**1011**	**0**	**0**	**1559**	**627**	**0**	**1010**	**574**	**698**	**0**	**1612**	**622**	**17960**

Sales Executive

Moch. Irfan

Tanjung Selor, 3 Juni 2016
PT. MAKBUL

Fadliah

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
Gedung Plaza Centris, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-5, Jakarta 12910

Telex | Kawat : Ditjen Migas | Tromol Pos : 1296/Jkt 100.12 | Telepon : 5268910

Nomor : 2776/15/DJM.O/2015 27 Februari 2015
Sifat :
Lamp :
Perihal : **Kuota Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Tahun 2015**

Yang terhormat
Gubernur Kalimantan Utara
di
Tempat

Sehubungan dengan kuota *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh DPR RI, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Terlampir kami sampaikan Kuota LPG Tabung 3 Kilogram per Kabupaten/Kota.
2. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kilogram Pasal 15 disebutkan bahwa "*Menteri melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg*". Sebagai bentuk dari pengawasan ini, Ditjen Migas melaksanakan verifikasi terhadap realisasi isi ulang LPG pada tingkat SPBE dan Agen.
3. Pemerintah dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian, mewajibkan Badan Usaha pelaksana kegiatan tersebut, dalam hal ini PT Pertamina (Persero) untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap agen dalam rantai distribusi yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Pasal 32 disebutkan bahwa Dirjen Migas melakukan koordinasi dengan Departemen Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri) atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang meliputi Harga Eceran Tertinggi, kelancaran penyediaan dan pendistribusian LPG pada tingkat penyalur LPG ke konsumen LPG dan izin lokasi pendirian Sarana dan Fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG.
5. Untuk itu, dalam rangka pengawasan, sangat dibutuhkan dukungan dan peran serta Pemerintah Daerah dalam hal pendistribusian LPG Tabung 3 kg sehingga kuota yang telah tersedia dapat terawasi dengan baik sesuai dengan peruntukannya.

Perpres 104/2007
Permen ESDM 26/2009 Psl 32

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal

IGN Wiratmaja
NIP. 196312211989031001

Tembusan:
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- Menteri Dalam Negeri
- Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Lampiran:

NO	KABUPATEN/KOTA	Kuota per Kab/Kota (MT)
1	Kab. Berau	2.787
2	Kab. Bulungan	979
3	Kab. Nunukan	1.457
4	Kab. Tanah Tidung	204
5	Kota Tarakan	2.937
6	Kab Malinau	204
	Total Prop. Kalimantan Utara	8.567

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jelarai **Telp.** (0552) 21008- 233316 **Fax.** (0552) 21009
TANJUNG SELOR

Tanjung Selor, 02 Februari 2016

Kepada

Nomor : 542/ 17 / Ek. Sarekda/ II/ 2016
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Undangan Rapat

Yth. .....
.....
di--

Tanjung Selor

Menindaklanjuti hasil rapat HET Elpiji 3Kg Kecamatan se- Kabupaten Bulungan tanggal 15 Desember 2015 dan berdasarkan usulan tertulis HET 3Kg dari Kecamatan, kami mengundang Saudara untuk menghadiri finalisasi rapat penetapan HET Elpiji 3Kg untuk kecamatan se- Kabupaten Bulungan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal	:	Rabu/ 03 Februari 2016
Pukul	:	10. 00 Wita s.d Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan
Acara	:	Rapat Penataan HET pangkalan Se- Kabupaten Bulungan

mengingat pentingnya rapat tersebut, kehadiran Saudara sangat diharapkan.

Demikan disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

An. Sekretaris Daerah
Ass. Bidang Perekonomian Pembangunan & Kesra,

H. Much. Zulkifli, SE, M.Si
NIP. 19670419 199303 1 007

Tembusan:
1. Bupati Bulungan (sebagai Laporan)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

RESUME RAPAT PENETAPAN HET LPG 3KG

Pimpinan rapat : Kepala Bagian Perekonomian Setkab. Bulungan
Dihadiri oleh : daftar terlampir
Hari/ Tanggal : 03 Februari 2016
Tempat : Ruang Kabag. Perekonomian Setkab. Bulungan
Pukul : 11.00 s.d 12.35

I. Pembukaan

Rapat dimaksud menindaklanjuti hasil rapat HET LPG 3Kg Kecamatan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 bertempat di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.

II. Pembahasan

- Berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya:

1. Berita acara rapat HET Elpiji 3 Kg tanggal 15 Desember 2015;
2. Usulan tertulis Kecamatan atas nilai HET LPG 3Kg di masing- masing Kecamatan;
3. Jarak dan waktu tempuh dari Supply Point Elpiji 3kg (Tanjung Selor) ke masing- masing kecamatan;
4. Kondisi geografis & infrastruktur jalan;
5. Moda transportasi, dll;

Maka disepakati HET untuk masing- masing Kecamatan (Titik Serah Ibukota Kecamatan) adalah sebagaimana berikut:

NO	KECAMATAN	IBU KOTA KECAMATAN	HET
1.	Peso	Long Bia	Rp. 35.000,-
2.	Peso Hilir	Long Tungu	Rp. 32.000,-
3.	Tanjung Palas Barat	Long Beluah	Rp. 30.000,-
4.	Tanjung Palas	Tanjung Palas	Rp. 28.000,-
5.	Tanjung Palas Utara	Karang Agung	Rp. 33.000,-
6.	Tanjung Palas Timur	Tanah Kuning	Rp. 35.000,-
7.	Tanjung Selor	Tanjung Selor	Rp. 23.000,-
8.	Tanjung Palas Tengah	Salim Batu	Rp. 31.000,-
9.	Sekatak	Sekatak Buji	Rp. 35.000,-
10.	Bunyu		City Gas

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

- Penetapan HET Elpiji 3Kg wilayah Desa, ditetapkan oleh masing- masing Camat.

III. Kesimpulan

- HET kecamatan segera disahkan oleh PJ. Bupati Bulungan;
- Camat segera menetapkan HET untuk masing- masing Desa.

Demikian Resume Rapat dibuat sebagai bahan tindak lanjut.

Pimpinan Rapat:
Kepala Bagian Perekonomian,

Heri Dwi Handoko
NIP. 19651105 198603 1 016

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43214

ABSENSI RAPAT

PEMBAHASAN RAPAT	: PEMBAHASAN HET KECAMATAN
PIMPINAN RAPAT	: KABAG PEREKONOMIAN SETDA. BULUNGAN
HARI/TANGGAL	: RABU, 3 FEBRUARI 2016
TEMPAT	: RUANG KERJA KABAG PEREKONOMIAN
PUKUL	: 10.00 WITE

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
1.	Heri Dwi HANDOKO	Kabag. Perekonomian.	1. ....
2.	Zaimah. S	Kabid. Migas, Distamben Bulungan.	2. ....
3.	GERILYAWANSYAH.	KABID. PERDAG PERIN-DAGKOP.	3. ....
4.	HUSIN, SE	KASI MIGAS SEK. HILIR	4. ....
5.	Siti R.A	Kasubag Sarana Prasarana perekonomian	5. ....
6.	Hary R. AR.	Staf bag perekonomian	6. ....
7.	KASMAN	Kasi LLASDP Dishubkominfo	7. ....
8.	Sudirman	Staf bag. perekonomian	8. ....
9.	[illegible]	Kasubag Proda bag ekonomi	9. ....
10.	Jaleha. Y	Staf bag. perekonomian	10. ....
11.	Ulis	Staf bag. perekonomian	11. ....
12.	Kornelis Toberty	Staf bag. perekonomian	12. ....
13.	Zulkarnain	Staf bag. perekonomian	13. ....
14.	Suriana.	Staf bag. perekonomian	14. ....
15.	Tumiran	Kasubag PPD bag perekonomian	15. ....

Pimpinan Rapat
Kabag Perekonomian,

HERI DWI HANDOKO

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jelarai Telp. (0552) 21008- 233316 Fax. (0552) 21009
TANJUNG SELOR

Tanjung Selor, 01 Desember 2015

Kepada

Nomor : 542/ 175 / Ek. Sarekda/ XII/ 2015
Sifat : Segera
Lampiran : 01 (Satu) Lbr
Perihal : Undangan Rapat

Yth. (Daftar Terlampir)
di -
Tanjung Selor

Menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 188.44/ K.367/ 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/ K.46/ 2015 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquiefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan Provinsi Kalimantan Utara, maka perlu segera menetapkan HET Elpiji 3 Kg untuk wilayah kecamatan se- Kabupaten Bulungan. Oleh sebab itu, dimohon pihak kecamatan mempersiapkan usulan harga HET yang wajar dan layak disesuaikan kondisi daerah maning- masing. Adapaun rapat penetapan HET kecamatan akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa/ 15 Desember 2015
Pukul : 09. 00 Wita s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan
Acara : Rapat Penataan HET pangkalan Se- Kabupaten Bulungan

mengingat pentingnya rapat tersebut, kehadiran Saudara sangat diharapkan.

Demikan disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Sekretaris Daerah,

Drs. Syafril
NIP. 19620[illegible]99103 1 007

Tembusan:
1. Bupati Bulungan (sebagai Laporan);
2. Arsip.

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H. Much. Zulkifli, SE, M.Si	Kepala Bagian Perekonomian	

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

RESUME RAPAT HET KECAMATAN KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2015

Hari/ Tgl : Selasa/ 15 Desember 2015
Tempat : Ruang Rapat Sekda
Pukul : 09 s.d 12.30 Wita
Pimpinan : Disperindagkop (Kabid. Perdagangan)

---

1. KECAMATAN PESO HILIR
   - Ongkos transport : 10.000/ liter (kebutuhan 200 liter PP)
   - Buruh : 5000/ tab
   - Margin pangkalan : 3000/ tab
   - HET : 38.000 (Nahaya)
     - NahaAya :Rp. 38.000
     - Long Telenjau :Rp. 34.000
     - Long Bang&Hulu :Rp. 35.000
     - Long Tungu : Rp. 31.000
     - Long Lembu :Rp. 31.000
2. KECAMATAN PESO
   - Pangkalan aktif hanya 1 pangkalan (Peso)
   - Kenaikan harga HET berkisar Rp.7000 – Rp.10.000/ tabung dari tebus Kabupaten
   - HET Peso : Rp.31.000/ tab
   - Harga eceran yang ada saat ini Rp.45.000 – Rp.55.000/ tab
3. KECAMATAN TG. PALAS
   - Seyogyanya HET disetiap Kecamatan sama, beban transportasi disubsidi oleh Pemerintah (Pemda) melalui SKPD teknis
   - HET :
     - Ongkos angkut : Rp.5000
     - Margin :Rp. 3000
     - Tebus Agen :Rp.21.000
     - HET : Rp.30.000
   - Usul agar desa Antutan mempunyai pangkalan yang juga dapat mengakomodir desa Pejalin;
4. KECAMATAN TG. PALAS UTARA
   - HET : 35.000/ tab
   - Penambahan pangkalan, belum semua desa (dari 6 desa) mempunyai pangkalan (Ardi Mulya & Ruhui Rahayu)
   - Usulan Tim Wasdal dibentuk di tingkat Kabupaten & Kecamatan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

5. KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH
   - Margin pangkalan : Rp.3000
   - HET :
     - Salim batu : Rp.31.000
     - Tanjug Buka : Rp.33.000
     - Silva Rahayu : Rp.33.000

6. DISTAMBEN KABUPATEN BULUNGAN:
   - Komitmen dan tanggung jawab Agen terkait kenaikan biaya angkut Rp. 1.212 menjadi Rp. 8.212 (biaya tersebut dibebankan kekonsumen/ masyarakat)
   - Desepakati biaya angkut dimasukkan dalam HET Kecamatan (pangkalan mengambil Elpiji 3Kg ke Agen)
   - Margin Pangkalan boleh di rubah sesuai kesepakatan Pemda disesuaikan kondisi daerah/ kecamtan masing- masing
   - Margin Pangkalan ditetapkan dalam forum Rp.3000/ tab
   - Kuota dapat ditambah jika pangkalan penataannya baik (arahan dari Pertamina)
   - Agen harus mempunyai Gudang dan tidak boleh merangkap menjadi pangkalan
   - Agen segera menunjuk pangkalan

7. AGEN PT. BADJUBER BERSAUDARA:
   - Subsisdi transport fee : Rp.11.000/ tab
   - Realisasi : (17.000tab Januari – Desember)

8. AGEN PT. TRI BUMI SEJAHTERA:
9. AGEN PT. MITRA BRILIAN MANDIRI:
10. KABAG. PEREKONOMIAN:
    - Pemda akan mengusulkan kuota Kabupaten berdasarkan usulan kuota masing-masing Kecamatan
    - Usulan kuota dan HET kecamatan secara tertulis ditujukan kpd Pj. Bupati paling lambat 21 Desember 2015
    - Pemda akan mengusulkan penambahan ke BPH Migas.
11. Bersama Resume ini terlampir Tandatangan peserta rapat.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

PEMBAHASAN RAPAT : RAPAT PENATAAN PANGKALAN SE- KABUPATEN BULUNGAN
HARI/TANGGAL : SELASA/15 DESEMBER 2015
TEMPAT : RUANG RAPAT SEKRETARIS DAERAH KAB. BULUNGAN
PUKUL : 09.00 S.D SELESAI

No	Nama	Jabatan/Dinas/Instansi	Tanda tangan
1	Heri Dwi Handoko	Kabag Perekonomian	1
2	GERILYAWANSYAH	DINAS PERINDAGKOP	2
3	Hary K. AR.	Bag. Perekonomian Bulungan	3
4	[illegible]	CAMAT TG PALAS	4
5	Siti R. A.	[illegible]	5
6	Zaimah. S	Kabid. Migas	6
7	Kufull	TRI Mandiri Sejati.	7
8	NURDIN	Kec. TG. PALAS [illegible]	8
9	FADILAH.	PJ. MAKBUL	9
10	H Jaenal abidin	pangkalan	10
11	Bp naping	pangkala	11
12	[illegible]	[illegible]	12
13	[illegible]	Kec Peso Hilir.	13
14	Yunus	Kec. Peso	14
15	P. Yan Hasten	— " —	15
16	M. NASIR BJ	PT. [illegible]	16
17	Husin	Kasi Migas	17
18	[illegible]	BAG. PEREKONOMIAN	18
19	Ulis	Staf Bag. ekonomi	19
20	Jaleh. Y	— " —	20
21	Sudirman	— " —	21
22	Zulkarnain	— " —	22

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jelarai Telp. (0552) 21008 - 233316 Fax. (0552) 21009
TANJUNG SELOR

Tanjung Selor, 10 April 2015

Kepada

Nomor : 542/78/EK.Sarekda/IV/2015
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Penyesuaian HET Elpiji 3 Kg

Yth. 1. Kepala Distamben Kab.Bulungan
2. Kepala Disperindakop & UMKM Kab.Bulungan;
3. Kepala Dinas Perhubungan & Kominfo Kab.Bulungan;
4. Kepala Satpol PP Kab.Bulungan;
5. Kabag Hukum Setkab. Bulungan;

di-
Tempat

Sehubungan dengan rencana penyesuaian HET Elpiji 3 Kg Kabupaten Bulungan, maka akan dilaksanakan rapat di maksud pada :

Hari/Tanggal : Senin, 13 April 2015
Pukul : 09.00 Wite s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Wakil Bupati Kabupaten Bulungan
Pimpinan Rapat : Asisten Bidang Perekonomian,Pembangunan dan Kesra Setda Bulungan

Mengingat pentingnya kegiatan ini maka diharapkan kepada Saudara dapat menghadiri acara di maksud.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

AN. Sekretaris Daerah
Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan setda

H.Moch.Zulkifli,SE,M,Si
NIP. 19670419 199303 1 007

Tembusan kepada Yth :
1. Bupati Bulungan di Tanjung Selor (sebagai laporan)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

RESUME RAPAT PENETAPAN HET LPG 3KG

Pimpinan rapat : Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejaterahaan Setda. Kabupaten Bulungan
Dihadiri : Daftar Terlampir
Hari/Tanggal : 13 April 2015
Tempat : Ruang Rapat Sekda. Kabupaten Bulungan
Pukul : 09.30 s.d 11.30 Wita
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

I. Pembukaan

Menindaklanjuti hasil rapat HET LPG bertempat di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan dalam pembahasan permasalahan kelangkaan Elpiji ,pendistribusian serta harga yang semakin tinggi di masyarakat serta agen LPG yang mengeluh dengan biaya operasional yang tinggi sedangkan harga elpiji tidak mampu menutup biaya tersebut.

II. Pembahasan

- Mengatasi kelangkaan LPG dengan Menanggapi agen PT. Makbul dan PT.Brilian yang siap berinvestasi dalam pendistribusian LPG (menyiapkan angkutan)dengan menaikan HET pangkalan yang kenaikan tersebut dihitung berdasarkan keseluruhan biaya operasional (daftar terlampir).

III. Kesimpulan

- Kesepakatan HET LPG 3 kg tercapai pada harga Rp. 23.000,00,-(Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)
- Harga tersebut dengan menggunakn supply Point Tanjung Selor dan dalam hitungan radius 60(Enam Puluh) km dari titik searah/Supply Point
- Pemda segera mengusulkan HET LPG tersebut ke provinsi agar di tetapkan oleh gubenur Kalimantan Utara;
- Verifikasi terhadap kuota elpiji 3kg yang telah diambil agen dilakukan oleh disperindakop

Demikian resume Rapat Penetapan HET LPG PSO (Supply Poin Tanjung Selor) dibuat sebagai bahan tindak lanjut.

Pimpinan Rapat
Asisten Bid. Perekonomian Pembangunan & Kesra,

H. Moch.Zulkifli, SE,M.Si
Nip. 19670419 199303 1 007

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

RAPAT PENYESUAIAN HET ELPIJI 3 KG KABUPATEN BULUNGAN

HARI/ TANGGAL : SENIN/ 13 APRIL 2015
TEMPAT : RUANG RAPAT SEKDA KAB. BULUNGAN
PUKUL : 09.00 WITA S.D SELESAI

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	NO.HP	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	6	
1	HM. Zulkifli	Asisten II			1	
2	H. Agus N	Kadis	Perindagkop	081347396835		2
3	H Bakaruddin	Kadis Hub	Dishub		3	
4	Yahran	Kasi ASDP	Dishub			4
5	Zainah . S	Kabid . Migas	Distamben	0813 502 [illegible]	5	
6	Husin	Kasi Migas	Distamben	08115401725		6
7	Leri Dwi Handoko	Kabag Perekonomian	Setda. Kab. Bulungan	0812534779[illegible]	7	
8	Hamidi	Kasat Pol-PP	— " —	082137336777		8
9	M. Hatta	Bag Hukum	Setda. Kab. Bul	08134662187[illegible]	9	
10	H Bas					10
11	Armansyah	Pol.PP			11	
12	S. Li	Kasubbag. Perekonomian Perr.	Bag. Perekonomian	08132803470		12
13	Henny Ida Am.	Staf	— " —		13	
14	Lilis Setiawati	Staf	Bag Perekonomian			14

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	NO.HP	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	6	
15					15	
16						16

Tanjung Selor, 13 April 2015

Pimpinan Rapat,

H. Moch. Zulkifli, SE,M.Si

NIP. 19670419 199303 1 007

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

PERHITUNGAN BIAYA TRANSPORTASI LPG 3 KG SAMARINDA - TANJUNG SELOR (BULUNGAN)

1120

NO	URAIAN	Quantity		Biaya		
		Qty 1	Qty 2	Satuan/Bulan	Per Ret	Per Tabung
	Fix Cost / Biaya Tak Langsung (i)					
1	Personel langsung (Supir), Personel penunjang (Gudang, Administrasi, Security, dll dibagi 4	2		2,822,428.33	1,411,214.17	1,260.01
2	Truck	4		2,822,428.33	705,607.08	630.01
3	Supervisor	1		4,500,000.00	281,250.00	251.12
		Sub total biaya personel (i)			2,398,071.25	2,141.14
	Biaya Operasional Kendaraan (ii)					
1	Ban	6		4,200,000.00	3,888,000.00	3,471.43
2	Kampas Rem	4		1,200,000.00	540,000.00	482.14
3	Kampas Kopling	1		3,750,000.00	253,125.00	226.00
4	Oli Mesin per 4000 Km	12	55,000	660,000.00	222,750.00	198.88
5	Oli Transmisi & Gardan per 5000 Km	20	55,000	1,100,000.00	185,625.00	165.74
6	Service Rutin per 5000 Km	1		1,400,000.00	378,000.00	337.50
7	PKB (STNK) per Tahun	1	6,700,000	558,333.33	139,583.33	124.63
8	KIR Truk per 6 bulan	1	600,000	100,000.00	25,000.00	22.32
9	Cadangan perbaikan	1		6,000,000.00	1,500,000.00	1,339.29
10	Asuransi	1	650,000,000	1,625,000.00	406,250.00	362.72
11	Penyusutan	1	650,000,000	5,416,666.67	1,354,166.67	1,209.08
		Sub total biaya personel (ii)			8,892,500.00	7,939.73
	Biaya Langsung Perjalanan (iii)					
1	Uang Makan	2	6	95,000.00	1,140,000.00	1,017.86
2	Insentip	2	1	200,000.00	400,000.00	357.14
3	Solar	1	700	6,900.00	4,830,000.00	4,312.50
4	Plastik Wrap	1	1	40,000.00	40,000.00	35.71
5	Cuci Truk	1	1	100,000.00	100,000.00	89.29
6	Biaya tak terduga	1	1	150,000.00	150,000.00	133.93
		Sub total biaya personel (iii)			6,660,000.00	5,946.43
		Total biaya Transportasi (I + ii + iii)			17,950,571.25	16,027.30
	Cadangan biaya tak terduga (tbng)					
1	Rusak, hilang, dll)	1	5%		883,528.56	788.86
2	Margin	1	15%		2,650,585.69	2,366.59
		Sub Total (iv)			3,534,114.25	3,155.45
		Total biaya (I + ii + iii + iv)			21,484,685.50	19,182.75
			Ppn 10%		2,148,468.55	
			Ppn 3%		644,540.57	
			Grand Total		24,277,694.62	**21,676.51**
	Harga tebus pertamina Pertabung					11,588.00
	Total biaya					33,264.51
	Subsidi dari pertamina untuk transportir Pertabung					12,060.00
	HET AGEN					**21,204.51**
	Margin Pangkalan					2,000.00
	Harga Pangkalan					**23,204.51**

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

PERHITUNGAN BIAYA TRANSPORTASI LPG 3 KG SAMARINDA - TANJUNG SELOR (BULUNGAN)

1120

NO	URAIAN	Quantity		Biaya		
		Qty 1	Qty 2	Satuan/Bulan	Per Ret	Per Tabung
	Fix Cost / Biaya Tak Langsung (i)					
1	Personel langsung (Supir), Personel penunjang (Gudang, Administrasi, Security, dll dibagi 4	2		2,822,428.33	1,411,214.17	1,260.01
2	Truck	4		2,822,428.33	705,607.08	630.01
3	Supervisor	1		4,500,000.00	281,250.00	251.12
		Sub total biaya personel (i)			2,398,071.25	2,141.14
	Biaya Operasional Kendaraan (ii)					
1	Ban	6		4,200,000.00	3,888,000.00	3,471.43
2	Kampas Rem	4		1,200,000.00	540,000.00	482.14
3	Kampas Kopling	1		3,750,000.00	253,125.00	226.00
4	Oli Mesin per 4000 Km	12	55,000	660,000.00	222,750.00	198.88
5	Oli Transmisi & Gardan per 5000 Km	20	55,000	1,100,000.00	185,625.00	165.74
6	Service Rutin per 5000 Km	1		1,400,000.00	378,000.00	337.50
7	PKB (STNK) per Tahun	1	6,700,000	558,333.33	139,583.33	124.63
8	KIR Truk per 6 bulan	1	600,000	100,000.00	25,000.00	22.32
9	Cadangan perbaikan	1		6,000,000.00	1,500,000.00	1,339.29
10	Asuransi	1	650,000,000	1,625,000.00	406,250.00	362.72
11	Penyusutan	1	650,000,000	5,416,666.67	1,354,166.67	1,209.08
		Sub total biaya personel (ii)			8,892,500.00	7,939.73
	Biaya Langsung Perjalanan (iii)					
1	Uang Makan	2	6	95,000.00	1,140,000.00	1,017.86
2	Insentip	2	1	200,000.00	400,000.00	357.14
3	Solar	1	700	6,900.00	4,830,000.00	4,312.50
4	Plastik Wrap	1	1	40,000.00	40,000.00	35.71
5	Cuci Truk	1	1	100,000.00	100,000.00	89.29
6	Biaya tak terduga	1	1	150,000.00	150,000.00	133.93
		Sub total biaya personel (iii)			6,660,000.00	5,946.43
		Total biaya Transportasi (I + ii + iii)			17,950,571.25	16,027.30
	Cadangan biaya tak terduga (tbng)					
1	Rusak, hilang, dll)	1	5%		883,528.56	788.86
2	Margin	1	15%		2,650,585.69	2,366.59
		Sub Total (iv)			3,534,114.25	3,155.45
		Total biaya (I + ii + iii + iv)			21,484,685.50	19,182.75
			Ppn 10%		2,148,468.55	
			Ppn 3%		644,540.57	
			Grand Total		24,277,694.62	**21,676.51**
	Harga tebus pertamina Pertabung					11,588.00
	Total biaya					33,264.51
	Subsidi dari pertamina untuk transportir Pertabung					12,060.00
	HET AGEN					**21,204.51**
	Margin Pangkalan					2,000.00
	Harga Pangkalan					**23,204.51**

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

RESUME RAPAT PENYESUAIAN HARGA JUAL AGEN ELPIJI 3 KG DI KABUPATEN BULUNGAN

Pimpinan rapat	: **Kepala Bagian perekonomian Setda. Kabupaten Bulungan**
Dihadiri oleh	: **daftar terlampir**
Hari/ Tanggal	: **22 April 2015**
Tempat	: **Bagian Perekonomian Setda. Kabupaten Bulungan**
Pukul	: 09.00 s.d 10.10 Wita

I. Pembukaan

Kenaikan BBM Solar PSO tertanggal 28 Maret 2015 sebesar 7.81% dari harga Rp. 6.400,00 menjadi Rp. 6.900,00 mengakibatkan meningkatnya biaya operasional Agen Elpiji 3 Kg. Seiring dengan hal tersebut, DPC Hiswana Migas Tarakan telah mengusulkan kenaikan Harga Jual Agen ke Pangkalan sebesar Rp. 1000,00 (Seribu Rupiah) menjadi Rp.15.500,00 (Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

II. Pembahasan

- Usulan Harga Jual Agen Elpiji 3 Kg yang awalnya Rp.14.500,00 menjadi Rp.15.500,00 dikarenakan kenaikan biaya operasional sbb:
  - Biaya konsumsi BBM;
  - Biaya spare part/ suku cadang;
  - Biaya service, dll
- Usulan pemda atas kenaikan BBM Solar PSO adalah: Rp.200,00 s.d Rp. 500,00/Tabung namun karena beberapa pertimbangan sbb:
  - Biaya transportasi diatas radius 60 Km yang disubsidi PT. Pertamina (Persero) belum dapat menutup seluruh biaya transportasi tersebut;
  - Biaya riil transportasi yang dikelurkan Agen rata- rata Rp. 15.000,00 s.d Rp. 16.000,00/ tabung sedangkan yang disubsidi PT. Pertamina (Persero) sebesar Rp.11.000,00/ tabung;

  maka usulan Harga Jual Agen sebesar Rp.1000,00 disetujui sebagai kompensasi kondisi yang tengah dihadapi para Agen;
- Harga Jual Agen Ke Pangkalan berlaku hingga ditetapkannya HET baru hasil Evaluasi HET) yang akan diakomodir Provinsi Kalimantan Utara dan PT. Pertamina (Persero);
- Namun apabila dalam kurun waktu sebelum ditetapkannya HET baru hasil Evaluasi HET, terjadi kenaikan BBM (Solar PSO) **lebih dari Rp. 7.400,00 (Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah)** maka akan diadakan penyesuaian Harga Jual Agen Ke Pangkalan;
- Agen memiliki kewajiban mengantar Tabung Elpiji 3 Kg ke Pangkalan- Pangkalan di dalam radius 60 Km;

III. Kesimpulan

- Harga Jual Agen Elpiji 3 Kg di Kabupaten Bulungan menjadi Rp.15.500,00 (Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)/tabung;
- Harga Jual Agen Elpiji 3 Kg berlaku sesuai kesepakatan yang telah dibahas diatas.

Demikian Resume Rapat dibuat sebagai bahan tindak lanjut.

Pimpinan Rapat,

Heri Dwi Handoko
NIP. 19651105 198603 1 016

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 22 April 2015
Pukul : 09.00 Wite
Tempat : Bagian Perekonomian
Acara : Penetapan Tambahan Harga Jual Agen / Tebus Agen

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1	Heri D. Handoko	Bg. Perekonomian	1. ....
2	Gerilyawansyah	Dis Perindagkop	2. ....
3	Kairan	Dishub	3. ....
4	Husin	Distamben	4. ....
5	Siti R. Azizah		5. ....
6	Harry K. AR.		6. ....
7			7. ....
8			8. ....
9			9. ....
10			10. ....

Pimpinan Rapat,

Heri Dwi Handoko

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

DEWAN PIMPINAN CABANG
HIMPUNAN WIRASWASTA NASIONAL MINYAK DAN GAS BUMI
H I S W A N A M I G A S
Jl. KH. Agus Salim RT. 05 No. 12 Kel. Selumit Tarakan No. Telp. / Fax : (0551) 37336

Tarakan, 07 April 2015

Nomor : 350/DPC-HMT/IV/2015
Lampiran : -
Perihal : Penyesuaian H.E.T LPG Tabung 3 Kg

Kepada Yth,
Bapak Bupati Bulungan
di –
TANJUNG SELOR

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat kami Nomor : 346/DPC-HMT/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015 Perihal : Usulan Penyesuaian HET Elpiji Tabung 3 Kg dan Menindak lanjuti hasil rapat di Kantor Bupati Kab. Bulungan pada tanggal 06 April 2015 Perihal : Penyesuaian H.E.T Lpg Tabung 3 Kg, DPC Hiswana Migas Tarakan diminta memberikan Besaran Kenaikkan Harga Jual Elpiji 3kg pasca kenaikkan BBM sebesar = 7,81 % untuk Wilayah Kabupaten Bulungan. Hal ini dimaksudkan menstabilkan Harga Jualan Elpiji Tab. 3kg dan mempermudah Pengawasan,kenaikkan Harga BBM yang berlaku sejak tanggal 28 maret 2015, maka perlu diterbitkan Harga Jual sementara sebelum adanya Penetapan Harga Eceran Tertinggi di Kabupaten Bulungan.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengajukan Usulan Kenaikkan Harga Eceran Tertinggi (H.E.T), sebagai berikut :

No	Kota / Kabupaten	Harga Tebus Agen (Rp)	Margin Agen (Rp)	Ongkos Angkut (Rp)	Harga Jual Agen ke Pangkalan (Rp)	Margin Pangkalan (Rp)	Harga Eceran Tertinggi (Rp)
1	2	3	4	5	6 =(3+4=5)	7	7= (6+7)
1	Kab. Bulungan	11.588	1.200	2.712	15.500	2.000	17.500

Demikian atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

DEWAN PIMPINAN CABANG HISWANA MIGAS TARAKAN

Wakil Ketua

H. RACHMAT NASIR, SE

HIMPUNAN WIRASWASTA NASIONAL MINYAK DAN GAS BUMI – DEWAN PIMPINAN CABANG – HISWANA MIGAS – TARAKAN

Sekretaris

Ir. M. IDRIS NASIR

Tembusan kepada Yth :
1. Bpk. Ketua DPD VI Hiswana Migas Kalimantan di Balikpapan
2. Bpk. Asisten II Bidang Ekonomi / Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan
3. Bpk. Kepala Dinas Pertambangan & Energi Pemerintah Kabupaten Bulungan
4. Bpk. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi & UMKM Pemkab Bulungan
5. Bpk. Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Bulungan
6. Bpk. Domestik Gas Region VI Area Manajet PT. Pertamina (Persero) Kalimantan di Balikpapan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BUPATI BULUNGAN

Jalan Jelarai Tanjung Selor Hilir Kode Pos 77212 Kalimantan Utara
Telepon (0552) 23316- 23334 Faks. (0552) 21009

Tanjung Selor, 8 Januari 2015

Nomor : 542/004/Ek.Sarekda/I/2015
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : *Usulan HET LPG 3 Kg*

Kepada,
Yth. Pj. Gubernur
Kalimantan Utara
Di –
Tanjung Selor

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 065/152/ESDM.05/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 Perihal Perhitungan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram Kabupaten/Kota dan menindaklanjuti hasil rapat Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 6 Januari 2015 dan tanggal 8 Januari 2015 untuk menetapkan besaran usulan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg di Kabupaten Bulungan, maka berdasarkan hasil kesepakatan rapat tersebut, disampaikan usulan HET LPG 3 Kg Kabupaten Bulungan sebagai berikut:

No	Komponen Harga	HET (Rp.)	Ket.
1	Supply Point	-	Tanjung Selor
2	Harga Tebus Agen	11.588,-	
3	Margin Agen	1.200,-	
4	Ongkos Angkut	1.712,-	
5	Harga Agen Ke Pangkalan	14.500,-	
6	Margin Pangkalan	2.000,-	
	Harga Jual Pangkalan	16.500,-	HET(Pangkalan)

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bupati Bulungan,

Drs. H. Budiman Arifin, M.Si

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka